



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dihitung dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan Rencana Kerja Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dengan Pendekatan Kinerja atau *Performance Budget System*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Akan tetapi otonomi tersebut belum sepenuhnya diserahkan dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat krusial dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya guna mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat yang lebih baik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pendanaan yang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut berasal dari transfer pusat dalam bentuk dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Sedangkan pengesahan dalam peraturan bupati adalah Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Penyusunan APBD Tahun 2022 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun Anggaran 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan pelaksanaan APBD disusun berdasarkan asas akuntabilitas dan transparansi. Sesuai peraturan perundang-undangan tentang keuangan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selama satu tahun anggaran.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 disusun dengan berbasis akruwal.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 berbasis akruwal dimaksud adalah Laporan Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Operasional. Sesuai dengan definisi basis akruwal, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyajikan Aset, Kewajiban, Pendapatan Operasional dan Beban Operasional pada saat telah timbulnya hak atau kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Sedangkan untuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas disajikan dengan basis kas.

Selain itu, tujuan penyusunan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Keputusan tersebut merupakan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik sebagai bentuk pertanggungjawaban ataupun akuntabilitas publik.

Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Bangka Barat memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat melalui DPRD Kabupaten Bangka Barat mengenai beberapa hal, antara lain:

1. Informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah serta hasil-hasil yang telah dicapai.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

4. Informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam Catatan atas Laporan Keuangan diawali dengan Bab 1 Pendahuluan yang berisi maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan. Bab 2 Ekonomi Makro yang menjelaskan kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD. Bab 3 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan yang menjelaskan tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

pencapaian target yang telah ditetapkan. Bab 4 Kebijakan Akuntansi yang berisikan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan. Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan yang menjelaskan rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari pos pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, beban, komponen-komponen laporan arus kas dan Bab 6 Penutup.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**BAB 2**

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN  
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

**2.1 Ekonomi Makro**

Ekonomi Makro adalah studi tentang ekonomi yang menjelaskan perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Barat. Kabupaten Bangka Barat saat ini terdiri dari 6 kecamatan yaitu Kecamatan Muntok, Kecamatan Simpang Teritip, Kecamatan Jebus, Kecamatan Kelapa, Kecamatan Tempilang, dan Kecamatan Parittiga, serta 6 kelurahan yaitu Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Sungai Daeng, Kelurahan Tanjung, Kelurahan Kelapa, Kelurahan Menjelang dan Kelurahan Keranggan dan 60 desa serta didukung 150 dusun/lingkungan.

Berdasarkan data tahun 2021 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Barat dengan luas wilayah sekitar 2.884,15 km<sup>2</sup> atau 288.415 Ha dengan jumlah penduduk pada Tahun 2021 sebanyak 206.786 jiwa. Dari 206.786 jiwa tersebut tersebar di 6 (enam) Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Muntok dengan 53.306 jiwa. Di Kecamatan Parittiga yaitu 36.439 jiwa, berikutnya di Kecamatan Kelapa berjumlah 34.817 jiwa, Kecamatan Simpang Tertip berjumlah 30.378 jiwa, Kecamatan Tempilang berjumlah 28.762 jiwa dan paling sedikit penduduknya Kecamatan Jebus 22.761 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk pada akhir tahun 2021 adalah 72 orang per km<sup>2</sup>.

Nilai PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010 pada tahun 2020 adalah 10.310.640,00 juta rupiah, meningkat pada tahun 2021 menjadi 10.331.790,00 juta rupiah. Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan.

**a. Tabel PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)**

Kategori Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.865,34	1.666,97	1.605,94	1.777,75	1.922,85
B. Pertambangan dan Penggalan	1.416,12	1.309,93	1.176,26	1.006,12	1.345,48
C. Industri Pengolahan	5.578,86	6.083,73	6.456,63	5.767,21	6.970,79
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7,46	8,19	9,59	11,60	12,52



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Kategori Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,99	1,00	1,03	1,17	1,23
F. Konstruksi	880,68	997,15	1.062,66	1.051,81	1.106,14
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.851,27	2.010,13	1.990,96	1.887,64	2.049,36
H. Transportasi dan Pergudangan	122,35	132,36	139,70	124,29	138,41
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	154,68	165,72	177,84	187,60	203,20
J. Informasi dan Komunikasi	41,16	45,710	51,69	61,02	65,16
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	53,333	58,51	63,67	63,12	69,56
L. Real Estat	265,34	289,22	295,08	313,19	330,37
M,N. Jasa Perusahaan	18,82	20,25	20,96	20,37	21,81
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	588,12	624,89	669,57	692,63	727,36
P. Jasa Pendidikan	236,92	251,83	269,78	282,51	296,81
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	99,95	108,59	119,86	122,49	135,84
R,S,T,U. Jasa Lainnya	40,05	43,12	46,00	45,90	47,56
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>13.221,43</b>	<b>13.817,30</b>	<b>14.157,20</b>	<b>13.416,40</b>	<b>15.444,44</b>

b. Tabel PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kategori Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.279,01	1.299,05	1.297,75	1.343,58	1.343,75
B. Pertambangan dan Penggalan	1.196,31	1.202,07	1.218,79	1.049,80	1.157,08
C. Industri Pengolahan	4.443,58	4.753,19	5.345,37	4.971,03	4.746,29
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,68	3,99	4,59	5,48	5,95
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,67	0,72	0,74
F. Konstruksi	550,32	590,11	612,82	603,89	614,48
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.165,90	1.218,67	1.249,77	1.172,11	1.241,76
H. Transportasi dan Pergudangan	82,86	88,28	91,23	79,03	85,58
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	103,65	106,55	110,49	109,76	116,67
J. Informasi dan Komunikasi	32,60	36,02	40,55	48,03	50,87
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	34,71	36,98	39,62	39,45	41,56
L. Real Estate	182,53	195,85	198,93	208,69	217,88
M,N. Jasa Perusahaan	12,88	13,45	13,50	12,27	12,78
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	351,69	380,12	403,25	400,73	419,31
P. Jasa Pendidikan	140,04	152,81	161,99	160,76	163,77
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	66,05	71,02	76,25	77,07	84,24
R,S,T,U. Jasa Lainnya	27,26	28,38	29,65	28,26	28,89
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>9.673,71</b>	<b>10.177,20</b>	<b>10.895,22</b>	<b>10.310,64</b>	<b>10.331,79</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan kesehatan pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangka Barat tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

2020	2021	2022
69,08	69,60	70,12

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 sebesar 70,23 persen artinya sebesar 70 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Adapun tingkat pengangguran terbuka untuk Kabupaten Bangka Barat tahun yang sama sebesar 4,86 artinya dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata 4 orang diantaranya pencari kerja.

Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bangka Barat tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

2020	2021	2022
4,12	3,83	4,86

Untuk mengukur angka kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (%)
2020	589.894,00	5.830	2,70
2021	599.887,00	5.850	2,75
2022	635.861,00	5.300	2,46



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

## 2.2 Kebijakan Keuangan

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan. Hal tersebut menjadikan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan Keuangan diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan target penerimaan serta peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja.

Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022. Kebijakan Umum APBD terdiri atas 3 (tiga) kebijakan yaitu kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kebijakan tersebut berkaitan dengan fungsi pemerintahan yang bertugas memfasilitasi, membuat regulasi, dan menyediakan barang dan jasa yang sifatnya publik. Kebijakan dibidang belanja daerah secara umum masih sama dengan kebijakan pada tahun sebelumnya, yaitu diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh OPD diarahkan untuk menggunakan anggaran yang telah diamanatkan dengan lebih efisien dan efektif, dan mempertanggungjawabkannya melalui hasil (*output*) yang lebih terukur dan berkesinambungan (*sustainable*),
2. Mengarahkan kegiatan-kegiatan OPD supaya lebih fokus terhadap upaya pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan perbaikan kualitas lingkungan hidup,
3. Mengupayakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan oleh setiap OPD ada interkoneksinya, sehingga kegiatan yang satu dengan yang lainnya bersifat melengkapi dan bersinergi satu sama lain dan bermuara pada satu tujuan yang telah ditetapkan,
4. Mengarahkan kepada seluruh OPD agar dapat memisahkan kegiatan yang merupakan urusan pemerintah (*public domain*) dan urusan individu (*private domain*), sehingga kegiatan yang dilakukan lebih bermanfaat dan berdampak lebih luas,
5. Mengkaji kembali efektivitas bentuk-bentuk bantuan (finansial maupun barang) yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, dan mengembangkan bentuk intervensi yang lebih signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan tidak menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah,
6. Prioritas belanja daerah diarahkan untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat, terutama yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
7. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah menyerahkan pengelolaan kegiatan yang berskala kecil kepada masyarakat (swakelola), misalnya rehabilitasi sarana desa melalui tugas alokasi dana desa ataupun dana sharing PNPM,



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

8. Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan untuk dipergunakan secara efektif dan efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan/urusan desa,
9. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
10. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial,
11. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran,
12. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya,
13. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:
  - a. Penerimaan dana bagi hasil pajak agar diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan, dan jembatan,
  - b. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan, dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan,
  - c. Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat,
  - d. Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

Alokasi belanja Tahun Anggaran 2022 tetap lebih menekankan pada pelayanan publik, yang tercermin dari cukup besarnya anggaran yang disediakan untuk bidang pendidikan yang mencapai sekitar 28,22% dari total anggaran dan bidang kesehatan yang mencapai sekitar 22,39% dari total anggaran. Pembelanjaan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan publik dan bantuan-bantuan sosial yang dititikberatkan pada bidang pendidikan maupun kesehatan tersebut lebih diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana pada bidang pendidikan dan kesehatan. Program bantuan operasional sekolah, bantuan untuk siswa keluarga kurang mampu, siswa dan guru berprestasi, bantuan untuk keluarga miskin, dan hibah kepada organisasi-organisasi yang mendukung program pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Dalam memenuhi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kabupaten Bangka Barat telah menganggarkan klaster Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang merupakan salah satu klaster dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dirancang untuk menjaga masyarakat di Kabupaten Bangka Barat yang terdampak secara ekonomi agar dapat terus memenuhi kebutuhan dasarnya dan terhindar dari resiko akibat kesenjangan yang lebih dalam.

Realisasi Dana Perlindungan Sosial di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>I</b>	<b>Bantuan Sosial</b>			
	Penyediaan Permakanan	996.750.000,00	996.750.000	100,00
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.401.100.000,00	2.401.100.000	100,00
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	765.075.000,00	-	-
	<b>Sub Total Bantuan Sosial</b>	<b>4.162.925.000,00</b>	<b>3.397.850.000,00</b>	<b>81,62</b>
<b>II</b>	<b>Penciptaan Lapangan Kerja</b>			
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	70.848.000,00	60.014.136	84,71
	<b>Sub Total Penciptaan Lapangan Kerja</b>	<b>70.848.000,00</b>	<b>60.014.136,00</b>	<b>84,71</b>
<b>III</b>	<b>Perlindungan Sosial Lainnya</b>			
	- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	27.266.400,00	12.552.500	46,04
	<b>Sub Total Perlindungan Sosial Lainnya</b>	<b>27.266.400,00</b>	<b>12.552.500,00</b>	<b>46,04</b>
	<b>Total</b>	<b>Rp 4.261.039.400,00</b>	<b>Rp 3.470.416.636,00</b>	<b>81,45</b>

### 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Secara umum pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Bangka Barat telah berjalan cukup baik, sebagian besar program kegiatan dari masing-masing OPD dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan apa yang diharapkan baik dari segi tolak ukur kinerja seperti input, output, dan *outcome*-nya. Realisasi pendapatan tahun 2022 secara keseluruhan adalah 105,23% dari target yang direncanakan, sedangkan daya serap belanja dan transfer tahun 2022 adalah sebesar 92,34%. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut dapat diukur berdasarkan efektifitas dan efisiensi yang dicapai dan tidak terlepas



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

dari faktor-faktor yang mendorong seperti tingkat SDM yang cukup termasuk mental, pengawasan intern dari masyarakat yang cukup baik dan perencanaan yang cukup matang.

Adapun faktor yang menghambat sehingga terjadinya beberapa program kegiatan yang tidak mencapai target kinerja seperti yang diharapkan antara lain, SDM dari pihak ketiga maupun aparatur yang kurang kompetensinya, pengawasan kurang baik, terjadinya sesuatu tidak sesuai rencana atau karena faktor alam. Namun faktor-faktor penghambat tersebut tidak dapat dijadikan alasan atas tidak tercapainya target yang diharapkan. Semua faktor hambatan tersebut bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat merupakan tantangan yang harus dapat diatasi ditahun-tahun yang akan datang untuk tercapainya masyarakat Bangka Barat yang sejahtera.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**BAB 3**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 Pendapatan**

Setiap Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Untuk membangun daerah diperlukan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan. Pendapatan dapat berasal dari potensi daerah yang bersangkutan maupun dari propinsi dan pusat. Pendapatan yang digunakan untuk mendanai aktivitas Pemerintah dapat dibagi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Target Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan adalah sebesar Rp931.058.006.642,39 dan dapat direalisasikan sebesar Rp965.910.493.753,79 atau mencapai 103,74% sedangkan realisasi Pendapatan tahun 2021 adalah sebesar Rp879.865.272.394,06 atau mengalami kenaikan sebesar Rp86.045.221.359,73.

Rincian pendapatan tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Tahun 2022 PAD ditargetkan sebesar Rp104.667.737.165,43 dan terealisasi sebesar Rp88.534.302.222,79 atau sebesar 84,59%, sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp59.693.509.555,86 atau mengalami kenaikan sebesar Rp28.840.792.666,93 Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 ditargetkan penerimaan dari Pajak Daerah sebesar Rp30.163.590.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp21.724.751.484,90 atau sebesar 72,02%, sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp20.041.982.581,75 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.682.768.903,15. Kenaikan tersebut disebabkan kegiatan perekonomian di wilayah Kabupaten Bangka Barat sudah mulai kembali membaik setelah Pandemi Covid-19.

b. Retribusi Daerah

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 ditargetkan penerimaan dari Retribusi Daerah sebesar Rp10.173.665.155,00 dapat terealisasi sebesar Rp7.355.787.438,00 atau sebesar 72,30%, sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp4.430.974.655,25 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.924.812.782,75.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 ditargetkan penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp5.115.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp5.306.960.199,78 atau sebesar 103,75%, sedangkan tahun 2021 terealisasi



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

sebesar Rp4.856.440.070,26 atau mengalami kenaikan sebesar Rp450.520.129,52.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 ditargetkan penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp59.215.482.010,43 dapat terealisasi sebesar Rp54.146.803.100,11 atau sebesar 91,44%, sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp30.364.112.248,60 atau mengalami kenaikan sebesar Rp23.782.690.851,51. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pada BLUD RSUD Sejiran Setason.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp811.275.802.666,96 dan terealisasi sebesar Rp 868.259.629.159,00 atau sebesar 107,02%, sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp790.652.328.838,20 atau mengalami kenaikan sebesar Rp77.607.300.320,80. Pendapatan Transfer terdiri dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp680.732.230.732,00 dan terealisasi sebesar Rp 750.004.671.444,00 atau sebesar 110,18%, sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp647.121.161.176,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp102.883.510.268,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2022 terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp22.550.389.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp34.564.587.906,00 atau 153,28%, sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp38.175.806.882,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp3.611.218.976,00.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp104.782.751.732,00 dan terealisasi sebesar Rp176.103.280.339,00 atau sebesar 168,07%, sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp60.543.348.225,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp115.559.932.114,00. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya Transfer dari Pemerintah Pusat untuk Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty.

3) Dana Alokasi Umum

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp420.296.596.000,00 dan terealisasi sebesar Rp419.082.296.005,00 atau sebesar 99,71%, sedangkan



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

tahun 2021 terealisasi sebesar Rp419.681.643.719,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp599.347.714,00.

4) Dana Alokasi Khusus

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp133.102.494.000,00 dan terealisasi sebesar Rp120.254.507.194,00 atau sebesar 90,35%, sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp128.720.362.350,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp8.465.855.156,00.

b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 dianggarkan Transfer Pemerintah Pusat lainnya berupa Dana Penyesuaian sebesar Rp58.720.679.000,00 dan terealisasi sebesar Rp58.720.679.000,00 atau 100,00%, sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp91.154.924.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp32.434.245.000,00. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya Dana Insentif Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat. Transfer Pemerintah Pusat lainnya tahun 2022 merupakan pendapatan Dana Penyesuaian yang terdiri dari:

1) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp6.374.370.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.374.370.000,00 atau 100,00%, sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp29.857.710.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp23.483.340.000,00.

2) Dana Desa

Dana Desa tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp52.346.309.000,00 dan terealisasi sebesar Rp52.346.309.000,00 atau 100,00%, sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp61.297.214.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp8.950.905.000,00.

c. Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp71.822.892.934,96 dapat direalisasikan sebesar Rp59.534.278.715,00 atau sebesar 82,89%, sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp52.376.243.662,20 atau mengalami kenaikan sebesar Rp7.158.035.052,80. Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2022 terdiri dari:

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp51.374.726.267,96 dan terealisasi sebesar Rp54.567.478.715,00 atau 106,21%, sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp37.901.443.662,20 atau mengalami kenaikan sebesar Rp16.666.35.052,80.

2) Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya

Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp20.448.166.667,00 dan terealisasi sebesar Rp4.966.800.000,00 atau



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

24,29%, sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp14.474.800.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp9.508.000.000,00.

3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah merupakan pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp15.114.466.810,00 dan terealisasi sebesar Rp9.116.562.372,00 atau sebesar 60,32%, sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp29.519.434.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp20.402.871.628,00.

### 3.2 Belanja

Jumlah Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp831.229.740.508,00 dan terealisasi sebesar Rp758.886.587.598,69 atau 91,30%, sedangkan tahun 2021 Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp762.373.262.565,40 atau mengalami penurunan sebesar Rp3.486.674.966,71. Rincian Belanja Daerah tahun 2022 sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp725.144.329.431,00 dan terealisasi Rp679.707.773.238,36 atau 93,73%, sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp642.749.615.979,92 atau mengalami kenaikan sebesar Rp36.958.157.258,44. Belanja Operasi terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp354.687.250.354,00 dan terealisasi Rp340.559.407.327,00 atau 96,02%, sedangkan untuk tahun 2021 terealisasi sebesar Rp331.320.839.429,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp9.238.567.898,00.

b. Belanja Barang

Belanja Barang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp343.034.888.018,00 dan terealisasi sebesar Rp315.990.239.015,36 atau 92,12%, sedangkan untuk tahun 2021 terealisasi sebesar Rp296.081.262.711,92 atau mengalami kenaikan sebesar Rp19.908.976.303,44.

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp19.161.550.667,00 dan terealisasi sebesar Rp15.154.171.375,00 atau 79,09%, sedangkan untuk tahun 2021 terealisasi sebesar Rp12.966.036.565,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.188.134.810,00.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp8.260.640.392,00 dan terealisasi sebesar Rp8.003.955.521,00 atau 96,89%, sedangkan untuk tahun 2021 terealisasi



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

sebesar Rp2.381.477.274,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp5.622.478.247,00.

2. Belanja Modal

Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp105.401.098.002,00 terealisasi sebesar Rp79.178.814.360,33 atau sebesar 75,12%, sedangkan untuk tahun 2021 Belanja Modal terealisasi sebesar Rp119.623.646.585,48 atau mengalami penurunan sebesar Rp40.444.832.225,15 yang terdiri dari:

a) Belanja Tanah

Belanja Tanah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tidak dianggarkan, sedangkan untuk tahun 2021 terealisasi sebesar Rp5.498.170.870,00.

b) Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp33.503.134.672,00 dan terealisasi sebesar Rp30.522.088.004,00 atau 91,10%, sedangkan untuk tahun 2021 terealisasi sebesar Rp28.321.836.534,18 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.200.251.469,82.

c) Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp44.990.309.999,00 dan terealisasi sebesar Rp23.708.809.580,03 atau 52,70%, sedangkan untuk tahun 2021 terealisasi sebesar Rp29.153.043.926,36 atau mengalami penurunan sebesar Rp5.444.234.346,33.

d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp25.252.420.250,00 dan terealisasi sebesar Rp23.794.316.695,30 atau 94,23%, sedangkan untuk tahun 2021 terealisasi sebesar Rp53.165.752.404,94 atau mengalami penurunan sebesar Rp29.371.435.709,64.

e) Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.655.233.081,00 dan terealisasi sebesar Rp1.153.600.081,00 atau 69,69%, sedangkan untuk tahun 2021 terealisasi sebesar Rp3.484.842.850,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp2.331.242.769,00.

f) Belanja Aset Lainnya

Belanja Aset Lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tidak dianggarkan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

3. Belanja Tidak Terduga  
Belanja tidak terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp684.313.075,00 namun tidak terealisasi, sedangkan untuk tahun 2021 juga tidak terdapat realisasi.

### **3.3 Transfer**

Transfer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp114.274.954.515,00 dan terealisasi sebesar Rp114.215.469.015,00 atau 99,95%, sedangkan untuk tahun 2021 terealisasi sebesar Rp114.402.645.627,98 atau mengalami penurunan sebesar Rp187.176.612,98.

#### **3.3.1 Bagi Hasil Ke Desa**

Bagi Hasil Ke Desa merupakan Bagi Hasil yang diberikan kepada Desa atas Pendapatan objek Pajak dan Retribusi yang terdapat pada Desa. Bagi Hasil Ke Desa tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp4.033.725.515,00 dan terealisasi sebesar Rp4.033.725.515,00 atau sebesar 100,00%. Bagi Hasil Ke Desa terdiri dari :

1. Bagi Hasil Pajak  
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.016.359.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.016.359.000,00 atau 100,00%, sedangkan untuk tahun 2021 terealisasi sebesar Rp2.061.040.349,18 atau mengalami kenaikan sebesar Rp955.318.650,82.
2. Bagi Hasil Retribusi  
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.017.366.515,00 dan terealisasi sebesar Rp1.017.366.515,00 atau 100,00%, sedangkan untuk tahun 2021 terealisasi sebesar Rp534.669.678,80 atau mengalami kenaikan sebesar Rp482.696.836,20.

#### **3.3.2 Transfer Ke Desa**

Transfer Ke Desa merupakan Transfer Alokasi Dana Desa dan Dana Desa serta Insentif Badan Permusyawaratan Desa yang diberikan kepada Pemerintah Desa. Transfer Ke Desa tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp110.041.229.000,00 dan terealisasi sebesar Rp109.981.743.500,00 atau sebesar 99,95%, sedangkan untuk tahun 2021 terealisasi sebesar Rp111.806.935.600,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.825.192.100,00.

#### **3.3.3 Transfer Antar Daerah**

Transfer Antar Daerah merupakan Transfer Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah Lainnya. Tahun 2022 Transfer Antar Daerah dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp200.000.000,00 atau sebesar 100,00% sedangkan tahun 2021 Transfer Antar Daerah tidak dianggarkan.

### **3.4 Pembiayaan**

1. Penerimaan Pembiayaan  
Pada Tahun Anggaran 2022 Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp14.446.688.380,61 dan terealisasi sebesar Rp14.383.364.630,61 atau 99,56%,



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

sedangkan untuk tahun 2021 terealisasi sebesar Rp11.257.324.179,93 atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.126.040.450,68. Kenaikan ini disebabkan karena terjadinya kenaikan Silpa tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya.

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya  
Pada anggaran tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp14.346.688.380,61 dan terealisasi sebesar Rp14.346.688.380,61 atau 100,00%, sedangkan untuk tahun 2021 terealisasi sebesar Rp11.086.295.159,93 atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.260.393.220,68.
- b. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah  
Pada anggaran tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp36.676.250,00 atau sebesar 36,68%, sedangkan untuk tahun 2021 terealisasi sebesar Rp171.029.020,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp134.352.770,00. Penerimaan kembali pinjaman daerah merupakan pengembalian pokok pinjaman perkuatan modal.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Tahun 2022 tidak dianggarkan.

Berdasarkan perhitungan antara surplus/defisit pendapatan dan belanja dengan pembiayaan netto maka didapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2022 sebesar Rp107.191.801.770,71 sedangkan untuk tahun 2021 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp14.346.688.380,61 atau mengalami kenaikan sebesar Rp92.845.113.390,10.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**BAB 4**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat merupakan organisasi yang mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan susunan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Tipe C;
3. Inspektorat Daerah Tipe B;
4. Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat sebanyak 16 dinas, terdiri dari :
  - a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - b. Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
  - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - e. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
  - f. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
  - g. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan pemerintahan sub kebakaran;
  - i. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - j. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B yang menyelenggarakan urusan



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

- pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - l. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
  - m. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
  - o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
  - p. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
5. Badan Daerah sebanyak 5 badan, terdiri dari:
- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
  - b. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - d. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan.
  - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sub urusan bidang bencana.
6. Kecamatan sebanyak 6 kecamatan, terdiri dari:
- a. Kecamatan Muntok dengan Tipe A;
  - b. Kecamatan Parittiga dengan Tipe A;
  - c. Kecamatan Kelapa dengan Tipe A;
  - d. Kecamatan Simpang Teritip dengan Tipe A;
  - e. Kecamatan Jebus dengan Tipe A; dan
  - f. Kecamatan Tempilang dengan Tipe A.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki 1 (satu) Rumah Sakit Umum yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah penuh pada tanggal 4 Desember 2015.

Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan entitas akuntansi. OPD bertanggung jawab terhadap anggaran yang ada pada OPD tersebut termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Bentuk pertanggungjawaban OPD disusun dalam Laporan



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Keuangan OPD yang harus dilaporkan dan disampaikan secara rutin kepada fungsi Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ataupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 60 (enam puluh) Desa dan 6 (enam) Kelurahan. Desa merupakan bentuk Pemerintahan tersendiri yang pengelolaan keuangannya terpisah dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat walaupun sumber Keuangan Desa sebagian besar bersumber dari dana transfer Pemerintah Kabupaten ke Desa. Sedangkan Kelurahan merupakan entitas yang pencatatan akuntansinya tergabung dalam entitas akuntansi Kecamatan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan instansi lainnya yang pencatatan akuntansinya tergabung ke OPD yang menaunginya, yaitu:

1. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora)  
Dikpora memiliki 6 (enam) Koordinator Pendidikan Wilayah di enam kecamatan. Selain itu, Dikpora juga memiliki 38 (tiga puluh delapan) SMP, 136 (seratus tiga puluh enam) SD, dan 41 (empat puluh satu) TK.
2. Dinas Kesehatan  
Dinas Kesehatan memiliki 1 (satu) Rumah Sakit Umum, 8 (delapan) Puskesmas dan 19 (sembilan belas) Puskesmas Pembantu.
3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah  
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki 3 (tiga) UPT di tiga kecamatan (Jebus, Kelapa, Muntok) UL (Unit Layanan) 3 yaitu Parittiga, Tempilang, Simpang Teritip.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan  
Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki 2 (dua) UPT yaitu UPT Balai Benih Ikan di Kecamatan Kelapa dan UPT Pasar Pendaratan Ikan di Kecamatan Muntok.
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 1 (satu) UPT yaitu UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).
6. Dinas Pertanian dan Pangan  
Dinas Pertanian dan Pangan memiliki 2 (dua) UPT Balai Penyuluh di dua kecamatan.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki 2 (dua) Badan Usaha Milik Daerah yaitu :

1. PDAM Tirta Sejiran Setason  
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sejiran Setason didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang PDAM Tirta



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Sejiran Setason. Susunan Direksi PDAM Tirta Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 sebagai berikut :

Direktur	Najamuddin, SH
Kabag. Administrasi, Keuangan dan Umum	Irsan
Kabag. Teknik	Arsudin

Sedangkan susunan Badan Pengawas PDAM Tirta Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat terdiri dari:

Badan Pengawas	Ir. Suharli
----------------	-------------

2. PD Bangka Barat Sejahtera

PD Bangka Barat Sejahtera didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah dan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 32.A Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bangka Barat Sejahtera. Susunan Kepengurusan PD Bangka Barat Sejahtera Tahun 2021 sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Abimanyu, SE.,M.Ec. Dev, Ak	Plt. Dewan Pengawas

Sebagai entitas pelaporan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

1. Pendapatan-LRA.

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada kas daerah. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui saat timbulnya hak pemerintah Kabupaten Bangka Barat tanpa melihat pendapatan tersebut diterima di kas daerah. Akuntansi Pendapatan-LO



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

3. **Belanja**  
Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.
4. **Beban**  
Beban diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tanpa melihat pengeluaran kas dari kas daerah. Akuntansi Beban dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
5. **Transfer**  
Transfer adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Transfer diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.
6. **Pembiayaan**  
Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
7. **Kas dan Setara Kas**  
Kas merupakan uang tunai dan saldo di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang sangat likuid serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang sangat signifikan.
8. **Piutang**  
Piutang merupakan hak Pemerintah untuk menerima pembayaran dari Entitas lain termasuk Wajib pajak atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
9. **Persediaan**  
Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
10. **Investasi**  
Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden, royalty atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11. **Aset dan Penyusutan**  
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset diakui (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Bangka barat dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan (2) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

12. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya atau pembangunannya belum selesai sampai pada tahun anggaran.

13. Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

14. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

15. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

16. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

17. Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

18. Prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan konsolidasi

Prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan konsolidasi merupakan acuan konsolidasi laporan keuangan. Konsolidasi laporan keuangan daerah merupakan penggabungan dua laporan keuangan entitas pelaporan yaitu laporan keuangan Pemerintah Daerah dan laporan keuangan BLUD.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 salah satunya mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Rincian APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Pos Anggaran	APBD Perubahan 2022 (Rp)	APBD 2022 (Rp)
1	Pendapatan	931.058.006.642,39	905.019.626.010,00
2	Belanja dan Transfer	945.504.695.023,00	1.039.923.539.645,00
3	Penerimaan Pembiayaan	14.446.688.380,61	141.903.913.635,00
4	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00

Pada Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mengakomodir anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sejiran Setason dan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari APBN, baik pendapatan maupun belanja.

Kebijakan basis pengukuran atau penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah seperti aset, kewajiban, dan ekuitas, dinilai sesuai nilai perolehan historis, yaitu aset dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dengan kewajiban.

Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan pada buku inventaris bidang aset yang merupakan rekap dari daftar inventaris OPD. Harga perolehan memasukkan biaya-biaya lain seperti honorarium panitia, ATK, biaya perjalanan dinas serta biaya-biaya lainnya untuk memperoleh aset tetap tersebut.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menyusun Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan, secara umum telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada penyusunan laporan keuangan daerah tahun 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

#### **4.5 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat merupakan konsolidasi Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang dikonsolidasikan adalah laba/rugi operasional yang mempengaruhi penyertaan



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

modal pemerintah daerah. Laba/rugi operasional dimaksud adalah untuk BUMD yang penilaian penyertaan modalnya menggunakan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan untuk laporan keuangan BLUD, khusus untuk laporan arus kas tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menyusun laporan keuangan tahun 2022 menggunakan aplikasi SIMDA KEUANGAN dan SIMDA BMD dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**BAB 5**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**1.1 Pendapatan-LRA**

**1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA**

Pendapatan Asli Daerah-LRA merupakan pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Anggaran Pendapatan Asli Daerah-LRA Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 sebesar Rp104.667.737.165,43 dengan realisasi sebesar Rp88.534.302.222,79 atau sebesar 84,59%.

**1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LRA**

Pendapatan Pajak Daerah-LRA merupakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang berasal dari pajak yang dipungut dari wajib pajak berdasarkan subjek dan objek pajak. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan organisasi perangkat daerah yang mengelola pajak daerah. Pendapatan Pajak-LRA diakui dengan basis kas, dengan artian bahwa Pendapatan Pajak-LRA merupakan pendapatan pajak yang telah diterima di Kas Daerah pada tahun pelaporan, baik pendapatan pajak atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tahun pelaporan dan pendapatan pajak dari pelunasan piutang pajak.

Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat merealisasikan penerimaan daerah melalui pajak daerah sebesar Rp21.724.751.484,90 dan berkontribusi sebesar 72,02% dari total Pendapatan Asli Daerah. Dari 11 (sebelas) sumber pajak daerah, kontribusi tertinggi terdapat pada pajak penerangan jalan yaitu sebesar Rp12.465.654.940,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah di tahun 2021, realisasi penerimaan pajak di Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.682.768.903,15 atau 8,40%. Kenaikan penerimaan pajak daerah di Tahun 2022 dikarenakan perekonomian di Kabupaten Bangka Barat mulai kembali membaik setelah pandemi Covid-19.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Nomor Referensi	Jenis Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	% Kenaikan/ penurunan
1.1.1.1.1	Pajak Hotel	100.750.000,00	65.351.001,00	58.074.135,00	7.276.866,00	12,53
1.1.1.1.2	Pajak Restoran	2.820.000.000,00	2.055.812.417,00	2.499.623.400,00	(443.810.983,00)	17,76
1.1.1.1.3	Pajak Hiburan	35.700.000,00	40.526.399,00	2.036.000,00	38.490.399,00	1.890,49
1.1.1.1.4	Pajak Reklame	450.000.000,00	342.360.716,10	439.140.276,25	(96.779.560,15)	22,04



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Nomor Referensi	Jenis Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (Rp)	% Kenaikan/ penurunan
1.1.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan	13.500.000.000,00	12.465.654.940,00	10.930.973.586,00	1.534.681.354,00	14,04
1.1.1.1.6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000.000,00	381.669.363,00	848.663.554,50	(466.994.191,50)	55,03
1.1.1.1.7	Pajak Parkir	7.140.000,00	4.100.000,00	3.825.000,00	275.000,00	7,19
1.1.1.1.8	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	126.994.263,80	125.247.730,00	1.746.533,80	1,39
1.1.1.1.9	Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00	232.118.500,00	284.777.575,00	(52.659.075,00)	18,49
1.1.1.1.10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.000.000.000,00	4.775.580.941,00	3.603.904.833,00	1.171.676.108,00	32,51
1.1.1.1.11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.500.000.000,00	1.234.582.944,00	1.245.716.492,00	(11.133.548,00)	0,89
	<b>Total</b>	<b>30.163.590.000,00</b>	<b>21.724.751.484,90</b>	<b>20.041.982.581,75</b>	<b>1.682.768.903,15</b>	<b>8,40</b>

**1. Pajak Hotel**

Pajak Hotel tahun 2022 terealisasi sebesar Rp65.351.001,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp58.074.135,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp7.276.866,00 atau sebesar 12,53%. Pendapatan Pajak Hotel di tahun 2022 sudah mengalami peningkatan di bandingkan tahun 2021, hal ini dikarenakan tahun 2022 pengguna jasa hotel di Kabupaten Bangka Barat meningkat dibanding tahun 2021 akibat pandemi Covid-19.

**2. Pajak Restoran**

Pajak Restoran tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.055.812.417,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp2.499.623.400,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp443.810.983,00 atau sebesar 17,76%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan wajib pajak restoran yang berdampak pada penurunan pembayaran Pajak Restoran.

**3. Pajak Hiburan**

Pajak Hiburan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp40.526.399,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp2.036.000,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp38.490.399,00 atau sebesar 1.890,49%. Kenaikan realisasi pajak hiburan yang sangat signifikan ini disebabkan adanya peningkatan kegiatan hiburan di Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 dibandingkan tahun 2021.

**4. Pajak Reklame**

Pajak Reklame tahun 2022 terealisasi sebesar Rp342.360.716,10 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp439.140.276,25 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp96.779.560,15 atau sebesar 22,04%. Hal ini disebabkan oleh penurunan pemasangan reklame oleh wajib pajak di Kabupaten Bangka Barat.

**5. Pajak Penerangan Jalan**

Pajak Penerangan Jalan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp12.465.654.940,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp10.930.973.586,00 sehingga



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

terdapat kenaikan sebesar Rp1.534.681.354,00 atau sebesar 14,04%. Kenaikan ini disebabkan oleh bertambahnya pelanggan baru PLN yang berbanding lurus dengan bertambahnya bangunan-bangunan baru di Kabupaten Bangka Barat.

**6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp381.669.363,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp848.663.554,50 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp466.994.191,50 atau sebesar 55,03%. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya pengerjaan konstruksi fisik di Kabupaten Bangka Barat.

**7. Pajak Parkir**

Pajak Parkir tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.100.000,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp3.825.000,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp275.000,00 atau sebesar 7,19%. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan jasa parkir oleh masyarakat sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan wajib pajak parkir.

**8. Pajak Air Tanah**

Pajak Air Tanah tahun 2022 terealisasi sebesar Rp126.994.263,80 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp125.247.730,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp1.746.533,80 atau sebesar 1,39%. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak.

**9. Pajak Sarang Burung Walet**

Pajak Sarang Burung Walet tahun 2022 terealisasi sebesar Rp232.118.500,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp284.777.575,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp52.659.075,00 atau sebesar 18,49%. Penurunan dari penerimaan Pajak Sarang Burung Walet disebabkan oleh penurunan hasil panen sarang burung walet.

**10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.775.580.941,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp3.603.904.833,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp1.171.676.108,00 atau sebesar 32,51%. Kenaikan dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disebabkan oleh bertambahnya wajib pajak dan meningkatnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak.

**11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.234.582.944,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.245.716.492,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp11.133.548,00 atau sebesar 0,89%.

**1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA**

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA merupakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Berikut adalah jenis retribusi dan organisasi perangkat daerah yang mengelola retribusi:



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Jenis Retribusi	OPD
Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
Pelayanan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Paritiga, Kecamatan Jebus, Kecamatan Kelapa
Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
Pengujian Kendaraan Bermotor	
Parkir Khusus	
Terminal-Tempat Parkir Kendaraan	
Terminal-Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
Pasar Grosir/Pertokoan	
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	
Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan/Pyenyedotan Kakus	
Pengawasan dan Pengendalian Menara Telokomunikasi	
Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan
IMB	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Izin Trayek	
Izin Usaha Perikanan	
Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
Tempat Penginapan	
Pelayanan Pasar-Kios	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Tempat Rekreasi dan Olahraga	

Pendapatan Retribusi-LRA diakui dengan basis kas, dengan artian bahwa Pendapatan Retribusi-LRA merupakan pendapatan retribusi yang telah diterima di Kas Daerah pada tahun pelaporan, baik pendapatan retribusi atas penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) tahun pelaporan dan pendapatan retribusi dari pelunasan piutang retribusi.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Nomor Referensi	Jenis Retribusi	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/penurunan (Rp)	% Kenaikan /Penurunan
1.1.1.2.1	Pelayanan Kesehatan	5.000.000.000,00	3.165.820.800,00	2.337.250.500,00	828.570.300,00	35,45
1.1.1.2.2	Pelayanan Persampahan	1.152.000.000,00	483.970.000,00	242.973.000,00	240.997.000,00	99,19
1.1.1.2.3	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.556.120.000,00	1.338.247.000,00	1.020.395.500,00	317.851.500,00	31,15
1.1.1.2.4	Pelayanan Pasar	50.000.000,00	50.880.300,00	9.860.400,00	41.019.900,00	416,01
1.1.1.2.5	Pengujian Kendaraan Bermotor	300.000.000,00	141.618.600,00	118.745.200,00	22.873.400,00	19,26



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Nomor Referensi	Jenis Retribusi	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/penurunan (Rp)	% Kenaikan /Penurunan
1.1.1.2.6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	8.000.000,00	138.936.500,00	10.591.954,00	128.344.546,00	1.211,72
1.1.1.2.7	Pengendalian Menara Telekomunikasi	428.745.155,00	608.773.769,00	0,00	608.773.769,00	100,00
1.1.1.2.8	Pemakaian Kekayaan Daerah	322.000.000,00	1.000.000,00	18.700.000,00	(17.700.000,00)	94,65
1.1.1.2.9	Pasar Grosir/Pertokoan	270.000.000,00	158.808.850,00	196.912.000,00	(38.103.150,00)	19,35
1.1.1.2.10	Tempat Pelelangan	0,00	0,00	1.985.100,00	(1.985.100,00)	0,00
1.1.1.2.11	Retribusi Terminal-Fasilitas Lainnya di Terminal	150.600.000,00	172.942.928,00	154.555.220,00	18.387.708,00	11,90
1.1.1.2.12	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Vila	100.000.000,00	16.750.000,00	5.250.000,00	11.500.000,00	219,05
1.1.1.2.13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	450.000.000,00	603.103.000,00	155.518.000,00	447.585.000,00	287,80
1.1.1.2.14	Penjualan Produksi Usaha Daerah	6.120.000,00	6.130.000,00	6.705.000,00	(575.000,00)	8,58
1.1.1.2.15	Izin Mendirikan Bangunan	250.000.000,00	423.529.091,00	97.616.781,25	325.912.309,75	333,87
1.1.1.2.16	Izin Trayek	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.17	Izin Usaha Perikanan	2.040.000,00	0,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	0,00
1.1.1.2.18	IMTA	6.000.000,00	0,00	52.116.000,00	(52.116.000,00)	0,00
1.1.1.2.19	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	120.000.000,00	45.276.600,00	0,00	45.276.600,00	100,00
	<b>Total</b>	<b>10.173.665.155,00</b>	<b>7.355.787.438,00</b>	<b>4.430.974.655,25</b>	<b>2.924.812.782,75</b>	<b>66,01</b>

Tahun 2022 realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar Rp7.355.787.438,00 dan berkontribusi sebesar 8,31% dari total PAD. Dari sumber-sumber retribusi daerah, kontribusi tertinggi terdapat pada Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp3.165.820.800,00. Pada umumnya capaian retribusi daerah Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami kenaikan.

#### 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.165.820.800,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp2.337.250.500,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp828.570.300,00 atau sebesar 35,45%. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya program UHC (Universal Health Coverage) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sehingga masyarakat di Kabupaten Bangka Barat telah memiliki jaminan kesehatan. Program UHC ini hanya bisa digunakan oleh masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Bangka Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**2. Retribusi Pelayanan Persampahan**

Retribusi Pelayanan Persampahan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp483.970.000,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp242.973.000,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp240.997.000,00 atau sebesar 99,19%. Kenaikan ini disebabkan oleh bertambahnya wajib retribusi persampahan yang menggunakan jasa retribusi persampahan.

**3. Retribusi Pelayanan Parkir**

Retribusi Pelayanan Parkir tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.338.247.000,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.020.395.500,00 sehingga terdapat kenaikan yang sangat signifikan sebesar Rp317.851.500,00 atau sebesar 31,15%. Kenaikan ini disebabkan oleh penerapan sistem parkir satu pintu pada areal pasar Muntok.

**4. Retribusi Pelayanan Pasar**

Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2022 terealisasi sebesar Rp50.880.300,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp9.860.400,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp41.019.900,00 atau sebesar 416,01%. Kenaikan ini disebabkan telah beroperasinya kegiatan pasar secara normal di Kabupaten Bangka Barat yang tahun sebelumnya terdampak Covid-19.

**5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2022 terealisasi sebesar Rp141.618.600,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp118.745.200,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp22.873.400,00 atau sebesar 19,26%. Kenaikan dari penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor disebabkan banyaknya jumlah kendaraan umum baik penumpang maupun barang yang melakukan uji kelayakan kendaraan. Aktifitas transportasi meningkat sehingga pendapatan menjadi bertambah yang mengakibatkan sebagian unit transportasi umum sudah mulai beroperasi.

**6. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tahun 2022 terealisasi sebesar Rp138.936.500,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp10.591.954,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp128.344.546,00 atau sebesar 1.211,72%. Kenaikan ini sangat signifikan dikarenakan oleh sebagian besar pedagang di Kabupaten Bangka Barat melakukan tera ulang.

**7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2022 terealisasi sebesar Rp608.773.769,00 merupakan retribusi atas pembayaran 121 (seratus dua puluh satu) menara telekomunikasi, sedangkan tahun 2021 tidak terdapat realisasi.

**8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.000.000,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp18.700.000,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp17.700.000,00 atau sebesar 94,65%. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya penyewaan alat berat oleh masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**9. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan**

Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp158.808.850,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp196.912.000,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp38.103.150,00 atau sebesar 19,35%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pembayaran retribusi pasar grosir oleh wajib retribusi atau meningkatnya tunggakan wajib retribusi.

**10. Retribusi Tempat Pelelangan**

Tahun 2022 Retribusi Tempat Pelelangan tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bangka Barat, sedangkan di tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.985.100,00.

**11. Retribusi Terminal-Fasilitas Lainnya di Terminal**

Retribusi Terminal-Fasilitas Lainnya di Terminal Umum tahun 2022 terealisasi sebesar Rp172.942.928,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp154.555.220,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp18.387.708,00 atau sebesar 11,90%. Kenaikan ini disebabkan fasilitas-fasilitas yang berada didalam terminal sudah mulai kembali beroperasi.

**12. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila**

Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila tahun 2022 terealisasi Rp16.750.000,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp5.250.000,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp11.500.000,00 atau sebesar 219,05% yang merupakan sewa penginapan/bungalow milik Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang berada di lokasi wisata Batu Rakit.

**13. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun 2022 terealisasi sebesar Rp603.103.000,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp155.518.000,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp447.585.000,00 atau sebesar 287,80%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah masyarakat yang berkunjung ke tempat rekreasi di Kabupaten Bangka Barat.

**14. Penjualan Produksi Usaha Daerah**

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tahun 2022 merupakan retribusi penjualan produksi usaha daerah berupa bibit atau benih ikan terealisasi sebesar Rp6.130.000,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp6.705.000,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp575.000,00 atau sebesar 5,58%. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya penjualan benih ikan pada BBI di Kecamatan Kelapa.

**15. Retribusi IMB**

Retribusi IMB tahun 2022 terealisasi sebesar Rp423.529.091,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp97.616.781,25 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp325.912.309,75 atau sebesar 333,87%. Realisasi Retribusi IMB mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah masyarakat di Kabupaten Bangka Barat yang mengurus Izin Mendirikan Bangunan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

- 16. Retribusi Izin Trayek**  
Retribusi Izin Trayek tahun 2022 tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya masyarakat yang mengurus izin trayek.
- 17. Retribusi Izin Usaha Perikanan**  
Retribusi Izin Usaha Perikanan tahun 2022 tidak ada terealisasi dikarenakan tidak adanya masyarakat mengurus izin usaha perikanan.
- 18. IMTA**  
Retribusi IMTA 2022 tidak ada realisasi dikarenakan tidak adanya Perusahaan atau individu yang mengurus izin IMTA.
- 19. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**  
Retribusi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pada tahun 2022 terealisasi Rp45.276.600,00 yang merupakan retribusi penyediaan sedot kakus.

**1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LRA yang Dipisahkan merupakan pendapatan berupa dividen atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada Lembaga Keuangan. Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/penurunan (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
1.1.1.3	Dividen atas Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan	5.115.000.000,00	5.306.960.199,78	4.856.440.070,26	450.520.129,52	9,28
	<b>Total</b>	<b>5.115.000.000,00</b>	<b>5.306.960.199,78</b>	<b>4.856.440.070,26</b>	<b>450.520.129,52</b>	<b>9,28</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA tahun 2022 terealisasi sebesar Rp5.306.960.199,78 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp4.856.440.070,26 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp450.520.129,52 atau sebesar 9,28%. Realisasi tersebut merupakan dividen atas penyertaan modal pada PT. BPD Sumatera Selatan Bangka Belitung untuk tahun buku 2021.

Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak menerima Dividen dari PT. BPR Syariah Bangka Belitung, hal ini dikarenakan PT. BPR Syariah Bangka Belitung sedang mengalami permasalahan keuangan, sehingga masih dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperbaiki kinerja keuangan dari bank tersebut.

**1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Nomor Referensi	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
1.1.1.4.1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	6.847.243.924,43	5.362.039.000,00	139.278.000,00	5.222.761.000,00	3.749,88
1.1.1.4.2	Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	254.996.000,00	(254.996.000,00)	0,00
1.1.1.4.3	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	750.000.000,00	311.369.750,00	0,00	311.369.750,00	0,00
1.1.1.4.4	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.248.238.086,00	593.167.711,31	709.987.358,00	(116.819.646,69)	16,45
1.1.1.4.5	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.400.000.000,00	705.616.407,00	865.123.276,00	(159.506.869,00)	18,44
1.1.1.4.6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.000.000.000,00	0,00	6.500.000,00	(6.500.000,00)	0,00
1.1.1.4.8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.000.000.000,00	107.102.591,00	103.190.501,00	3.912.090,00	3,79
1.1.1.4.9	Pendapatan Denda Pajak Hotel	10.000.000,00	0,00	205.476,00	(205.476,00)	0,00
1.1.1.4.10	Pendapatan Denda Pajak Restoran	30.000.000,00	4.053.967,00	7.045.472,00	2.991.505,00	42,46
1.1.1.4.11	Pendapatan Denda Pajak Reklame	25.000.000,00	870.715,00	3.012.155,00	(2.141.440,00)	71,09
1.1.1.4.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	500.000.000,00	1.097.280,00	2.845.256,60	(1.747.976,60)	61,43
1.1.1.4.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00	419.700,00	306.752,00	112.948,00	36,82
1.1.1.4.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	505.000.000,00	0,00	14.000,00	(14.000,00)	0,00
1.1.1.4.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	500.000.000,00	18.368.067,00	15.412.006,00	2.956.061,00	19,18



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Nomor Referensi	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
1.1.1.4.16	Pendapatan BLUD	38.300.000.000,00	46.049.796.057,65	17.535.361.743,00	28.514.434.314,65	162,61
1.1.1.4.17	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	250.000.000,00	992.901.854,15	3.949.455.312,00	(2.956.553.457,85)	74,85
1.1.1.4.18	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.19	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	6.771.378.941,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>59.215.482.010,43</b>	<b>54.146.803.100,11</b>	<b>30.364.112.248,60</b>	<b>23.782.690.851,51</b>	<b>78,32</b>

Berikut penjelasan terkait kenaikan maupun penurunan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA :

**1. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LRA**

Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LRA merupakan penerimaan atas pelelangan dari Barang Milik Daerah. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp6.847.243.924,43 dan terealisasi sebesar Rp5.362.039.000,00 sedangkan pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp139.278.000,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp5.222.761.000,00 atau sebesar 3.749,88%. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LRA tahun 2022 merupakan hasil dari penjualan Kendaraan Dinas di Kabupaten Bangka Barat.

**2. Hasil Sewa BMD-LRA**

Hasil Sewa BMD-LRA adalah penerimaan atas penyewaan dari aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, berupa hasil sewa sebagian bangunan Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai kantor kas, ATM, kantin dan sebagainya. Hasil Sewa BMD – LRA tahun 2022 tidak dianggarkan dan sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp254.996.000,00. Hasil Sewa BMD-LRA dianggarkan pada Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.

**3. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LRA**

Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LRA merupakan pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp311.369.750,00 sedangkan tahun 2021 tidak terdapat realisasi dikarenakan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LRA dianggarkan pada Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**4. Jasa Giro pada Kas Daerah-LRA**

Jasa Giro pada Kas Daerah -LRA merupakan penerimaan jasa giro rekening kas daerah dan penerimaan jasa giro rekening bendahara pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Penerimaan Jasa Giro-LRA tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp2.248.238.086,00 dan terealisasi sebesar Rp593.167.711,31 sedangkan di tahun 2021 terealisasi sebesar Rp709.987.358,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp116.819.646,69 atau sebesar 16,45%. Penurunan ini dikarenakan berkurangnya dana yang terdapat pada Giro Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

**5. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LRA**

Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LRA merupakan Penerimaan Bunga Deposito atas penempatan dana Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam bentuk deposito di BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Penerimaan Bunga Deposito tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp5.400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp705.616.407,00 sedangkan di tahun 2021 terealisasi sebesar Rp865.123.276,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp159.506.869,00 atau sebesar 18,44%. Penurunan yang cukup signifikan ini dikarenakan menurunnya penempatan Deposito yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

**6. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LRA**

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LRA merupakan tata cara perhitungan terhadap Bendahara dan/atau Pengurus Barang jika dalam pengurusannya terdapat Kekurangan Perbendaharaan, maka Bendahara dan/atau Pengurus Barang yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara tahun 2022 tidak dianggarkan.

**7. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LRA**

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – LRA merupakan proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan Bendahara dengan tujuan untuk mendapatkan penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan melanggar hukum/lalai yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LRA tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 namun tidak terealisasi dan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp6.500.000,00

**8. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA**

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA merupakan pendapatan atas keterlambatan penyelesaian paket pekerjaan fisik



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp107.102.591,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp103.190.501,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp3.912.090,00 atau sebesar 3,79% yang dikarenakan banyaknya pekerjaan fisik di Kabupaten Bangka Barat yang mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan.

**9. Pendapatan Denda Pajak Hotel-LRA**

Pendapatan Denda Pajak Hotel-LRA merupakan pendapatan atas keterlambatan pembayaran pajak hotel. Pendapatan Denda Pajak Hotel tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 namun tidak terealisasi sedangkan di tahun 2021 terealisasi sebesar Rp205.476,00.

**10. Pendapatan Denda Pajak Restoran-LRA**

Pendapatan Denda Pajak Restoran-LRA merupakan pendapatan atas keterlambatan pembayaran pajak restoran. Pendapatan Denda Pajak Restoran tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.053.967,00 sedangkan di tahun 2021 terealisasi sebesar Rp7.045.472,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp2.991.505,00 atau sebesar 42,46%. Kenaikan ini disebabkan banyak wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak restoran.

**11. Pendapatan Denda Pajak Reklame-LRA**

Pendapatan Denda Pajak Reklame-LRA merupakan pendapatan atas keterlambatan pembayaran pajak reklame. Pendapatan Denda Pajak Reklame tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp870.715,00 sedangkan di tahun 2021 terealisasi sebesar Rp3.012.155,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp2.141.440,00 atau sebesar 71,09%. Penurunan ini disebabkan oleh banyak wajib pajak yang membayar pajak reklame tepat waktu.

**12. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LRA**

Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LRA merupakan pendapatan atas keterlambatan pembayaran pajak air tanah. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.097.280,00 sedangkan di tahun 2021 terealisasi sebesar Rp2.845.256,60 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp1.747.976,60 atau sebesar 61,43%. Penurunan ini disebabkan oleh banyak wajib pajak yang membayar pajak air tanah tepat waktu.

**13. Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LRA**

Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LRA merupakan pendapatan atas keterlambatan pembayaran pajak sarang burung walet. Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet tahun 2022 dianggarkan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Rp500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp419.700,00 sedangkan di tahun 2021 terealisasi sebesar Rp306.752,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp112.948,00 atau sebesar 36,82%. Kenaikan ini disebabkan oleh banyak wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak sarang burung walet.

**14. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA**

Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA merupakan pendapatan atas keterlambatan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp505.000.000,00 namun tidak terealisasi sedangkan di tahun 2021 terealisasi sebesar Rp14.000,00.

**15. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LRA**

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LRA merupakan pendapatan atas kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan tahun sebelumnya. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp18.368.067,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp15.412.006,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp2.956.061,00 atau sebesar 19,18%. Kenaikan ini disebabkan terdapat banyak kesalahan dari Bendahara Pengeluaran dalam menghitung pembayaran gaji ASN di Kabupaten Bangka Barat.

**16. Pendapatan BLUD-LRA**

Pendapatan BLUD -LRA merupakan Pendapatan yang bersumber dari Jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD dan Lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Pendapatan BLUD tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp38.300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp46.049.796.057,59 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp17.535.361.743,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar 28.514.434.314,59 atau sebesar 162,61%. Kenaikan ini dikarenakan sebagian besar masyarakat telah memiliki jaminan kesehatan dengan menggunakan fasilitas UHC (Universal Health Covered) sehingga berdampak pada penerimaan pendapatan BLUD.

**17. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LRA**

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LRA merupakan pendapatan daerah yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan, pendapatan atas pengembalian belanja tahun sebelumnya, pendapatan atas pengembalian kekurangan volume dan pendapatan yang tidak diklasifikasikan pada jenis pendapatan sebagaimana telah disebutkan di atas. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp992.901.854,15 dan pada tahun 2021 terealisasi sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Rp3.949.455.312,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp2.956.553.457,85 atau sebesar 74,85%.

**18. Pendapatan Jasa Giro pada Kas di Bendahara – LRA**

Pendapatan Jasa Giro pada Kas di Bendahara – LRA merupakan pendapatan atas Giro yang terdapat pada Rekening Kas Bendahara. Tahun 2022 Pendapatan Jasa Giro Pada Kas di Bendahara dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00 namun tidak terealisasi.

**19. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP**

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP – LRA merupakan pendapatan yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam hal ini Puskesmas-puskesmas untuk pelayanan kesehatan. Tahun 2022 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tidak dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, namun dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan yang Sah.

**1.1.2 Pendapatan Transfer-LRA**

Pendapatan Transfer-LRA adalah Pendapatan Transfer yang berasal dari entitas lain, seperti Pemerintah Pusat atau daerah otonom lain.

**1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA**

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA merupakan penerimaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/penurunan (Rp)	%
<b>1.1.2.1.1</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>					
1.1.2.1.1.1	Pajak Bumi dan Bangunan	16.778.624.000,00	28.792.822.906,00	31.191.990.947,00	(2.399.168.041,00)	7,69
1.1.2.1.1.2	Pajak Penghasilan Orang Pribadi/PPH 21 s.d. 29	5.771.765.000,00	5.771.765.000	6.983.815.400,00	(1.212.050.400,00)	17,36
1.1.2.1.1.3	Cukai Hasil Tembakau	0,00	0,00	535,00	(535,00)	100,00
	<i>Sub total</i>	<b>22.550.389.000,00</b>	<b>34.564.587.906,00</b>	<b>38.175.806.882,00</b>	<b>(3.611.218.976,00)</b>	<b>9,46</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/penurunan (Rp)	%
<b>1.1.2.1.2</b>	<b>Bagi Hasil Sumber Daya Alam</b>					
1.1.2.1.2.1	Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan	17.773.000,00	17.773.000,00	36.120.511,00	(18.347.511,00)	50,80
1.1.2.1.2.2	Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	1.357.619.150,00	600.691.850,00	44,25
1.1.2.1.2.3	Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi	0,00	1.102.700.018,00	612.736.103,00	489.963.915,00	79,96
1.1.2.1.2.4	Bagi Hasil Pertambangan Umum	0,00	0,00	58.536.872.461,00	(58.536.872.461,00)	100,00
1.1.2.1.2.5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	624.513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	102.182.154.732,00	173.024.496.321,00	0,00	173.024.496.321,00	100,00
	<b>Sub Total</b>	<b>104.782.751.732,00</b>	<b>176.103.280.339,00</b>	<b>60.543.348.225,00</b>	<b>115.559.932.114,00</b>	<b>190,87</b>
<b>1.1.2.1.3</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>420.296.596.000,00</b>	<b>419.082.296.005,00</b>	<b>419.681.643.719,00</b>	<b>(599.347.714,00)</b>	<b>0,14</b>
<b>1.1.2.1.4</b>	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>133.102.494.000,00</b>	<b>120.254.507.194,00</b>	<b>128.720.362.350,00</b>	<b>(8.465.855.156,00)</b>	<b>6,58</b>
	<b>Total</b>	<b>680.732.230.732,00</b>	<b>750.004.671.444,00</b>	<b>647.121.161.176,00</b>	<b>102.883.510.268,00</b>	<b>15,90</b>

Tahun 2022 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LRA Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp680.732.230.732,00 dan terealisasi sebesar Rp750.004.671.444,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp647.121.161.176,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp102.883.510.268,00 atau sebesar 15,90%. Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

### 1. Dana Bagi Hasil Pajak

Transfer Pemerintah Pusat pada pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang berupa bagi hasil dari PBB, Pajak Penghasilan Pasal 21, PPh pasal 25/29, dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Pada Tahun 2022 Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp22.550.389.000,00 dan terealisasi sebesar Rp34.564.587.906,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp38.175.806.882,00, sehingga terdapat penurunan sebesar Rp3.611.218.976,00 atau sebesar 9,46%.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam**

Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA Kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi dan Pertambangan umum. Pada Tahun 2022 pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber daya alam Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp104.782.751.732,00 dan terealisasi sebesar Rp176.103.280.339,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp60.543.348.225,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp115.559.932.114,00 atau sebesar 190,87%. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**3. Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaandesentralisasi. Pada Tahun 2022 Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp420.296.596.000,00 dan terealisasi sebesar Rp419.082.296.005,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp419.681.643.719,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp599.347.714,00 atau sebesar 0,14%.

**4. Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada Tahun 2022 Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp133.102.494.000,00 dan terealisasi sebesar Rp120.254.507.194,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp128.720.362.350,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp8.465.855.156,00 atau sebesar 6,57%. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya alokasi Transfer Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Pada tahun 2022 terdapat Dana Transfer Khusus (DAK) yang tidak memenuhi target dan melebihi target pendapatan, hal ini dikarenakan tidak dilakukan penyesuaian target pendapatan pada APBD perubahan.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) per jenis adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</b>			
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	573.574.000,00	571.502.000,00	99,64
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	8.987.486.000,00	8.742.966.500,00	97,28



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.664.607.000,00	2.519.646.200,00	94,56
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	507.691.000,00	501.544.200,00	98,79
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.441.674.000,00	3.181.746.910,00	92,45
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AK	7.825.637.000,00	6.055.504.352,00	77,38
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.826.865.000,00	1.568.694.474,00	85,87
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	258.308.000,00	254.471.875,00	98,51
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	5.114.940.000,00	4.897.014.855,00	95,74
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.146.611.000,00	7.090.749.080,00	99,22
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	3.750.000.000,00	3.561.000.000,00	94,96
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	1.822.763.000,00	1.465.021.114,00	80,37
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	630.000.000,00	630.000.000,00	100,00
<b>Total DAK Fisik</b>	<b>44.550.156.000,00</b>	<b>41.039.861.560,00</b>	<b>92,12</b>
<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>			
DAK Non Fisik-BOS Reguler	33.658.860.000,00	29.260.548.052,00	86,93
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.245.000.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	34.477.169.000,00	34.477.169.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.077.000.000,00	933.575.000,00	86,68
DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.770.560.000,00	3.763.209.000,00	99,81
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	623.700.000,00	623.700.000,00	100,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8.529.089.000,00	6.238.198.607,00	73,14
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	223.536.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.296.993.000,00	2.043.825.675,00	88,98
DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000,00	356.419.600,00	88,18
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	625.260.000,00	465.563.800,00	74,46
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	369.695.000,00	224.858.000,00	60,82
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	601.800.000,00	601.800.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	242.600.000,00	225.778.900,00	93,07
<b>Total DAK Non Fisik</b>	<b>88.552.338.000,00</b>	<b>79.214.645.634,00</b>	<b>89,46</b>
<b>Total DAK</b>	<b>133.102.494.000,00</b>	<b>120.254.507.194,00</b>	<b>90,35</b>

### 1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA merupakan penerimaan Dana Penyesuaian berupa Dana Desa dan Dana Insentif Daerah. Pada tahun 2022 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp 58.720.679.000,00 dan terealisasi sebesar Rp58.720.679.000,00 atau sebesar 100,00% sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp91.154.924.000,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp32.434.245.000,00. Penurunan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA dikarenakan menurunnya alokasi transfer Dana Desa dan Dana Insentif Daerah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.1.2.2.1.2	Dana Penyesuaian					
1.1.2.2.1.2.1	Dana Desa	52.346.309.000,00	52.346.309.000,00	61.297.214.000,00	(8.950.905.000,00)	14,60
1.1.2.2.1.2.2	Dana Insentif Daerah	6.374.370.000,00	6.374.370.000,00	29.857.710.000,00	(23.483.340.000,00)	78,65
<b>Total</b>		<b>58.720.679.000,00</b>	<b>58.720.679.000,00</b>	<b>91.154.924.000,00</b>	<b>(32.434.245.000,00)</b>	<b>35,58</b>

### 1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi-LRA

Transfer Pemerintah Provinsi-LRA merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya yang diterima pemerintah kabupaten dari pemerintah provinsi. Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp71.822.892.934,96 dan terealisasi sebesar Rp59.534.278.715,00 atau sebesar 82,89%.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Rincian realisasi Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

No	Uraian	Periode	Jumlah (Rp)	Nomor Surat Keputusan	Tanggal Surat Keputusan
<b>A</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor</b>				
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Triwulan IV 2021	Rp1.863.271.738,00	188.4/29/BAKUDA/2022	01 Maret 2022
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Triwulan I	Rp1.892.350.397,00	188.4/39/BAKUDA/2022	14 Juni 2022
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Triwulan II	Rp1.892.432.929,00	188.4/46/BAKUDA/2022	11 Agustus 2022
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Triwulan III	Rp1.892.432.929,00	188.4/61/BAKUDA/2022	21 November 2022
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Over Target	Rp1.482.361.992,00	188.4/66/BAKUDA/2022	30 November 2022
	<b>Sub Total</b>		<b>Rp9.022.849.985,00</b>		
<b>B</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</b>				
1	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Triwulan IV 2021	Rp842.634.992,00	188.4/29/BAKUDA/2022	01 Maret 2022
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Triwulan I	Rp1.279.020.435,00	188.4/39/BAKUDA/2022	14 Juni 2022
3	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Triwulan II	Rp1.279.020.435,00	188.4/46/BAKUDA/2022	11 Agustus 2022
4	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Triwulan III	Rp1.279.020.435,00	188.4/61/BAKUDA/2022	21 November 2022
5	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Over Target	Rp4.568.008.052,00	188.4/66/BAKUDA/2022	30 November 2022
	<b>Sub Total</b>		<b>Rp9.247.704.349,00</b>		
<b>C</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</b>				
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Triwulan IV 2021	Rp5.297.551.903,00	188.4/28/BAKUDA/2022	14 Maret 2022
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Triwulan I	Rp5.466.207.426,00	188.4/40/BAKUDA/2022	14 Juni 2022
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Triwulan II	Rp5.436.758.753,00	188.4/47/BAKUDA/2022	11 Agustus 2022
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Triwulan III	Rp5.365.494.470,00	188.4/62/BAKUDA/2022	21 November 2022
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Over Target	Rp3.194.868.585,00	188.4/66/BAKUDA/2022	30 November 2022
	<b>Sub Total</b>		<b>Rp24.760.881.137,00</b>		



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	Uraian	Periode	Jumlah (Rp)	Nomor Surat Keputusan	Tanggal Surat Keputusan
<b>D</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan</b>				
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Triwulan IV 2021	Rp109.499.141,00	188.4/29/BAKUDA/2022	01 Maret 2022
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Triwulan I	Rp111.778.223,00	188.4/39/BAKUDA/2022	14 Juni 2022
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Triwulan II	Rp111.851.769,00	188.4/46/BAKUDA/2022	11 Agustus 2022
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Triwulan III	Rp112.707.907,00	188.4/61/BAKUDA/2022	21 November 2022
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	Over Target	Rp 81.134.090,00	188.4/66/BAKUDA/2022	30 November 2022
	<b>Sub Total</b>		<b>Rp526.971.130,00</b>		
<b>E</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok</b>				
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Triwulan IV tahun 2021	Rp1.732.605.886,00	188.4/09/BAKUDA/2022	17 Januari 2022
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Desember 2021	Rp1.426.676.529,00	188.4/34.a/BAKUDA/2022	09 Mei 2022
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Triwulan I	Rp2.913.786.470,00	188.4/34.a/BAKUDA/2022	09 Mei 2022
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Triwulan II	Rp3.252.094.382,00	188.4/43/BAKUDA/2022	24 Juli 2022
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Triwulan III	Rp1.683.908.847,00	188.4/55/BAKUDA/2022	31 Oktober 2022
	<b>Sub Total</b>		<b>Rp11.009.072.114,00</b>		
	<b>Total</b>		<b>Rp54.567.478.715,00</b>		

Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya berupa Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)	Nomor Surat Keputusan Gubernur
Dana Bantuan Bidang Pendidikan	4.966.800.000,00	Nomor 188.44/974/BAKUDA/2021 tanggal 8 November 2021 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 188.44/655/BAKUDA/2021 tentang Pemberian Bantuan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021.
<b>Total</b>	<b>4.966.800.000,00</b>	



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA**

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Lainnya berupa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA tahun 2022 Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp15.114.466.810,00 dan terealisasi sebesar Rp9.116.562.372,00 atau sebesar 60,32%.

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.1.3.1	Pendapatan Hibah	5.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.3.2	Pendapatan Lainnya	10.114.466.810,00	9.116.562.372,00	90,13
<b>Total</b>		<b>15.114.466.810,00</b>	<b>9.116.562.372,00</b>	<b>60,32</b>

**1.2 Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun berjalan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Pada Tahun 2022 Belanja-LRAPemerintah Daerah Kabupaten Bangka dianggarkan sebesar Rp831.229.740.508,00 dan terealisasi sebesar Rp758.886.587.598,69 atau sebesar 91,30%. Rincian Anggaran dan Realisasi belanja per Organisasi Perangkat Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	266.846.441.506,00	253.211.461.737,00	94,89
Dinas Kesehatan	211.681.434.774,00	197.951.444.013,64	93,51
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80.246.314.200,00	60.220.454.346,12	75,04
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	11.589.182.365,00	10.697.328.335,00	92,30
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.482.557.160,00	9.214.287.898,00	97,17
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.502.718.164,00	4.151.330.683,00	92,20
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	15.904.900.100,00	15.317.944.713,00	96,31
Dinas Pertanian dan Pangan	15.945.942.994,00	15.099.273.995,00	94,69
Dinas Lingkungan Hidup	14.611.547.785,00	14.019.722.824,00	95,95
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.679.410.363,00	5.293.514.525,00	93,21
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.148.967.081,00	6.730.243.714,00	82,59
Dinas Komunikasi dan Informatika	7.543.597.580,00	7.223.987.390,00	95,76



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	6.291.424.882,00	5.740.189.180,00	91,24
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.438.551.550,00	4.957.376.607,00	91,15
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.324.511.429,00	7.824.971.039,00	94,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.439.782.260,00	5.211.183.466,00	95,80
Dinas Kelautan dan Perikanan	3.198.063.400,00	2.767.003.881,00	86,52
Sekretariat Daerah	34.363.878.959,00	31.835.500.846,00	92,64
Sekretariat DPRD	43.890.504.088,00	36.537.011.595,40	83,25
Kecamatan Muntok	10.961.985.149,00	9.866.009.983,00	90,00
Kecamatan Simpang Teritip	2.658.722.600,00	2.505.234.383,00	94,23
Kecamatan Jebus	4.001.636.300,00	3.748.698.112,00	93,68
Kecamatan Kelapa	5.762.903.750,00	5.107.899.417,53	88,63
Kecamatan Tempilang	3.111.941.295,00	2.936.432.273,00	94,36
Kecamatan Parittiga	3.288.997.300,00	3.143.509.973,00	95,58
Inspektorat Kabupaten	6.723.850.450,00	6.269.573.482,00	93,24
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	6.471.280.542,00	5.867.837.125,00	90,68
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.671.428.757,00	7.393.487.803,00	85,26
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	8.364.787.800,00	7.107.303.341,00	84,97
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.061.283.165,00	6.159.124.858,00	87,22
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.021.192.760,00	4.777.246.060,00	95,14
<b>Total</b>	<b>831.229.740.508,00</b>	<b>758.886.587.598,69</b>	<b>91,30</b>

### 1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
1.2.1.1	Belanja Pegawai	354.687.250.354,00	340.559.407.327,00	331.320.839.429,00	9.238.567.898,00	2,79
1.2.1.2	Belanja Barang	343.034.888.018,00	315.990.239.015,36	296.081.262.711,92	19.908.976.303,44	6,72
1.2.1.3	Hibah	19.161.550.667,00	15.154.171.375,00	12.966.036.565,00	2.188.134.810,00	16,88
1.2.1.4	Bantuan Sosial	8.260.640.392,00	8.003.955.521,00	2.381.477.274,00	5.622.478.247,00	236,09
<b>Total</b>		<b>725.144.329.431,00</b>	<b>679.707.773.238,36</b>	<b>642.749.615.979,92</b>	<b>36.958.157.258,44</b>	<b>5,75</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Tahun 2022 Belanja Operasi Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp725.144.329.431,00 dan terealisasi sebesar Rp679.707.773.238,36, sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp642.749.615.979,92 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp36.958.157.258,44 atau sebesar 5,75%. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya realisasi dari Belanja Barang.

#### 1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dan Belanja Honorarium. Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp354.687.250.354,00 dan terealisasi sebesar Rp340.559.407.327,00 atau sebesar 96,02% sedangkan di tahun 2021 terealisasi sebesar Rp331.320.839.429,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp9.238.567.898,00 atau sebesar 2,79%.

Rincian Objek anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji Pokok ASN	138.334.983.002,00	134.994.233.289,00	97,59
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	13.853.428.855,00	13.089.035.055,00	94,48
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.066.784.910,00	4.798.243.200,00	94,70
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.700.913.557,00	9.212.957.554,00	94,97
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.157.764.800,00	1.907.281.900,00	88,39
Belanja Tunjangan Beras ASN	8.567.092.388,00	8.311.643.400,00	97,02
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	331.018.398,00	146.415.688,00	44,23
Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.826.304,00	2.104.716,00	55,01
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.700.131.363,00	9.181.635.489,00	94,65
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	361.837.520,00	300.091.340,00	82,94
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.062.875.108,00	832.211.519,00	78,30
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	32.656.322.667,00	31.861.133.421,00	97,56
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	20.581.395.167,00	20.162.508.408,00	97,96
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	6.503.611.000,00	6.459.085.500,00	99,32
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	49.173.828.000,00	48.093.164.513,00	97,80
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	775.907.700,00	441.363.181,00	56,88
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	169.841.520,00	64.054.170,00	37,71
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	35.031.769.200,00	31.882.509.670,00	91,01
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.070.325.000,00	899.287.500,00	84,02
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	725.596.500,00	672.640.475,00	92,70



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Uang Representasi DPRD	589.617.000,00	561.540.000,00	95,24
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	59.641.000,00	56.800.800,00	95,24
Belanja Tunjangan Beras DPRD	74.140.000,00	65.178.000,00	87,91
Belanja Uang Paket DPRD	54.751.000,00	48.132.000,00	87,91
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	854.945.000,00	814.233.000,00	95,24
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	91.785.000,00	86.051.700,00	93,75
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	122.585.000,00	11.921.175,00	9,72
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.984.500.000,00	1.890.000.000,00	95,24
Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	447.300.000,00	56,80
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	166.000,00	145.548,00	87,68
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	70.000,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.274.134.000,00	3.113.741.988,00	95,10
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.586.652.000,00	4.368.240.000,00	95,24
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	40.005.000,00	0,00	0,00
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	65.500.000,00	54.600.000,00	83,36
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.800.000,00	2.940.000,00	30,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.000.000,00	98.280.000,00	99,27
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.500.000,00	2.607.120,00	24,83
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.000.000,00	1.101.174,00	22,02
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	200.000,00	1.680,00	0,84
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	129.266.400,00	21.783.900,00	16,85
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	2.000.000,00	112.320,00	5,62
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	2.000.000,00	336.960,00	16,85
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	221.890.515,00	122.338.274,00	55,13
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	63.460.480,00	19.484.210,00	30,70
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	129.509.000,00	110.880.000,00	85,62
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	399.960.000,00	99,99
Belanja Pegawai BOS	5.199.380.000,00	4.950.097.490,00	95,21
<b>Total</b>	<b>354.687.250.354,00</b>	<b>340.559.407.327,00</b>	<b>96,02</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Rincian Belanja Pegawai tahun 2022 per OPD adalah sebagai berikut :

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	169.003.531.739,00	162.621.908.402,00	96,22
Dinas Kesehatan	74.754.596.500,00	73.251.884.139,00	97,99
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.855.000.000,00	3.793.033.294,00	98,39
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	3.159.916.000,00	2.948.105.099,00	93,30
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.480.000.000,00	3.361.994.597,00	96,61
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.030.000.000,00	1.969.049.635,00	97,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	2.841.271.000,00	2.754.967.174,00	96,96
Dinas Pertanian dan Pangan	10.830.000.000,00	10.447.766.831,00	96,47
Dinas Lingkungan Hidup	2.819.400.000,00	2.731.810.519,00	96,89
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.340.000.000,00	2.249.693.037,00	96,14
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.445.000.000,00	2.315.938.376,00	94,72
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.460.000.000,00	2.378.868.052,00	96,70
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.827.266.400,00	2.568.925.024,00	90,86
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.261.490.000,00	3.147.885.033,00	96,52
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.100.000.000,00	3.011.643.876,00	97,15
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.530.000.000,00	2.419.814.429,00	95,64



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.799.600.000,00	1.636.835.920,00	90,96
Sekretariat Daerah	9.971.000.000,00	9.536.931.177,00	95,65
Sekretariat DPRD	15.050.000.000,00	13.761.263.972,00	91,44
Kecamatan Muntok	4.120.000.000,00	3.991.903.427,00	96,89
Kecamatan Simpang Teritip	1.800.000.000,00	1.667.258.783,00	92,63
Kecamatan Jebus	2.699.760.000,00	2.550.314.912,00	94,46
Kecamatan Kelapa	3.320.000.000,00	2.715.301.347,00	81,79
Kecamatan Tempilang	2.150.000.000,00	2.043.635.198,00	95,05
Kecamatan Parittiga	1.949.800.000,00	1.883.263.971,00	96,59
Inspektorat Kabupaten	3.900.000.000,00	3.685.901.423,00	94,51
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	3.265.000.000,00	3.113.588.726,00	95,36
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.380.000.000,00	3.251.881.612,00	96,21
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	4.539.618.715,00	3.943.823.541,00	86,88
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.185.000.000,00	3.054.449.822,00	95,90
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.820.000.000,00	1.749.765.979,00	96,14
<b>Total</b>	<b>354.687.250.354,00</b>	<b>340.559.407.327,00</b>	<b>96,02</b>

#### 1.2.1.2 Belanja Barang

Akun Belanja Barang merupakan belanja operasional yang terdiri dari belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp343.034.888.018,00 dan terealisasi sebesar Rp315.990.239.015,36 atau sebesar 92,12%.

Rincian Belanja Barang per Objek Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Pakai Habis	39.927.410.335,00	34.939.800.819,00	87,51
Belanja Barang Tak Habis Pakai	110.350.000,00	109.250.000,00	99,00
Belanja Jasa Kantor	138.733.663.748,00	130.430.395.730,00	94,01
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	33.085.023.800,00	32.819.250.756,00	99,20



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Sewa Tanah	43.109.000,00	42.909.000,00	99,54
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.134.895.250,00	694.946.800,00	61,23
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.009.481.605,00	779.815.160,00	77,25
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.891.003.600,00	2.655.354.680,00	91,85
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	99.000.000,00	98.773.350,00	99,77
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	12.000.000,00	7.000.000,00	58,33
Belanja Honorarium	66.507.500,00	45.707.500,00	68,73
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.504.365.000,00	1.148.161.900,00	76,32
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	510.381.285,00	308.141.345,00	60,37
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	30.034.000,00	19.846.120,00	66,08
Belanja Pemeliharaan Tanah	97.770.000,00	70.127.500,00	71,73
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.401.846.780,00	2.041.616.102,00	85,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.122.524.086,00	1.924.044.709,00	90,65
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.679.369.606,00	6.430.064.226,00	96,27
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.450.000,00	4.450.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.416.331.484,00	32.623.931.733,00	82,77
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.761.271.644,00	13.237.189.279,00	96,19
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.903.465.234,00	8.656.754.746,00	87,41
Belanja Barang dan Jasa BOS	19.772.464.061,00	18.130.508.789,00	91,70
Belanja Barang dan Jasa BLUD	29.715.670.000,00	28.769.698.771,36	96,82
<b>Total</b>	<b>343.034.888.018,00</b>	<b>315.990.239.015,36</b>	<b>92,12</b>

### 1.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja hibah merupakan belanja berupa uang yang diberikan kepada penerima hibah, baik individu, kelompok masyarakat maupun instansi pemerintah. Anggaran Belanja Hibah tahun 2022 sebesar Rp19.161.550.667,00 dan terealisasi sebesar Rp15.154.171.375,00 atau 79,09%.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Rincian Belanja Hibah per Objek Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.043.800.000,00	6.186.836.875,00	76,91
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	455.000.000,00	455.000.000,00	100,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.265.662.667,00	7.067.549.500,00	97,27
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	16.313.000,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.000.390.000,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	935.600.000,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.444.785.000,00	1.444.785.000,00	100,00
<b>Total</b>	<b>19.161.550.667,00</b>	<b>15.154.171.375,00</b>	<b>79,09</b>

#### 1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial merupakan belanja bantuan berupa uang dan/atau barang yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat maupun perorangan baik bantuan sosial yang tidak terencana maupun bantuan sosial terencana. Tahun 2022, Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp8.260.640.392,00 dan terealisasi sebesar Rp8.003.955.521,00 atau 96,89%.

Rincian Belanja Bantuan Sosial per Objek tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.557.100.000,00	2.509.300.000,00	98,13
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	2.329.940.392,00	2.182.898.521,00	93,69
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	3.146.850.000,00	3.124.800.000,00	99,30
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	66.750.000,00	26.957.000,00	40,39



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
<b>Total</b>	<b>8.260.640.392,00</b>	<b>8.003.955.521,00</b>	<b>96,89</b>

Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga tahun 2022 terealisasi sebesar 40,39%, hal ini dikarenakan Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga dialokasikan untuk Posko bencana alam.

### 1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja investasi atau belanja yang menambah aset pemerintah daerah. Tahun 2022, anggaran Belanja Modal adalah sebesar Rp 105.401.098.002,00 dan terealisasi sebesar Rp79.178.814.360,33 atau 75,12%.

Rincian Belanja Modal per Objek tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Jenis Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.2.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	33.503.134.672,00	30.522.088.004,00	91,10
1.2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	44.990.309.999,00	23.708.809.580,03	52,70
1.2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	25.252.420.250,00	23.794.316.695,30	94,23
1.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.655.233.081,00	1.153.600.081,00	69,69
<b>Total</b>		<b>105.401.098.002,00</b>	<b>79.178.814.360,33</b>	<b>75,12</b>

Uraian Belanja Modal Tahun 2022 per OPD adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	19.387.418.939,00	19.218.992.626,00	99,13
Dinas Kesehatan	24.514.916.119,00	18.043.331.536,28	73,60
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49.715.063.350,00	31.575.139.827,12	63,51



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	891.226.900,00	883.700.394,00	99,16
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	11.000.050,00	11.000.000,00	100,00
Dinas Pertanian dan Pangan	400.000.000,00	198.728.000,00	49,68
Dinas Lingkungan Hidup	2.138.000.000,00	2.031.905.000,00	95,04
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	401.222.091,00	332.594.000,00	82,90
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	97.858.000,00	94.450.000,00	96,52
Dinas Komunikasi dan Informatika	206.110.000,00	192.950.000,00	93,62
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.000.000,00	1.935.597,00	96,78
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	205.500.000,00	204.483.000,00	99,51
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	681.713.553,00	668.061.753,00	98,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	2.150.746.400,00	1.183.174.000,00	55,01
Sekretariat DPRD	4.219.322.600,00	4.164.514.028,40	98,70
Kecamatan Muntok	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Kecamatan Simpang Teritip	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jebus	1.500.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Kelapa	115.500.000,00	114.876.098,53	99,46
Kecamatan Tempilang	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Parittiga	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Kabupaten	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	240.000.000,00	236.978.500,00	98,74
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>105.401.098.002,00</b>	<b>79.178.814.360,33</b>	<b>75,12</b>

Uraian realisasi jenis belanja modal tahun 2022 per OPD adalah sebagai berikut :

Uraian	Belanja Modal Tanah (Rp)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Rp)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Rp)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	8.919.224.069,00	9.101.879.476,00	99.554.000,00	1.098.335.081,00
Dinas Kesehatan	0,00	15.743.614.172,00	2.299.717.364,28	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	2.400.000,00	9.232.261.221,35	22.340.478.605,77	0,00
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	0,00	34.965.000,00	0,00	848.735.394,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Uraian	Belanja Modal Tanah (Rp)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Rp)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Rp)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Rp)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	0,00	11.000.000,00		0,00	0,00
Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	198.728.000,00	
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	2.031.905.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	332.594.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	94.450.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	192.950.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	1.935.597,00	0,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	15.450.000,00	0,00	189.033.000,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	668.061.753,00	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Uraian	Belanja Modal Tanah (Rp)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Rp)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Rp)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (Rp)
Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	793.890.000,00	389.284.000,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	1.382.630.510,00	2.685.667.518,40	40.951.000,00	55.265.000,00
Kecamatan Muntok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Simpang Teritip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jebus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kelapa	0,00	39.975.000,00		74.901.098,53	
Kecamatan Tempilang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Parittiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	236.978.500,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>30.522.088.004,00</b>	<b>23.708.809.580,03</b>	<b>23.794.316.695,30</b>	<b>1.153.600.081,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

### 1.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga dialokasikan dalam APBD dalam upaya penanganan atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial maupun kejadian yang tidak diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah. Belanja Tak Terduga dianggarkan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Belanja Tak Terduga Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 684.313.075,00 namun tidak terealisasi. Hal tersebut disebabkan tidak ada kejadian tidak terduga akibat dari bencana alam, bencana sosial maupun kejadian yang tidak diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah.

Anggaran dan realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Tak Terduga	684.313.075,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>684.313.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 1.3 Transfer

### 1.3.1 Bagi Hasil ke Desa

Bagi Hasil ke Desa merupakan belanja bagi hasil pajak dan belanja bagi hasil retribusi yang dihitung berdasarkan penerimaan pajak/retribusi di desa. Bagi Hasil ke Desa direalisasikan berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Bangka Barat tahun Anggaran 2022. Tahun 2022 Bagi Hasil ke Desa Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dianggarkan sebesar Rp4.033.725.515,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.033.725.515,00 atau 100,00%.

Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil ke Desa tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Jenis Bagi Hasil	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.3.1.1	Bagi Hasil Pajak	3.016.359.000,00	3.016.359.000,00	100,00
1.3.1.2	Bagi Hasil Retribusi	1.017.366.515,00	1.017.366.515,00	100,00
<b>Total</b>		<b>4.033.725.515,00</b>	<b>4.033.725.515,00</b>	<b>100,00</b>

Rincian Realisasi Bagi Hasil ke Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Desa	Kecamatan	Bagi Hasil Pajak Daerah (Rp)	Bagi Hasil Retribusi Daerah (Rp)
1	Air Putih	Muntok	77.072.107,00	18.101.958,00
2	Air Belo	Muntok	83.504.138,00	19.279.644,00
3	Belo Laut	Muntok	145.712.282,00	25.918.692,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	Desa	Kecamatan	Bagi Hasil Pajak Daerah (Rp)	Bagi Hasil Retribusi Daerah (Rp)
4	Air Limau	Muntok	50.893.147,00	15.295.410,00
5	Pelangas	Simpang Teritip	64.060.567,00	16.755.160,00
6	Kundi	Simpang Teritip	45.389.515,00	16.431.449,00
7	Mayang	Simpang Teritip	50.259.987,00	16.115.941,00
8	Peradong	Simpang Teritip	40.219.164,00	15.741.749,00
9	Air Nyatoh	Simpang Teritip	34.944.835,00	16.413.360,00
10	Berang	Simpang Teritip	41.695.005,00	19.565.494,00
11	Rambat	Simpang Teritip	37.873.331,00	26.237.434,00
12	Simpang Gong	Simpang Teritip	35.800.586,00	16.144.547,00
13	Simpang Tiga	Simpang Teritip	40.108.809,00	15.198.654,00
14	Ibul	Simpang Teritip	58.390.821,00	18.029.601,00
15	Pangek	Simpang Teritip	52.409.745,00	16.658.825,00
16	Bukit Terak	Simpang Teritip	35.077.037,00	15.935.471,00
17	Air Menduyung	Simpang Teritip	38.969.258,00	15.527.624,00
18	Jebus	Jebus	82.821.125,00	17.435.816,00
19	Sungaibuluh	Jebus	42.214.061,00	16.530.308,00
20	Tumbak Petar	Jebus	42.204.624,00	16.831.303,00
21	Limbung	Jebus	33.778.922,00	14.849.492,00
22	Rukam	Jebus	38.811.003,00	14.989.578,00
23	Ranggi Asam	Jebus	49.428.781,00	15.145.018,00
24	Ketap	Jebus	37.798.091,00	15.191.934,00
25	Mislak	Jebus	38.203.665,00	15.394.480,00
26	Pebuar	Jebus	35.371.311,00	15.321.913,00
27	Sinar Manik	Jebus	46.484.670,00	14.994.626,00
28	Air Kuang	Jebus	42.349.264,00	15.347.995,00
29	Mancung	Kelapa	33.955.941,00	15.594.722,00
30	Kayuarang	Kelapa	36.795.423,00	15.598.318,00
31	Pusuk	Kelapa	35.323.469,00	15.975.645,00
32	Dendang	Kelapa	59.255.870,00	18.517.797,00
33	Kacung	Kelapa	44.716.656,00	17.123.042,00
34	Sinar Sari	Kelapa	35.946.763,00	15.509.535,00
35	Beruas	Kelapa	35.827.167,00	15.642.890,00
36	Tebing	Kelapa	34.634.329,00	15.408.993,00
37	Terentang	Kelapa	33.705.189,00	19.150.285,00
38	Tuik	Kelapa	37.314.469,00	14.939.517,00
39	Tugang	Kelapa	35.751.701,00	14.951.507,00
40	Air Bulin	Kelapa	38.462.631,00	16.579.682,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	Desa	Kecamatan	Bagi Hasil Pajak Daerah (Rp)	Bagi Hasil Retribusi Daerah (Rp)
41	Pangkal Beras	Kelapa	34.928.615,00	15.802.326,00
42	Tempilang	Tempilang	77.885.577,00	21.839.675,00
43	Tanjung Niur	Tempilang	41.165.181,00	19.425.103,00
44	Sangku	Tempilang	45.731.629,00	15.757.734,00
45	Buyan Kelumbi	Tempilang	38.101.452,00	15.624.380,00
46	Penyampak	Tempilang	43.770.847,00	15.940.939,00
47	Benteng Kota	Tempilang	57.760.149,00	18.801.807,00
48	Air Lintang	Tempilang	66.683.330,00	17.789.368,00
49	Sinar Surya	Tempilang	41.606.930,00	15.957.977,00
50	Simpang Yul	Tempilang	36.940.788,00	15.983.638,00
51	Sekar Biru	Parittiga	81.847.898,00	21.258.509,00
52	Telak	Parittiga	40.073.053,00	15.633.845,00
53	Cupat	Parittiga	48.556.840,00	15.613.863,00
54	Bakit	Parittiga	49.252.338,00	16.273.905,00
55	Puput	Parittiga	218.012.860,00	19.106.325,00
56	Air Gantang	Parittiga	48.137.032,00	23.797.317,00
57	Kelabat	Parittiga	47.221.749,00	15.972.069,00
58	Kapit	Parittiga	35.979.852,00	15.177.200,00
59	Semulut	Parittiga	34.428.628,00	15.636.790,00
60	Teluk Limau	Parittiga	44.738.793,00	15.598.336,00
<b>Total</b>			<b>3.016.359.000,00</b>	<b>1.017.366.515,00</b>

### 1.3.2 Transfer ke Desa

Transfer Ke Desa merupakan Transfer Alokasi Dana Desa dan Dana Desa serta Insentif Badan Permusyawaratan Desa yang diberikan kepada Pemerintah Desa. Transfer Ke Desa tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp110.041.229.000,00 dan terealisasi sebesar Rp109.981.743.500,00 atau sebesar 99,95% yang diberikan kepada 60 (enam puluh) desa di Kabupaten Bangka Barat.

Transfer Ke Desa bertujuan untuk menunjang pembiayaan Program dan Kegiatan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan.

Rincian Transfer Ke Desa tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	108.050.789.000,00	107.991.303.500,00	99,94
Insentif Badan Permusyawaratan	1.990.440.000,00	1.990.440.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Desa			
<b>Total</b>	<b>110.041.229.000,00</b>	<b>109.981.743.500,00</b>	<b>99,95</b>

### 1.3.2.1 Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp108.050.789.000,00 dan terealisasi sebesar Rp107.991.303.500,00 yang diberikan kepada 60 (enam puluh) Desa pada 6 (enam) kecamatan di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Penyaluran Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 81 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Rincian realisasi Alokasi Dana Desa tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Desa	Kecamatan	Realisasi (Rp)
1	Air Putih	Muntok	979.971.188,00
2	Air Belo	Muntok	1.061.760.652,00
3	Belo Laut	Muntok	2.043.510.249,00
4	Air Limau	Muntok	926.787.411,00
5	Pelangas	Simpang Teritip	881.913.386,00
6	Kundi	Simpang Teritip	907.606.089,00
7	Mayang	Simpang Teritip	1.063.700.613,00
8	Peradong	Simpang Teritip	942.530.769,00
9	Air Nyatoh	Simpang Teritip	1.100.405.583,00
10	Berang	Simpang Teritip	1.265.102.383,00
11	Rambat	Simpang Teritip	762.615.858,00
12	Simpang Gong	Simpang Teritip	785.694.591,00
13	Simpang Tiga	Simpang Teritip	1.014.066.556,00
14	Ibul	Simpang Teritip	1.021.839.425,00
15	Pangek	Simpang Teritip	859.559.631,00
16	Bukit Terak	Simpang Teritip	781.585.977,00
17	Air Menduyung	Simpang Teritip	939.613.458,00
18	Jebus	Jebus	880.284.251,00
19	Sungai Buluh	Jebus	796.139.398,00
20	Tumbak Petar	Jebus	908.392.645,00
21	Limbung	Jebus	767.518.997,00
22	Rukam	Jebus	843.189.499,00
23	Ranggi Asam	Jebus	937.113.388,00
24	Ketap	Jebus	870.371.838,00
25	Mislak	Jebus	841.100.605,00
26	Pebuar	Jebus	731.487.927,00
27	Sinar Manik	Jebus	811.638.100,00
28	Air Kuang	Jebus	784.733.716,00
29	Mancung	Kelapa	802.307.770,00
30	Kayu Arang	Kelapa	855.611.561,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	Desa	Kecamatan	Realisasi (Rp)
31	Pusuk	Kelapa	828.132.070,00
32	Dendang	Kelapa	1.184.779.685,00
33	Kacung	Kelapa	921.363.943,00
34	Sinar Sari	Kelapa	779.348.959,00
35	Beruas	Kelapa	820.724.401,00
36	Tebing	Kelapa	778.590.323,00
37	Terentang	Kelapa	906.647.158,00
38	Tuik	Kelapa	721.069.763,00
39	Tugang	Kelapa	1.112.687.881,00
40	Air Bulin	Kelapa	853.883.004,00
41	Pangkal Beras	Kelapa	892.717.818,00
42	Tempilang	Tempilang	960.576.532,00
43	Tanjung Niur	Tempilang	1.074.573.253,00
44	Sangku	Tempilang	907.493.121,00
45	Buyan Kelumbi	Tempilang	861.032.761,00
46	Penyampak	Tempilang	915.319.355,00
47	Benteng Kota	Tempilang	923.299.886,00
48	Air Lintang	Tempilang	960.104.202,00
49	Sinar Surya	Tempilang	869.694.065,00
50	Simpang Yul	Tempilang	945.615.282,00
51	Sekar Biru	Parittiga	1.005.790.888,00
52	Telak	Parittiga	794.213.030,00
53	Cupat	Parittiga	1.055.260.923,00
54	Bakit	Parittiga	809.541.938,00
55	Puput	Parittiga	996.148.417,00
56	Air Gantang	Parittiga	1.054.083.639,00
57	Kelabat	Parittiga	939.203.326,00
58	Kapit	Parittiga	807.002.604,00
59	Semulut	Parittiga	862.866.187,00
60	Teluk Limau	Parittiga	994.562.072,00
<b>Total</b>			<b>55.704.480.000,00</b>

Penyaluran Dana Desa didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Rincian Dana Desa tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Desa	Kecamatan	Realisasi (Rp)
1	Air Putih	Muntok	1.175.498.000,00
2	Air Belo	Muntok	902.775.000,00
3	Belo Laut	Muntok	1.381.127.000,00
4	Air Limau	Muntok	940.414.000,00
5	Pelangas	Simpang Teritip	999.038.000,00
6	Kundi	Simpang Teritip	793.807.000,00
7	Mayang	Simpang Teritip	883.787.000,00
8	Peradong	Simpang Teritip	890.628.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	Desa	Kecamatan	Realisasi (Rp)
9	Air Nyatoh	Simpang Teritip	1.106.841.000,00
10	Berang	Simpang Teritip	1.128.234.000,00
11	Rambat	Simpang Teritip	751.434.000,00
12	Simpang Gong	Simpang Teritip	717.265.000,00
13	Simpang Tiga	Simpang Teritip	892.247.000,00
14	Ibul	Simpang Teritip	1.138.557.000,00
15	Pangek	Simpang Teritip	1.060.547.000,00
16	Bukit Terak	Simpang Teritip	953.335.000,00
17	Air Menduyung	Simpang Teritip	930.709.000,00
18	Jebus	Jebus	798.145.000,00
19	Sungai Buluh	Jebus	770.593.000,00
20	Tumbak Petar	Jebus	792.924.000,00
21	Limbung	Jebus	721.140.000,00
22	Rukam	Jebus	785.475.000,00
23	Ranggi Asam	Jebus	842.092.000,00
24	Ketap	Jebus	866.540.000,00
25	Mislak	Jebus	718.495.000,00
26	Pebuar	Jebus	713.231.000,00
27	Sinar Manik	Jebus	744.578.000,00
28	Air Kuang	Jebus	741.703.000,00
29	Mancung	Kelapa	729.467.000,00
30	Kayu Arang	Kelapa	783.578.000,00
31	Pusuk	Kelapa	800.104.000,00
32	Dendang	Kelapa	985.250.000,00
33	Kacung	Kelapa	798.788.000,00
34	Sinar Sari	Kelapa	741.661.000,00
35	Beruas	Kelapa	814.252.000,00
36	Tebing	Kelapa	698.103.000,00
37	Terentang	Kelapa	820.580.000,00
38	Tuik	Kelapa	982.201.000,00
39	Tugang	Kelapa	944.840.000,00
40	Air Bulin	Kelapa	799.519.000,00
41	Pangkal Beras	Kelapa	829.885.000,00
42	Tempilang	Tempilang	823.975.000,00
43	Tanjung Niur	Tempilang	1.041.948.000,00
44	Sangku	Tempilang	811.784.000,00
45	Buyan Kelumbi	Tempilang	837.281.000,00
46	Penyampak	Tempilang	800.164.000,00
47	Benteng Kota	Tempilang	846.805.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	Desa	Kecamatan	Realisasi (Rp)
48	Air Lintang	Tempilang	802.215.000,00
49	Sinar Surya	Tempilang	798.672.000,00
50	Simpang Yul	Tempilang	867.960.000,00
51	Sekar Biru	Parittiga	1.024.038.000,00
52	Telak	Parittiga	764.817.000,00
53	Cupat	Parittiga	889.735.000,00
54	Bakit	Parittiga	782.247.000,00
55	Puput	Parittiga	832.899.000,00
56	Air Gantang	Parittiga	948.212.000,00
57	Kelabat	Parittiga	1.142.842.000,00
58	Kapit	Parittiga	760.243.000,00
59	Semulut	Parittiga	777.479.000,00
60	Teluk Limau	Parittiga	923.606.000,00
<b>Total</b>			<b>52.346.309.000,00</b>

### 1.3.2.2 Insentif Badan Permusyawaratan Desa

Insentif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp2.043.792.000 dan terealisasi sebesar Rp1.937.088.000 atau sebesar 94,78%. Penyaluran Insentif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/102/DINSOSPMD/2022 Tanggal 14 April 2022 Tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa Untuk Dana Tambahan Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2022.

Insentif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Air Putih	Rp42.408.000	Rp42.408.000
2	Air Belo	Rp42.408.000	Rp34.200.000
3	Belo Laut	Rp34.200.000	Rp34.200.000
4	Air Limau	Rp34.200.000	Rp25.992.000
5	Pelangas	Rp34.200.000	Rp42.408.000
6	Kundi	Rp25.992.000	Rp25.992.000
7	Mayang	Rp34.200.000	Rp34.200.000
8	Peradong	Rp34.200.000	Rp25.992.000
9	Air Nyatoh	Rp34.200.000	Rp42.408.000
10	Berang	Rp25.992.000	Rp34.200.000
11	Rambat	Rp25.992.000	Rp25.992.000
12	Simpang Gong	Rp34.200.000	Rp25.992.000



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
13	Simpang Tiga	Rp21.888.000	Rp25.992.000
14	Ibul	Rp34.200.000	Rp25.992.000
15	Pangek	Rp25.992.000	Rp25.992.000
16	Bukit Terak	Rp34.200.000	Rp42.408.000
17	Air Menduyung	Rp34.200.000	Rp25.992.000
18	Jebus	Rp25.992.000	Rp25.992.000
19	Sungai Buluh	Rp34.200.000	Rp25.992.000
20	Tumbak Petar	Rp34.200.000	Rp25.992.000
21	Limbung	Rp34.200.000	Rp42.408.000
22	Rukam	Rp42.408.000	Rp34.200.000
23	Ranggi Asam	Rp25.992.000	Rp34.200.000
24	Ketap	Rp42.408.000	Rp42.408.000
25	Mislak	Rp34.200.000	Rp34.200.000
26	Pebuar	Rp42.408.000	Rp25.992.000
27	Sinar Manik	Rp42.408.000	Rp25.992.000
28	Air Kuang	Rp42.408.000	Rp42.408.000
29	Mancung	Rp34.200.000	Rp25.992.000
30	Kayu Arang	Rp34.200.000	Rp42.408.000
31	Pusuk	Rp42.408.000	Rp42.408.000
32	Dendang	Rp42.408.000	Rp34.200.000
33	Kacung	Rp34.200.000	Rp34.200.000
34	Sinar Sari	Rp34.200.000	Rp25.992.000
35	Beruas	Rp34.200.000	Rp42.408.000
36	Tebing	Rp25.992.000	Rp25.992.000
37	Terentang	Rp34.200.000	Rp34.200.000
38	Tuik	Rp34.200.000	Rp25.992.000
39	Tugang	Rp34.200.000	Rp42.408.000
40	Air Bulin	Rp25.992.000	Rp34.200.000
41	Pangkal Beras	Rp25.992.000	Rp25.992.000
42	Tempilang	Rp34.200.000	Rp25.992.000
43	Tanjung Niur	Rp21.888.000	Rp25.992.000
44	Sangku	Rp34.200.000	Rp25.992.000
45	Buyan Kelumbi	Rp25.992.000	Rp25.992.000
46	Penyampak	Rp34.200.000	Rp42.408.000
47	Benteng Kota	Rp34.200.000	Rp25.992.000
48	Air Lintang	Rp25.992.000	Rp25.992.000
49	Sinar Surya	Rp34.200.000	Rp25.992.000
50	Simpang Yul	Rp34.200.000	Rp25.992.000
51	Sekar Biru	Rp34.200.000	Rp42.408.000



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
52	Telak	Rp42.408.000	Rp34.200.000
53	Cupat	Rp25.992.000	Rp34.200.000
54	Bakit	Rp42.408.000	Rp42.408.000
55	Puput	Rp34.200.000	Rp34.200.000
56	Air Gantang	Rp42.408.000	Rp25.992.000
57	Kelabat	Rp42.408.000	Rp25.992.000
58	Kapit	Rp42.408.000	Rp42.408.000
59	Semulut	Rp34.200.000	Rp25.992.000
60	Teluk Limau	Rp34.200.000	Rp42.408.000
<b>Total</b>		<b>Rp2.043.792.000</b>	<b>Rp1.937.088.000</b>

### 1.3.3 Transfer Antar Daerah

Transfer Antar Daerah merupakan Transfer Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah Lainnya. Tahun 2022 Transfer Antar Daerah dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp200.000.000,00 atau sebesar 100,00% yang merupakan Transfer Pemerintah Kabupaten Bangka Barat ke Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk bantuan penganggulangan bencana alam. Tahun 2021 tidak terdapat realisasi Transfer Antar Daerah.

## 1.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutupselisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

### 1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) tahun lalu dan penerimaan kembali pinjaman daerah.

Jumlah Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Penerimaan Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
Penggunaan Silpa	14.346.688.380,61	4.346.688.380,61	11.086.295.159,93	3.260.393.220,68	29,41
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	100.000.000,00	36.676.250,00	171.029.020,00	(134.352.770,00)	78,56
<b>Total</b>	<b>14.446.688.380,61</b>	<b>14.383.364.630,61</b>	<b>11.257.324.179,93</b>	<b>3.126.040.450,68</b>	<b>27,77</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah. Realisasi Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya sebesar Rp14.346.688.380,61 terdiri dari Penggunaan Silpa Kas di Kas Daerah sebesar Rp 7.236.624.850,88, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.300,00, silpa Dana JKN sebesar Rp343.280.885,00, silpa Dana BLUD sebesar Rp 6.328.956.231,73 dan silpa Kas Lainnya di Sekolah sebesar Rp 437.825.113,00. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah merupakan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada masyarakat berupa pinjaman perkuatan modal UMKM, pinjaman kelompok nelayan dan Koperasi serta penerimaan atas pinjaman kepada Kelompok Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSJR). Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp36.676.250,00 terdiri dari :

No	OPD	Uraian	Jumlah (Rp)	Tahun Pemberian Pinjaman
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	UKM	1.000.000,00	2009
			1.543.750,00	2011
		Koperasi	1.000.000,00	2008
			3.500.000,00	2010
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	500.000,00	2012
			14.900.000,00	2014
			14.232.500,00	2015
<b>Total</b>			<b>36.676.250,00</b>	

#### 1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan merupakan pengeluaran yang penggunaannya untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 tidak dianggarkan dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

#### 1.4.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Merupakan penjumlahan surplus/defisit dengan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan (Pembiayaan Neto). Anggaran dan Realisasi SiLPA adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pembiayaan Netto	14.446.688.380,61	14.383.364.630,61	99,56
Surplus/(Defisit)	(14.446.688.380,61)	92.808.437.140,10	642,42
<b>SiLPA</b>	<b>0,00</b>	<b>107.191.801.770,71</b>	



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perubahan saldo anggaran lebih Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 dan tahun 2021 adalah dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal (1)	14.346.688.380,61	11.323.202.562,47
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan(2)	14.346.688.380,61	11.086.295.159,93
<b>Sub Total (3) = (1) – (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>236.907.402,54</b>
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) (4)	107.191.801.770,71	14.346.688.380,61
<b>Sub Total (5) = (3) +(4)</b>	<b>107.191.801.770,71</b>	<b>14.583.595.783,15</b>
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (6)	0,00	0,00
Lain-Lain (7)	0,00	(236.907.402,54)
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5) + (6) + (7)</b>	<b>107.191.801.770,71</b>	<b>14.346.688.380,61</b>

1. SAL Awal adalah akumulasi saldo yang berasal dari SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan SILPA tahun berjalan ditambah/dikurangi dengan penyesuaian lainnya yang diperkenankan. SAL Awal tahun 2022 adalah sebesar Rp14.346.688.380,61 merupakan SAL Akhir per 31 Desember 2021. Saldo Anggaran Lebih awal meliputi saldo awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran OPD, Bendahara Pengeluaran BLUD, Kas di Bendahara JKN dan Kas Lainnya serta Kas Lainnya di Sekolah.
2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan merupakan saldo anggaran lebih yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Pada tahun 2022, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp14.346.688.380,61.
3. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan LRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA tahun 2022 sebesar Rp107.191.801.770,71.
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya adalah koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya yang dilakukan koreksi pada tahun berjalan yang terkait dengan koreksi SiLPA, perhitungan selisih kurs, koreksi kas, dan koreksi utang yang berpengaruh terhadap perhitungan SAL. Pada tahun 2022 tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan.
5. Lain-Lain adalah penyesuaian penggunaan Silpa tahun lalu. Tidak terdapat penyesuaian Silpa tahun lalu.
6. SAL Akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp 107.191.801.770,71 mengalami kenaikan sebesar Rp92.845.113.390,10 dibandingkan SAL Akhir Tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

sebesar Rp14.346.688.380,61 atau sebesar 647,15%. Saldo Anggaran Lebih Akhir meliputi saldo awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran OPD, Bendahara Pengeluaran BLUD, Kas di Bendahara JKN dan Kas Lainnya serta Kas Lainnya di Sekolah.

Saldo anggaran lebih awal dan saldo anggaran lebih akhir yang disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah saldo anggaran lebih APBD, saldo anggaran lebih JKN, saldo anggaran lebih Kas Lainnya di Sekolah dan saldo anggaran lebih BLUD. Pada tahun 2022, Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp107.191.801.770,71, sedangkan pada tahun 2021 Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp14.346.688.380,61.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**3. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

**3.1 Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

**3.1.1 Aset Lancar**

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

**3.1.1.1 Kas**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

**3.1.1.1.2 Kas di Kas Daerah**

Kas di Kas Daerah merupakan aset lancar pemerintah daerah baik berupa giro maupun deposito. Total rekening giro Pemerintah Kabupaten Bangka Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp93.149.349.623,97.

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 dalam bentuk rekening giro adalah sebagai berikut :

Nomor Rekening	Bank	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
162.30.00001	BPD Sumsel Babel	8.487.352.514,83	388.863.886,54
162.30.00009	BPD Sumsel Babel	38.844.354.404,81	1.012.770.012,81
162.30.00015	BPD Sumsel Babel	43.665.139.956,48	4.981.242.705,53
162.30.00016	BPD Sumsel Babel	179.594.864,00	147.279.564,00
162.30.00017	BPD Sumsel Babel	55.027,00	0,00
162.30.00018	BPD Sumsel Babel	500.336.795,50	65.323.831,50
162.30.00019	BPD Sumsel Babel	138.376.018,50	44.688.332,00
162.30.00020	BPD Sumsel Babel	266.060.600,50	187.146.637,50



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

162.30.00021	BPD Sumsel Babel	244.877.286,00	260.294.342,00
162.30.00022	BPD Sumsel Babel	728.441.180,00	148.461.244,00
333.533.3799	PT. Bank Nasional Indonesia	82.557.196,00	554.295,00
2090.01.000.313.303	PT. Bank Rakyat Indonesia	821.165,00	0,00
1690.000.280.9330	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.437.642,35	
<b>Total</b>		<b>93.149.404.650,97</b>	<b>7.236.624.850,88</b>

Keterangan:

- ❖ Rek No.162.30.00001 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Pendapatan Asli Daerah, penyeteroran sisa kas dan pendapatan transfer dari provinsi.
- ❖ Rek No.162.30.00009 dipergunakan sebagai rekening penerimaan transfer pusat.
- ❖ Rek No.162.30.00015 dipergunakan sebagai rekening pengeluaran/belanja.
- ❖ Rek No.162.30.00016 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- ❖ Rek No.162.30.00017 dipergunakan sebagai rekening penerimaan dan penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
- ❖ Rek No.162.30.00018 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Pajak Restoran.
- ❖ Rek No.162.30.00019 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Pajak Reklame.
- ❖ Rek No.162.30.00020 dipergunakan sebagai rekening Pajak Mineral bukan logam dan Batuan.
- ❖ Rek No.162.30.00021 dipergunakan sebagai rekening Pajak BPHTB.
- ❖ Rek No.162.30.00022 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Retribusi.
- ❖ Rek No. 333.533.3799 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- ❖ Rek No.2090.01.000.313.303 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- ❖ Rek No. 169.000.280.9330 dipergunakan sebagai rekening penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebagai kas daerah tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/56/4.4.1.1/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor :188.45/13/4.4.1.1/2020 tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Muntok sebagai Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Penunjukan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai kas daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/9.A/BPKAD/2022 tentang



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Penunjukan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Indonesia Sebagai Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Terdapat selisih penyajian Kas di Kas Daerah dengan total nilai seluruh rekening Kas Umum Daerah yaitu senilai Rp55.027,00 yang merupakan Saldo PFK pada rekening 162.30.00017 yang nilai tersebut disajikan pada akun Kas Lainnya.

**3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran untuk belanja. Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2022 adalah sebagai berikut :

OPD	Nomor Rekening	Bank
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	162-30-10066	BPD Sumsel Babel
Dinas Kesehatan	162-30-10011	BPD Sumsel Babel
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	162-30-10069	BPD Sumsel Babel
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	162-30-10063	BPD Sumsel Babel
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	162-31-000020	BPD Sumsel Babel
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	162-31-000019	BPD Sumsel Babel
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	162-30-10068	BPD Sumsel Babel
Dinas Pertanian dan Pangan	162-30-10071	BPD Sumsel Babel
Dinas Lingkungan Hidup	162-30-10073	BPD Sumsel Babel
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	162-30-10022	BPD Sumsel Babel
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	162-30-10075	BPD Sumsel Babel
Dinas Komunikasi dan Informatika	162-30-10061	BPD Sumsel Babel
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	162-30-10074	BPD Sumsel Babel
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	162-30-10076	BPD Sumsel Babel
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	162-30-10072	BPD Sumsel Babel
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	162-30-10065	BPD Sumsel Babel
Dinas Kelautan dan Perikanan	162-30-10017	BPD Sumsel Babel
DPRD	162-30-10021	BPD Sumsel Babel
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	162-30-00003	BPD Sumsel Babel
Sekretariat Daerah	162-30-10004	BPD Sumsel Babel
Sekretariat DPRD	162-30-10021	BPD Sumsel Babel
Kecamatan Muntok	162-30-10005	BPD Sumsel Babel
Kecamatan Simpang Teritip	162-30-10006	BPD Sumsel Babel
Kecamatan Jebus	162-30-10008	BPD Sumsel Babel
Kecamatan Kelapa	162-30-10003	BPD Sumsel Babel
Kecamatan Tempilang	162-30-10020	BPD Sumsel Babel
Kecamatan Parittiga	162-30-10052	BPD Sumsel Babel
Inspektorat Kabupaten	162-30-10015	BPD Sumsel Babel
Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah	162-30-10062	BPD Sumsel Babel
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	162-30-10064	BPD Sumsel Babel
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	162-30-10060	BPD Sumsel Babel
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	162-31-000018	BPD Sumsel Babel
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	162-30-10067	BPD Sumsel Babel



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Rekening Bendahara Pengeluaran OPD tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/342/BPKAD/2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/14/4.4.1.1/2020 Tentang Penetapan Nomor Rekening Bank Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tanggal 14 Desember 2022.

Per 31 Desember 2022 saldo Kas di Bendahara Pengeluaran OPD sebesar Rp 52.662.284,00 dengan rincian sebagai berikut :

OPD	Saldo Kas per 31 Desember 2022 (Rp)	Tanggal Penyetoran Saldo Kas 2022	Saldo Kas per 31 Desember 2021 (Rp)	Tanggal Penyetoran Saldo Kas 2021
Sekretariat Daerah	0,00	-	1.300,00	3 Januari 2022
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.168.984,00	5 Januari 2023	0,00	-
Kecamatan Muntok	410.000,00	5 Januari 2023	0,00	-
Kecamatan Kelapa	49.083.300,00	9 Januari 2023	0,00	-
<b>Total</b>	<b>52.662.284,00</b>		<b>1.300,00</b>	

#### 3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas di Bendahara Penerimaan OPD atas penerimaan pajak dan retribusi. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 6.525.000,00.

OPD	Saldo Kas per 31 Desember 2022 (Rp)	Tanggal Penyetoran Saldo Kas 2022
Dinas Lingkungan Hidup	460.000,00	3 Januari 2023
	300.000,00	21 Januari 2023
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	4.865.000,00	3 Januari 2023
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	900.000,00	21 Maret 2023
<b>Total</b>	<b>6.525.000,00</b>	

#### 3.1.1.1.4 Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan saldo kas pajak yang belum disetorkan per 31 Desember 2022. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp 55.027,00 yang merupakan saldo Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berada di rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat.

#### 3.1.1.1.5 Kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Saldo kas di Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di 8 (delapan) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan merupakan selisih antara pendapatan dan belanja



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional tahun berjalan ditambah dengan saldo awal tahun. Saldo kas di Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.290.072,00 dengan rincian sebagai berikut :

FKTP	Nomor Rekening	Bank	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Puskesmas Muntok	2090-01-000077-30-5	BRI	1.219,00	36.728.762,00
Puskesmas Kundi	2090-01-000080-30-8	BRI	11.066,00	42.584.938,00
Puskesmas Sp.Teritip	2090-01-000083-30-6	BRI	55.533,00	88.996.510,00
Puskesmas Kelapa	2090-01-000079-30-3	BRI	0,00	161.980.979,00
Puskesmas Tempilang	2090-01-000078-30-1	BRI	34.053,00	23.044,00
Puskesmas Jebus	2090-01-000124-30-6	BRI	6.645,00	849.286,00
Puskesmas Puput	2090-01-000081-30-4	BRI	187,00	12.096.507,00
Puskesmas Sekar Biru	2090-01-000125-30-2	BRI	9.181.369,00	20.859,00
<b>Total</b>			<b>9.290.072,00</b>	<b>343.280.885,00</b>

Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/311.B/1.20.13/2014 tentang Rekening Penerimaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

#### 3.1.1.1.6 Kas Lainnya di Sekolah

Kas Lainnya di Sekolah merupakan saldo Kas BOS APBN di sekolahnegeri tingkat dasar (SD dan SMP) di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Kas Lainnya di Sekolah tahun 2022 sebesar Rp 37.804.072,00. Rekening Kas Lainnya di Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/278/BPKAD/2022 Tanggal 10 Oktober 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/289/BPKAD/2021 tentang Penetapan Nomor Rekening Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021.

Rincian Saldo Kas Lainnya di Sekolah dapat dilihat pada Lampiran 1.

#### 3.1.1.1.7 Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan kas yang berada BLUD RSUD Sejian Setason Kabupaten Bangka Barat.

Kas di BLUD Per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.942.695.718,74 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	30 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Saldo tunai di Bendahara Penerimaan BLUD	2.345.950,00	0,00
Saldo tunai di Bendahara Pengeluaran BLUD	6.136.445,53	45.125.774,57



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

<b>Sub Total</b>	<b>8.482.395,53</b>	<b>45.125.774,57</b>
Saldo Rekening Bank pada Bank Sumsel Babel di Bendahara Penerimaan BLUD	2.640.986.372,24	5.543.635.247,00
Saldo Rekening Bank pada Bank Mandiri di Bendahara Penerimaan BLUD	10.498.882.181,66	0,00
Saldo Rekening Bank pada Bank Sumsel Babel di Bendahara Pengeluaran BLUD	741.242.620,46	740.195.210,16
Saldo Rekening Bank pada Bank Mandiri di Bendahara Pengeluaran BLUD	53.102.148,85	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>13.934.213.323,21</b>	<b>6.283.830.457,16</b>
<b>Total</b>	<b>13.942.695.718,74</b>	<b>6.328.956.231,73</b>

#### 3.1.1.1.8 **Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi Jangka Pendek Per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.914.896.000,00 yang merupakan Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam berupa dana TDF (*Treasury Deposit Facility*) yang telah diterima pada Kas Daerah pada tahun 2023.

#### 3.1.1.2 **Piutang**

Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang dibuktikan dengan dokumen yang sah seperti surat ketetapan pajak, surat ketetapan retribusi atau yang dipersamakan. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik di Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah atau yang sudah diserahkan penagihannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Selain itu tidak terdapat jaminan atau sita jaminan terkait piutang.

##### Pengakuan Piutang

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya. Piutang diakui ketika telah diterbitkannya surat ketetapan/dokumen yang sah misalnya surat ketetapan pajak, surat ketetapan retribusi atau pun surat perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban yang jelas.

##### Pengukuran Piutang

Piutang disajikan senilai yang dapat direalisasikan yaitu nilai piutang dikurangi dengan nilai penyisihan piutang. Penyisihan piutang adalah estimasi atau perkiraan yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir periode yang dibentuk senilai persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang.

#### 3.1.1.2.1 **Piutang Pajak**

Piutang pajak merupakan hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang dibuktikan dengan penerbitan surat ketetapan pajak daerah kepada wajib pajak. Piutang pajak diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak (SKP) atau pun surat ketetapan pajak kurang bayar (SKP-KB), baik untuk jenis pajak yang ditetapkan dengan *Official Assesment* maupun untuk jenis pajak dengan *Self*



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Assesment.Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Jenis Pajak	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Pajak Hotel/Penginapan	0,00	0,00
Pajak Restoran	0,00	33.100,00
Pajak Reklame	67.004.785,75	41.556.369,25
Pajak Hiburan	0,00	119.000,00
Pajak Galian C	0,00	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00
Pajak Air Tanah	6.869.116,00	4.214.528,00
Pajak Bumi dan Bangunan	9.867.127.538,00	8.029.508.486,00
BPHTB	0,00	3.000.000,00
<b>Total</b>	<b>9.944.001.439,75</b>	<b>8.078.431.483,25</b>

Uraian mutasi Piutang Pajak sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Jenis Pajak	Piutang atas penerbitan SKP-D s.d Tahun 2021 (Rp)	Mutasi Piutang			Koreksi pencatatan Piutang tahun lalu (Rp)	Piutang sampai dengan 31 Desember 2022 (Rp)
		Piutang atas penerbitan SKP-D s.d Tahun 2021 yang terealisasi di 2022 (Rp)	Piutang 2022 atas penerbitan SKP-D 2022 (Rp)	Penghapusan Piutang di tahun 2022 (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7=(2+4) - (3+5) + (6)
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Restoran	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Hiburan	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Reklame	41.556.369,25	8.540.268,75	43.577.875,25	0,00	9.589.190,00	67.004.785,75
Pajak Penerangan jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Galian C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Air Tanah	4.214.528,00	3.632.318,00	6.286.906,00	0,00	0,00	6.869.116,00
Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	302.201.249,00	2.139.820.301,00	0,00	0,00	9.867.127.538,00
BPHTB	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>Total</b>	<b>8.078.431.483,25</b>	<b>314.525.935,75</b>	<b>2.139.820.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.589.190,00</b>	<b>9.944.001.439,75</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**3.1.1.2.2 Penyisihan Piutang Pajak**

Penyisihan Piutang Pajak merupakan estimasi atau perkiraan yang dilakukan untuk piutang pajak tidak tertagih pada akhir periode yang dibentuk senilai persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang. Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, besarnya penyisihan piutang tidak tertagih (untuk jenis pajak selain PBB) ditentukan sebagai berikut :

No	Kualitas Piutang Pajak	Umur Piutang Pajak	Persentase Penyisihan Piutang Pajak
1.	Lancar	< 1 Tahun	0,5%
2.	Kurang Lancar	1 – 3 Tahun	10%
3.	Diragukan	3 – 5 Tahun	50%
4.	Macet	> 5 Tahun	100%

Sedangkan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih untuk PBB ditentukan sebagai berikut :

No	Kualitas Piutang PBB	Umur Piutang PBB	Persentase Penyisihan Piutang PBB
1.	Lancar	Sampai dengan 1 Tahun	5%
2.	Kurang Lancar	> 1 Tahun – 3 Tahun	10%
3.	Diragukan	> 3 Tahun – 5 Tahun	50%
4.	Macet	Lebih dari 5 Tahun	100%

Penyisihan piutang pajak berdasarkan jenis pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.605.719.758,60 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pajak	Nilai Piutang per 31 Desember 2022 (Rp)	Penyisihan piutang per 31 Desember 2022 (Rp)
Pajak Hotel/Penginapan	0,00	0,00
Pajak Restoran	0,00	0,00
Pajak Hiburan	0,00	0,00
Pajak Reklame	67.004.785,75	10.043.250,87
Pajak Galian C	0,00	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00
Pajak Air Tanah	6.869.116,00	253.655,53
BPHTB	3.000.000,00	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan	9.867.127.538,00	5.595.422.852,20
<b>Total</b>	<b>9.944.001.439,75</b>	<b>5.605.719.758,60</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Jenis Pajak	Penyisihan Piutang s.d Tahun 2021 (Rp)	Mutasi Penyisihan Piutang			Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 (Rp)	Penyisihan Piutang sampai dengan 31 Desember 2022 (Rp)
		Nilai Penyisihan Piutang atas Pelunasan Piutang di Tahun 2022 (Rp)	Penghapusan Penyisihan Piutang atas Penghapusan Piutang (Rp)	Koreksi catat Penyisihan Piutang (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7=(2)- (3+4) + (5) + (6)
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Restoran	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Hiburan	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Reklame	14.590.220,54	2.533.842,62	1.600.166,34	0,00	5.480.645,95	10.043.250,87
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Galian C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Air Tanah	305.896,19	72.845,93	125.086,59	0,00	0,00	253.655,53
Pajak Bumi dan Bangunan	5.228.700.484,50	487.909.270,50	90.119.819,80	0,00	31.067.083,00	5.595.422.852,20
<b>Total</b>	<b>5.243.748.701,23</b>	<b>490.515.959,05</b>	<b>91.997.172,73</b>	<b>0,00</b>	<b>36.547.728,95</b>	<b>5.605.719.767,60</b>

### 3.1.1.2.3 Piutang Pajak Netto

Piutang Pajak Netto merupakan nilai piutang pajak dikurangi dengan penyisihan piutang pajak. Piutang Pajak Netto per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.338.281.681,15 sebagai berikut :

Jenis Pajak	Nilai Piutang Pajak (Rp)	Penyisihan Piutang Pajak (Rp)	Piutang Pajak Netto (Rp)
	1	2	3=1-2
Pajak Hotel/Penginapan	0,00	0,00	0,00
Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
Pajak Reklame	67.004.785,75	10.043.250,87	56.961.534,88
Pajak Galian C	0,00	0,00	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00
Pajak Air Tanah	6.869.116,00	253.655,53	6.615.460,47
Pajak Bumi dan Bangunan	9.867.127.538,00	5.595.422.852,20	4.271.704.685,80
BPHTB	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
<b>Total</b>	<b>9.944.001.439,75</b>	<b>5.605.719.758,60</b>	<b>4.338.281.681,15</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**3.1.1.2.4 Piutang Retribusi**

Piutang Retribusi merupakan hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang dibuktikan dengan penerbitan surat ketetapan retribusi daerah kepada wajib retribusi. Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

SKPD/OPD	Piutang Retribusi Per 31 Desember 2022 (Rp)	Piutang Retribusi Per 31 Desember 2021 (Rp)
<b>Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
Retribusi Pasar Grosir	270.000,00	270.000,00
<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian</b>	<b>30.540.000,00</b>	<b>24.060.000,00</b>
Retribusi Pasar Grosir	30.540.000,00	24.060.000,00
<b>Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>261.318.422,00</b>	<b>232.019.250,00</b>
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	55.252.922,00	25.953.750,00
Surat Izin Tempat Usaha/Gangguan	205.940.500,00	205.940.500,00
Izin Trayek	125.000,00	125.000,00
<b>Total</b>	<b>292.128.422,00</b>	<b>256.349.250,00</b>

Uraian mutasi Piutang Retribusi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

OPD Jenis Retribusi	Piutang Retribusi s.d Tahun 2021	Koreksi Catat (Rp)	SKRD Tahun 2022 Terutang (Rp)	Penghapusan piutang (Rp)	Kelebihan Setor (Rp)	SKRD Terutang Per 31 Desember 2022 (Rp)
	1	2	3	4	5	6=1-2+3-4-5
<b>Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
Retribusi Pasar Grosir	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian</b>	<b>24.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.060.000,00</b>
Retribusi Pasar Grosir	24.060.000,00	0,00	6.480.000,00	0,00	0,00	30.540.000,00
<b>Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>232.019.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.299.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.318.422,00</b>
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	25.953.750,00	0,00	29.299.172,00	0,00	0,00	55.252.922,00
Surat Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan	205.940.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.940.500,00
Izin Trayek	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
<b>Total</b>	<b>256.349.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.779.172</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.128.422,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Rincian Piutang Retribusi dapat dilihat pada lampiran3.

**3.1.1.2.5 PenyisihanPiutang Retribusi**

Penyisihan Piutang Retribusi merupakan estimasi atau perkiraan yang dilakukan untuk piutang retribusi tidak tertagih pada akhir periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang. Penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp259.735.745,86 dengan rincian sebagai berikut :

SKPD/OPD	Nilai Piutang Retribusi 2022 (Rp)	Penyisihan Piutang Retribusi 2022 (Rp)
<b>Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
Retribusi Pasar Grosir	270.000,00	270.000,00
<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian</b>	<b>30.540.000,00</b>	<b>(27.300.000,00)</b>
Retribusi Pasar Grosir	30.540.000,00	(27.300.000,00)
<b>Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>261.318.422,00</b>	<b>(232.165.745,86)</b>
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	55.252.922,00	(26.100.245,86)
Surat Izin Tempat Usaha/Gangguan	205.940.500,00	(205.940.500,00)
Izin Trayek	125.000,00	(125.000,00)
<b>Total</b>	<b>292.128.422,00</b>	<b>(259.735.745,86)</b>

Berikut mutasi penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2022:

Uraian	Penyisihan Piutang Retribusi s.d Tahun 2021	Nilai Penyisihan Piutang atas Pelunasan Piutang Retribusi (Rp)	Beban Penyisihan Piutang Retribusi (Rp)	Koreksi Catat Penyisihan Piutang Retribusi (Rp) Tahun Sebelumnya	Penyisihan Piutang Retribusi 2021 (Rp)
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=1-2+3+4</i>
<b>Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(270.000,00)</b>
Retribusi Pasar Grosir	270.000,00	0,00	0,00	0,00	(270.000,00)
<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian</b>	<b>12.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240.000,00</b>	<b>12.030.000,00</b>	<b>(27.300.000,00)</b>
Retribusi Pasar Grosir	12.030.000,00	0,00	3.240.000,00	12.030.000,00	(27.300.000,00)
<b>Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>232.019.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.495,86</b>	<b>0,00</b>	<b>(232.165.745,86)</b>
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	25.953.750,00	0,00	146.495,86	0,00	(26.100.245,86)
Surat Izin Tempat Usaha/Gangguan	205.940.500,00	0,00	0,00	0,00	(205.940.500,00)
Izin Trayek	125.000,00	0,00	0,00	0,00	(125.000,00)
<b>Total</b>	<b>244.319.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386.495,86</b>	<b>12.030.000,00</b>	<b>259.735.745,86</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Tahun 2022 terdapat koreksi catat penyisihan piutang retribusi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian sebesar Rp12.030.000,00 yang merupakan kurangi saji penyisihan piutang retribusi tahun 2021.

Penyisihan Piutang Retribusi dapat dilihat pada Lampiran 4.

### 3.1.1.2.6 Piutang Retribusi Netto

Piutang Retribusi Netto merupakan nilai piutang retribusi dikurangi penyisihan piutang retribusi. Piutang Retribusi Netto per 31 Desember 2022 sebesar Rp32.392.676,14 dengan rincian sebagai berikut :

OPD	Nilai Piutang Retribusi 2022 (Rp)	Penyisihan Piutang Retribusi 2022 (Rp)	Piutang Retribusi Netto 2022 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=2-3</i>
<b>Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>
Retribusi Pasar Grosir	270.000,00	270.000,00	0,00
<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian</b>	<b>30.540.000,00</b>	<b>(27.300.000,00)</b>	<b>3.240.000,00</b>
Retribusi Pasar Grosir	30.540.000,00	(27.300.000,00)	3.240.000,00
<b>Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>261.318.422,00</b>	<b>(232.165.745,86)</b>	<b>29.152.676,14</b>
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	55.252.922,00	(26.100.245,86)	29.152.676,14
Surat Izin Tempat Usaha/Gangguan	205.940.500,00	(205.940.500,00)	0,00
Izin Trayek	125.000,00	(125.000,00)	0,00
<b>Total</b>	<b>292.128.422,00</b>	<b>259.735.745,86</b>	<b>32.392.676,14</b>

### 3.1.1.2.7 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan piutang Dividen atas penyertaan modal Pemerintah Daerah. Tahun 2022, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp6.844.661.601,09 yaitu Dividen atas penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung tahun buku 2022 berdasarkan surat dari Bank Sumsel Babel Nomor 330/DIR/III/B/2023 tanggal 17 Maret 2023 perihal Dividen Saham Tahun Buku 2022.

### 3.1.1.2.8 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tidak dilakukan penyisihan terhadap Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dikarenakan seluruh Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan terealisasi tahun berikutnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**3.1.1.2.9 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto**

Dengan tidak dilakukannya penyisihan terhadap Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, maka Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu sebesar Rp6.844.661.601,09.

**3.1.1.2.10 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya merupakan piutang yang terdapat pada BLUD RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 memiliki Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp136.614.054,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
BPJS	3.503.554,00
BPJS Covid	120.550.500,00
Parsial RSBT	12.560.000,00
<b>Total</b>	<b>136.614.054,00</b>

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya pada BLUD disajikan berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi yang ditandatangani oleh Direktur BLUD dan Pimpinan BPJS.

**3.1.1.2.11 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya**

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya merupakan estimasi atau perkiraan yang dilakukan untuk Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya tidak tertagih pada akhir periode yang dibentuk senilai persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang. Tahun 2022 tidak dilakukan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.

**3.1.1.2.12 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Netto**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Nettomerupakan selisih antara Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya dengan penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya. Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Netto tahun 2022 sebesar Rp136.614.054,00.

**3.1.1.2.13 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan merupakan hak dari Pemerintah Kabuapten Bangka Barat yang masih akan diterima dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 tidak memiliki Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.

**3.1.1.2.14 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**

Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan merupakan estimasi atau perkiraan yang dilakukan untuk Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan yang belum diterima pada akhir periode yang dibentuk senilai persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak melakukan Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan.

**3.1.1.2.15 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Netto**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Netto merupakan selisih antara Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dengan penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 tidak memiliki Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Netto.

**3.1.1.2.16 Piutang Dana Bagi Hasil/ Bagi Hasil Pajak Provinsi**

Piutang Dana Bagi Hasil/ Bagi Hasil Pajak Provinsi merupakan hak yang masih akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berupa Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 memiliki aset Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi. Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi merupakan Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang telah diterbitkan keputusan Gubernur namun belum disalurkan oleh Pemerintah Provinsi. Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.489.820.691,00 lokasi Sementara Penerimaan Bagi Hasil Pajak dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Bagi Hasil	Periode	Nilai Rp	Nomor SK
1.	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Triwulan IV	5.743.229.284,00	Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.188.4/21/BAKUDA/2023 tanggal 14 Maret 2023
2.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Triwulan IV	1.892.432.929,00	Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.188.4/19/BAKUDA/2023 tanggal 14 Maret 2023
3.	Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Triwulan IV	1.664.411.553,00	Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.188.4/19/BAKUDA/2023 tanggal 14 Maret 2023
4.	Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	Triwulan IV	115.977.306,00	Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.188.4/19/BAKUDA/2023 tanggal 14 Maret 2023
5.	Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok	Triwulan IV	2.073.769.619,00	Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.188.4/07/BAKUDA/2023 tanggal 10 Januari 2023
<b>Total</b>			<b>11.489.820.691,00</b>	



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Uraian Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Bagi Hasil	Piutang per 31 Desember 2021 (Rp)	Pelunasan Piutang per 31 Desember 2021 pada tahun 2022 (Rp)	Piutang yang timbul pada tahun 2022 (Rp)	Piutang Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	7=3-4+5
1.	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.297.551.903,00	5.297.551.903,00	5.743.229.284,00	5.743.229.284,00
2.	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.863.271.738,00	1.863.271.738,00	1.892.432.929,00	1.892.432.929,00
3.	Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	842.634.992,00	842.634.992,00	1.664.411.553,00	1.664.411.553,00
4.	Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	109.499.141,00	109.499.141,00	115.977.306,00	115.977.306,00
5.	Bagi Penerimaan Hasil Pajak Rokok	1.732.605.886,00	1.732.605.886,00	2.073.769.619,00	2.073.769.619,00
<b>Total</b>		<b>9.845.563.660,00</b>	<b>9.845.563.660,00</b>	<b>11.489.820.691,00</b>	<b>11.489.820.691,00</b>

#### 3.1.1.2.17 Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi

Tidak dilakukan penyisihan terhadap Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi dikarenakan seluruh Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi akan terealisasi tahun berikutnya.

#### 3.1.1.2.18 Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi Netto

Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi Netto merupakan selisih antara Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi dengan penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi. Dengan tidak dilakukannya penyisihan terhadap Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi, maka Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi Netto per 31 Desember 2022 adalah sebesar Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi yaitu Rp11.489.820.691,00.

#### 3.1.1.2.19 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek. Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.

#### 3.1.1.2.20 Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat

Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat merupakan Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berupa



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

reklasifikasi dari Investasi non permanen yang sudah melewati batas jatuh tempo pengembaliannya.

Reklasifikasi investasi non permanen menjadi bagian lancar pinjaman dana perkuatan modal masyarakat dilakukan karena adanya tagihan angsuran dana bergulir yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Dana bergulir yang jatuh tempo dalam kurun waktu limatahun diakui sebagai Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat sebagai berikut :

No	Jenis Pinjaman	OPD Pengelola	Peraturan Bupati	Uraian
1	Fasilitasi pengadaan sarana dan alat bantu penangkapan ikan	DKP	Nomor 18 Tahun 2012 Tanggal 1 Mei 2012	Pinjaman Modal Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Tahun 2012
			Nomor 43 Tahun 2013 Tanggal 21 Oktober 2013	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Tahun 2012
			Nomor 42 Tahun 2015 Tanggal 2 September 2015	Fasilitasi Pinjaman Modal Bagi Nelayan
2	Perkuatan Modal Koperasi (KSP)	DKUP	Nomor 11 Tahun 2008 Tanggal 23 Desember 2008	Pengelolaan Dana Bergulir
			Nomor 19 Tahun 2009 Tanggal 1 Juni 2009	Program Perkuatan Modal
			Nomor 23 Tahun 2010 Tanggal 20 Mei 2010	Program Perkuatan Modal
3	Fasilitasi Pengembangan UMKM	DKUP	Nomor 15 Tahun 2009 Tanggal 18 Maret 2009	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten di Bangka Barat
			Nomor 26 Tahun 2011 Tanggal 14 April 2011	Fasilitasi Pengembangan UMKM Kabupaten Bangka Barat

**Pinjaman Dana Kelompok Nelayan Tahun Per 31 Desember 2022**

Tahun penyaluran	Uraian	Nilai penyaluran	Nilai pengembalian	Sisa yang belum dikembalikan
1	2	3	4	5
2012	Dana Perkuatan Modal Fasilitasi Kelompok Nelayan	805.959.000,00	700.102.083,00	105.856.917,00
2013	Dana Perkuatan Modal Fasilitasi Kelompok Nelayan	835.420.000,00	688.979.999,00	146.440.001,00
2014	Dana Perkuatan Modal Fasilitasi Kelompok Nelayan	825.000.000,00	478.731.000,00	346.269.000,00
2015	Dana Perkuatan Modal Fasilitasi Kelompok Nelayan	891.990.000,00	631.570.980,00	260.419.020,00
<b>Total</b>		<b>3.358.369.000,00</b>	<b>2.499.384.062,00</b>	<b>858.984.938,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**Pinjaman Dana Perkuatan Modal UKM per 31 Desember 2022**

TAHUN	Uraian	Nilai Penyaluran	Nilai Pengembalian	Sisa Yang Belum di Kembalikan
1	2	3	4	5=3-4
2009	UKM Tahun 2009	1.290.500.000,00	1.087.180.000,00	203.320.000,00
2011	UKM Tahun 2011	5.600.000.000,00	5.382.535.250,00	217.464.750,00
<b>Total</b>		<b>6.890.500.000,00</b>	<b>6.469.715.250,00</b>	<b>420.784.750,00</b>

**Pinjaman Dana Perkuatan Modal Koperasi per 31 Desember 2022**

TAHUN	Uraian	Nilai Penyaluran	Nilai Pengembalian	Sisa Yang Belum di Kembalikan
1	2	3	4	5=3-4
2007	Koperasi Tahun 2007	467.340.000,00	467.340.000,00	0,00
2008	Koperasi Tahun 2008	509.000.000,00	448.000.000,00	61.000.000,00
2009	Koperasi Tahun 2009	700.000.000,00	675.627.000,00	24.373.000,00
2010	Koperasi Tahun 2010	700.000.000,00	494.500.000,00	205.500.000,00
<b>Total</b>		<b>2.376.340.000,00</b>	<b>2.085.467.000,00</b>	<b>290.873.000,00</b>

Bagian lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.570.642.688,00 terdiri dari Pinjaman Dana Kelompok Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp858.984.938,00 dan Dana Perkuatan Modal UKM sebesar Rp420.784.750,00 dan Pinjaman Dana Perkuatan Modal Koperasi sebesar Rp290.873.000,00.

Uraian mutasi Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat adalah sebagai berikut :

OPD	Uraian	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Pelunasan Pinjaman di Tahun 2022 (Rp)	Reklas dari Investasi Non Permanen (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Kelautan dan Perikanan	Pinjaman Kelompok Nelayan	888.617.438,00	29.632.500,00	0,00	858.984.938,00
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	Dana Perkuatan Modal Koperasi dan Fasilitasi UKM	718.701.500,00	7.043.750,00	0,00	711.657.750,00
<b>Total</b>		<b>1.607.318.938,00</b>	<b>36.676.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.642.688,00</b>

**3.1.1.2.21 Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat**

Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat adalah estimasi atau perkiraan yang dilakukan untuk pinjaman dana perkuatan modal masyarakat tidak tertagih pada akhir periode yang dibentuk senilai persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang. Penyisihan piutang Bagian



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.570.642.688,00 dengan rincian sebagai berikut :

OPD	Nilai Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat (Rp)	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat (Rp)
	1	2
<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>		
Pinjaman kepada Kelompok Nelayan Tahun 2012	105.856.917,00	105.856.917,00
Pinjaman kepada Kelompok Nelayan Tahun 2013	146.440.001,00	146.440.001,00
Pinjaman kepada Kelompok Nelayan Tahun 2014	346.269.000,00	346.269.000,00
Pinjaman kepada Kelompok Nelayan Tahun 2015	260.419.020,00	260.419.020,00
<b>Sub Total (1)</b>	<b>858.984.938,00</b>	<b>858.984.938,00</b>
<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian</b>		
Dana Perkuatan Modal Koperasi Tahun 2008	61.000.000,00	61.000.000,00
Dana Perkuatan Modal Koperasi Tahun 2009	24.373.000,00	24.373.000,00
Dana Perkuatan Modal Koperasi Tahun 2010	205.500.000,00	205.500.000,00
Dana Faslitasi UKM Tahun 2009	203.320.000,00	203.320.000,00
Dana Faslitasi UKM Tahun 2011	217.464.750,00	217.464.750,00
<b>Sub Total (2)</b>	<b>711.657.750,00</b>	<b>711.657.750,00</b>
<b>Total (1 + 2)</b>	<b>1.570.642.688,00</b>	<b>1.570.642.688,00</b>

Penyisihan terhadap bagian lancar pinjaman dana perkuatan modal masyarakat adalah sebesar 100% dari nilai bagian lancar pinjaman dana perkuatan modal masyarakat tersebut dikarenakan telah melewati batas waktu pelunasan selama 5(lima) tahun.

### 3.1.1.2.22 Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Netto

Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Netto adalah Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat dikurangi dengan Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat. Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Netto per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

OPD	Nilai Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat (Rp)	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat (Rp)	Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Netto (Rp)
	1	2	3=1-2
<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>			
Pinjaman kepada Kelompok Nelayan Tahun 2012	105.856.917,00	105.856.917,00	0,00
Pinjaman kepada Kelompok Nelayan Tahun 2013	146.440.001,00	146.440.001,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

OPD	Nilai Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat (Rp)	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat (Rp)	Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat Netto (Rp)
Pinjaman kepada Kelompok Nelayan Tahun 2014	346.269.000,00	346.269.000,00	0,00
Pinjaman kepada Kelompok Nelayan Tahun 2015	260.419.020,00	260.419.020,00	0,00
<b>Sub Total (1)</b>	<b>858.984.938,00</b>	<b>858.984.938,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian</b>			
Dana Perkuatan Modal Koperasi Tahun 2008	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00
Dana Perkuatan Modal Koperasi Tahun 2009	24.373.000,00	24.373.000,00	0,00
Dana Perkuatan Modal Koperasi Tahun 2010	205.500.000,00	205.500.000,00	0,00
Dana Faslitasi UKM Tahun 2009	203.320.000,00	203.320.000,00	0,00
Dana Faslitasi UKM Tahun 2011	217.464.750,00	217.464.750,00	0,00
<b>Sub Total (2)</b>	<b>711.657.750,00</b>	<b>711.657.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (1 + 2)</b>	<b>1.570.642.688,00</b>	<b>1.570.642.688,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.1.1.2.23 Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah

Piutang lain-lain pendapatan yang sah merupakan hak yang masih akan diterima oleh entitas pelaporan dari entitas lainnya.

Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki aset Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah.

### 3.1.1.2.24 Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah

Tidak dilakukan penyisihan terhadap Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah dikarenakan seluruh Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah akan terealisasi tahun berikutnya. Tidak dilakukan penyisihan terhadap Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah dikarenakan seluruh Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah diperkirakan akan terealisasi tahun berikutnya.

### 3.1.1.2.25 Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah Netto

Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah Netto merupakan selisih antara Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki aset Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah Netto.

### 3.1.1.2.26 Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah Kabupaten Bangka Barat, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu paling lama atau maksimal 1 (satu) tahun. Dengan demikian, persediaan berupa:

- a. barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai dan barang bekas pakai;
- b. barang atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih dan penolong dalam proses produksi;
- c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur;
- d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya hewan, bibit tanaman, barang jadi atau bangunan yang selesai dikerjakan untuk selanjutnya dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- e. barang-barang untuk berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak, cadangan beras, dan cadangan bahan pokok lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

#### Penilaian Persediaan

Saldo persediaan merupakan saldo hasil pemeriksaan persediaan (*stock opname*) per 31 Desember 2022 dan dinilai berdasarkan biaya perolehan persediaan yang terakhir.

#### Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

#### Penatausahaan Persediaan

##### Rincian Persediaan

Persediaan untuk 31 Desember 2022 terdiri dari barang pakai habis, alat tulis kantor, barang cetakan, obat-obatan, alat kesehatan, bibit ikan dan barang persediaan lainnya yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat.

Salah satu perolehan persediaan adalah pembelian yang bersumber dari dana APBD. Pembelian tersebut tidak serta merta diakui sebagai persediaan. Terdapat pembelian yang diakui sebagai belanja jasa dan/atau menjadi aset.

Belanja persediaan berdasarkan LRA merupakan belanja yang dicatat oleh PPK OPD berdasarkan laporan realisasi anggaran yang terdapat pada aplikasi SIMDA



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Keuangan, sedangkan belanja persediaan yang dicatat dalam laporan persediaan merupakan belanja persediaan berdasarkan laporan Pengurus Barang.

Perbandingan Belanja Persediaan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Persediaan yang disajikan dalam laporan persediaan Pengurus Barang adalah sebagai berikut :

No	OPD	Belanja Persediaan berdasarkan LRA (Rp)	Belanja Persediaan yang dicatat dalam Laporan Persediaan (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	2.210.519.100,00	603.484.533,00	1.607.034.567,00
2	Dinas Kesehatan	8.109.162.316,00	7.897.532.715,30	211.629.600,70
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	639.904.340,00	1.638.170.840,00	(998.266.500,00)
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	446.956.998,00	426.395.350,00	20.561.648,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	268.435.860,00	206.910.260,00	61.525.600,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	139.890.488,00	124.770.438,00	15.120.050,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	749.125.360,00	206.396.950,00	542.728.410,00
8	Dinas Pertanian dan Pangan	714.452.990,00	684.348.090,00	30.104.900,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.504.382.060,00	1.370.730.860,00	133.651.200,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	744.857.855,00	718.758.724,00	26.099.131,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	470.452.425,00	357.223.700,00	113.228.725,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	244.710.220,00	94.215.150,00	150.495.070,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	209.483.510,00	153.751.260,00	55.732.250,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	276.269.800,00	153.006.700,00	123.263.100,00
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	558.858.215,00	452.022.864,00	106.835.351,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	194.317.610,00	139.627.832,00	54.689.778,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	136.793.850,00	121.716.350,00	15.077.500,00
18	Sekretariat Daerah	1.874.884.908,00	1.732.193.081,00	142.691.827,00
19	Sekretariat DPRD	855.572.051,00	721.465.760,00	134.106.291,00
20	Kecamatan Muntok	741.457.898,00	438.837.698,00	302.620.200,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	OPD	Belanja Persediaan berdasarkan LRA (Rp)	Belanja Persediaan yang dicatat dalam Laporan Persediaan (Rp)	Selisih (Rp)
21	Kecamatan Simpang Teritip	101.127.300,00	87.543.400,00	13.583.900,00
22	Kecamatan Jebus	60.921.600,00	53.675.050,00	7.246.550,00
23	Kecamatan Kelapa	346.905.900,00	180.468.300,00	166.437.600,00
24	Kecamatan Tempilang	118.505.275,00	85.109.275,00	33.396.000,00
25	Kecamatan Parittiga	135.068.300,00	120.625.850,00	14.442.450,00
26	Inspektorat Daerah	131.212.100,00	84.638.600,00	46.573.500,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	208.143.650,00	130.987.950,00	77.155.700,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	456.281.690,00	247.467.340,00	208.814.350,00
29	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	288.927.890,00	222.713.990,00	66.213.900,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	165.100.800,00	140.990.800,00	24.110.000,00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	149.793.450,00	115.150.050,00	34.643.400,00
32	BLUD	9.881.957.836,30	8.825.235.796,83	1.056.722.039,47
<b>Jumlah</b>		<b>33.134.433.645,30</b>	<b>28.536.165.557,13</b>	<b>4.598.268.088,17</b>

**Mutasi Belanja LRA ke Penerimaan Persediaan**

<b>Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)</b>		<b>33.134.433.645,30</b>
<b>Bertambah :</b>		
- Hutang	4.300.000,00	
- Reklas dari beban pemeliharaan	0,00	
- Reklas dari Beban Hibah	1.088.094.950,00	
- Reklas dari Beban jasa	2.776.000,00	
- Pembulatan	246.483,30	
- Reklas dari Belanja Modal	0,00	
<b>Jumlah bertambah (Rp)</b>		<b>1.095.417.433,30</b>
<b>Berkurang :</b>		
- Reklas ke Beban jasa	3.788.665.990,00	
- Koreksi harga	30.976,00	
- Reklas ke aset	1.229.852.400,00	
- Reklas ke pemeliharaan	44.062.000,00	
- Reklas ke beban hibah	279.108.600,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

- Pembulatan	994.756,52	
- Hutang tahun sebelumnya	350.970.798,95	
<b>Jumlah berkurang (Rp)</b>		<b>5.693.685.521,47</b>
<b>Jumlah Penerimaan dari LRA (Rp)</b>		<b>28.536.165.557,13</b>

Dalam penyajian nilai persediaan di neraca, pembelian yang diakui sebagai belanja persediaan adalah belanja persediaan yang disajikan dalam laporan persediaan Pengurus Barang.

Rincian dan Mutasi Belanja Persediaan

Belanja Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.130.984.042,55 dan Rp24.939.624.517,34 dengan mutasi bertambah dan berkurang sebagai berikut :

<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2021 Audited (Rp)</b>		<b>24.939.624.517,34</b>
Mutasi Bertambah		
Pembelian	28.536.165.557,13	
Hibah	4.542.679.905,17	
Dropping	13.021.232.060,50	
Perolehan Lainnya	21.731.400,00	
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>		<b>46.121.808.922,79</b>
Mutasi Berkurang		
Pemakaian	36.203.434.262,30	
Penghapusan	20.249.740,00	
Hibah	6.910.461.581,38	
Expired/Rusak	1.076.300.270,88	
Pemusnahan	860.766.674,23	
Reklas ke BMD	12.989.760,00	
Dropping	10.066.901.614,93	
Retur	46.106.261,00	
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>		<b>55.197.210.164,73</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2022 (Rp)</b>		<b>17.130.984.042,55</b>

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.130.984.042,55. Rincian persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 berdasarkan jenis persediaan adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**Daftar Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

Jenis Persediaan	31 Desember 2022 <i>Unaudited</i> (Rp)	31 Desember 2021 <i>Audited</i> (Rp)
Bahan Habis Pakai dan Cetak	983.036.214,00	766.042.435,00
Obat dan Alat Kesehatan	14.206.228.280,55	16.414.129.049,34
Bahan Percontohan	22.715.000,00	22.715.000,00
Cadangan Pangan/makanan/sembako	77.827.355,00	188.785.200,00
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	40.540.030,00	41.196.100,00
Hewan Ternak	500.000,00	3.750.000,00
Tanah	0,00	12.989.760,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	223.492.950,00	0,00
Barang Inventaris	1.576.644.213,00	7.490.016.973,00
<b>Total</b>	<b>17.130.984.042,55</b>	<b>24.939.624.517,34</b>

Rincian Persediaan dapat dilihat pada lampiran 5.

Persediaan dikelompokkan menjadi :

- a. Persediaan berupa *supplies* terdiri atas barang pakai habis, alat tulis kantor, barang cetakan berupa blanko KTP/KK, obat-obatan, alat kesehatan, bahan percontohan, dan barang yang dimaksudkan untuk dijual. Saldo persediaan berupa *supplies* tersebut berasal dari OPD termasuk BLUD. Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.330.846.879,55 terdiri dari Persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah sebesar Rp12.441.119.946,94 dan Persediaan pada BLUD sebesar Rp2.889.726.932,61. Rincian *supplies* per 31 Desember 2022 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut :

No	OPD	Nilai Persediaan Berupa <i>Supplies</i> (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	4.220.000,00
2.	Dinas Kesehatan	10.983.834.519,94
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.951.700,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	75.390.800,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.958.000,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	58.715.761,00
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	60.000,00
8.	Dinas Pertanian dan Pangan	376.757.951,00
9.	Dinas Lingkungan Hidup	1.470.200,00
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	678.569.932,00
11.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	151.878.875,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	OPD	Nilai Persediaan Berupa <i>Supplies</i> (Rp)
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	539.000,00
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	22.715.000,00
14.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	14.349.000,00
15.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	491.000,00
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	478.000,00
17.	Dinas Kelautan dan Perikanan	500.000,00
18.	Sekretariat Daerah	2.284.000,00
19.	Sekretariat DPRD	3.790.500,00
20.	Kecamatan Muntok	12.696.800,00
21.	Kecamatan Simpang Teritip	663.000,00
22.	Kecamatan Jebus	235.000,00
23.	Kecamatan Kelapa	3.786.000,00
24.	Kecamatan Tempilang	3.538.400,00
25.	Kecamatan Parittiga	210.000,00
26.	Inspektorat Daerah	1.234.000,00
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	490.000,00
28.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00
29.	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	495.000,00
30.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.255.000,00
31.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.222.000,00
32.	BLUD	2.889.726.932,61
33.	Sekolah	24.340.508,00
<b>Total</b>		<b>15.330.846.879,55</b>

- b. Persediaan berupa barang inventaris lainnya yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak ketiga ataupun masyarakat sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar Rp1.800.137.163,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	OPD Nama Persediaan	Nilai (Rp)
1.	<b>Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan</b>	<b>712.042.213,00</b>
	1. Pembangunan Fasilitas Darat Pelabuhan (Tahun 2020)	712.042.213,00
2.	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	
	1. Sumbungan Rumah Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpiaan Sungai Daeng (Tahun 2022)	223.492.950,00
	2. Jamban Individual Desa Simpang Yul	156.000.000,00
	3. Jamban Individual Kecamatan Kelapa	172.804.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	OPD Nama Persediaan	Nilai (Rp)
	4. Jamban Individual Kecamatan Jebus	156.000.000,00
	5. Jamban Individual Desa Penyampak	181.798.000,00
	6. Jamban Individual Desa Sangku	198.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>1.800.137.163,00</b>

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut Pengurus Barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak disajikan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Terdapat persediaan yang telah kadaluarsa, rusak, dan usang senilai Rp1.076.300.270,88 yang tidak disajikan sebagai persediaan yaitu :

No	OPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	Obat-Obatan	895.404.479,33
2.	BLUD	Suntik KB	26.940.646,55
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Blanko, buku register	150.986.979,00
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Benih Ikan	457.500,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sembako	2.510.666,00
	<b>Total</b>		<b>1.076.300.270,88</b>

### 3.1.2 Investasi Jangka Panjang

#### 3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Investasi Non-Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

##### 3.1.2.1.5 Investasi Dana Perkuatan Modal Masyarakat

Investasi Dana Perkuatan Modal Masyarakat merupakan pinjaman dana perkuatan modal kepada kelompok petani kelapa sawit berupa dana bergulir. Investasi Dana Perkuatan Modal Masyarakat Kabupaten Bangka Barat disalurkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Dana Pinjaman Kebun Kelapa Sawit Rakyat Tanggal 23 November 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Dana Pinjaman Kebun Kelapa Sawit Rakyat Tanggal 16 Oktober 2012. Dalam Peraturan Bupati tersebut tidak mengatur jangka waktu pelunasan, sehingga sisa pinjaman dana perkuatan modal tetap disajikan pada Investasi Dana Perkuatan Modal Masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Pinjaman Dana Perkuatan Modal KKSr per 31 Desember 2022 :

TAHUN	Uraian	Nilai Penyaluran	Nilai Pengembalian	Sisa Yang Belum di Kembalikan
1	2	3	4	5=3-4
2014	KKSr Tahun 2011	1.499.986.500,00	1.498.000.233,45	1.986.266,55
2015	KKSr Tahun 2012	2.800.000.000,00	1.728.884.620,00	1.071.115.380,00
<b>Total</b>		<b>4.299.986.500,00</b>	<b>3.226.884.853,45</b>	<b>1.073.101.646,55</b>

Rincian Investasi Dana Perkuatan Modal Masyarakat Tahun 2022 sebesar Rp1.073.101.646,55 adalah sebagai berikut :

Organisasi Perangkat Daerah dan Nama Program	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>Dinas Pertanian dan Pangan</b>		
Pinjaman bagi Kelompok Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSr) Tahun 2011	1.986.266,55	1.986.266,55
Pinjaman bagi Kelompok Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSr) Tahun 2012	1.071.115.380,00	1.071.115.380,00
<b>Total</b>	<b>1.073.101.646,55</b>	<b>1.073.101.646,55</b>

Mutasi Investasi Dana Perkuatan Modal Masyarakat di Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI INVESTASI DANA PERKUATAN MODAL MASYARAKAT  
PER 31 DESEMBER 2021 KABUPATEN BANGKA BARAT**

Organisasi Perangkat Daerah	Per 31 Des 2021 (Rp)	Pemberian Pinjaman di tahun 2022 (Rp)	Pengembalian Pinjaman di tahun 2022 (Rp)	Reklasifikasi ke Bagian Lancar Pinjaman Dana Perkuatan Modal Masyarakat (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=2+3-4-5</i>
<b>Dinas Pertanian dan Peternakan</b>					
Pinjaman bagi Kelompok Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSr) Tahun 2011	1.986.266,55	0,00	0,00	0,00	1.986.266,55
Pinjaman bagi Kelompok Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSr) Tahun 2012	1.071.115.380,00	0,00	0,00	0,00	1.071.115.380,00
<b>Total</b>	<b>1.073.101.646,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.101.646,55</b>

### 3.1.2.2 Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

#### 3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Nama Investee	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	34.700.000.000,00	34.700.000.000,00
PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung	4.517.500.000,00	4.517.500.000,00
BUMD Bangka Barat Sejahtera	167.142.010,00	231.108.694,00
PDAM. Tirta Sejiran Setason	8.732.780.339,00	8.466.024.921,00
<b>Total</b>	<b>48.117.422.349,00</b>	<b>47.914.633.615,00</b>

Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Nama Investee	Kepemilikan	Penyertaan Modal sampai dengan 31 Desember 2021 (Rp)	Penyertaan Modal Tahun 2022 (Rp)	Laba/(Rugi) dan Penyesuaian rugi Investee Tahun 2022* dan Koreksi Catat (Rp)	Sampai dengan 31 Desember 2022 (Rp)
<b>Metode Harga Perolehan</b>					
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	2,28%	34.700.000.000,00	0,00	tidak mempengaruhi	34.700.000.000,00
PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung	10,33%	4.517.500.000,00	0,00	tidak mempengaruhi	4.517.500.000,00
<b>Metode Ekuitas</b>					
BUMD Bangka Barat Sejahtera	100,00%	231.108.694,00	0,00	(63.966.684,00)	167.142.010,00
PDAM Tirta Sejiran Setason	100,00%	8.466.024.921,00	0,00	266.755.418,00	8.732.780.339,00
<b>Total</b>		<b>47.914.633.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.788.734,00</b>	<b>48.117.422.349,00</b>

\*Laba/(Rugi) Investee hanya mempengaruhi penyertaan modal dengan metode ekuitas.

Penjelasan penyertaan modal Kabupaten Bangka Barat sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2022 adalah sebesar Rp34.700.000.000,00. Pengakuan penyertaan modal pada BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung adalah dengan metode harga perolehan, sehingga laba rugi usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tidak mempengaruhi nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

2. Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada Bank Perkreditan Syariah Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2022 adalah sebesar Rp4.517.500.000,00. Pengakuan penyertaan modal adalah dengan metode harga perolehan, sehingga laba rugi usaha Bank Perkreditan Syariah Bangka Belitung tidak mempengaruhi nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Penyertaan Modal pada Bank Perkreditan Syariah Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung
3. Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak melakukan penyertaan modal pada PD. Bangka Barat Sejahtera. Pengakuan penyertaan modal pada PD. Bangka Barat Sejahtera adalah dengan metode ekuitas dengan artian bahwa 100% adalah milik Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sehingga laba rugi usaha tahun berjalan mempengaruhi nilai penyertaan modal. Nilai penyertaan modal sampai dengan Tahun 2022 adalah sebesar Rp167.142.010,00, yaitu penyertaan modal sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp231.108.694,00 dikurangi dengan rugi tahun 2022 sebesar Rp38.923.749,00 dan koreksi ekuitas 2021 sebesar Rp25.042.935,00. Koreksi ekuitas 2021 sebesar Rp25.042.935,00 merupakan kurang saji utang PPN tahun 2021 sebesar Rp24.912.467,00 dan kurang saji rugi tahun 2021 sebesar Rp130.468,00. Bangka Barat Sejahtera Tahun 2022 tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Penyertaan Modal pada PD. Bangka Barat Sejahtera berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Pada PD. Bangka Barat Sejahtera.
4. Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak melakukan penyertaan modal pada PDAM Tirta Sejiran Setason. Pengakuan penyertaan modal pada PDAM Tirta Sejiran Setason adalah dengan metode ekuitas dengan artian bahwa 100,00% adalah milik Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sehingga laba rugi usaha tahun berjalan mempengaruhi nilai penyertaan modal. Nilai penyertaan modal sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar Rp8.732.780.339,00, yaitu penyertaan modal sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp8.466.024.921,00 dan ditambah dengan laba Tahun 2022 sebesar Rp266.755.418,00. Laporan Keuangan PDAM Tirta Sejiran Setason tahun 2022 telah diaudit oleh auditor independen dengan opini wajar. Penyertaan Modal pada PDAM



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Tirta Sejiran Setason berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Pada PDAM Tirta Sejiran Setason.

Kepemilikan saham Kabupaten Bangka Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp48.117.422.349,00 atas penyertaan modal adalah sebagai berikut :

Nama Investee	Penyertaan Modal per 31 Desember 2022 (Rp)	Saham			Agió saham	Total Saham	Sisa Yang Belum Dijadikan Saham
		Jumlah (lembar)	Nominal Per Lembar Saham (Rp)	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5=3x4	6	7=5+6	8=2-7
<b>Metode Harga Perolehan</b>							
PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	34.700.000.000,00	23.865	1.000.000,00	23.865.000.000,00	10.834.710.000,00	34.699.710.000,00	290.000,00
PT. BPR Syariah Bangka Belitung	4.517.500.000,00	450.000	10.000	4.500.000.000,00	17.500.000,00	4.517.500.000,00	0,00
<b>Metode Ekuitas</b>							
BUMD Bangka Barat Sejahtera	167.142.010,00			167.142.010,00		167.142.010,00	0,00
PDAM Tirta Sejiran Setason	8.732.780.339,00			8.732.780.339,00		8.732.780.339,00	0,00
<b>Total</b>	<b>48.117.422.349,00</b>			<b>37.264.922.349,00</b>	<b>10.852.210.000,00</b>	<b>48.117.132.349,00</b>	<b>290.000,00</b>

### 3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap adalah Barang Milik Daerah berupa aset berwujud yang memiliki dan atau dikuasai Pemerintah Daerah yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah, termasuk aset tetap *idle* dan aset tetap kemitraan yang direklasifikasi ke aset lainnya dan berdasarkan peraturan Bupati Bangka Barat tentang Kebijakan Akutansi, aset tersebut mempunyai nilai yang dapat dikategorikan sebagai aset tetap.

#### Pengakuan Aset Tetap

Suatu aset tetap untuk dapat diakui sebagai aset tetap, maka aset tersebut harus berwujud dan memenuhi empat kriteria sebagai berikut :

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

#### Penilaian Aset Tetap

Nilai aset tetap merupakan nilai aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sampai dengan 31 Desember 2022. Aset tetap dicatat senilai harga perolehannya, yaitu jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung misalnya biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal, biaya pemasangan, biaya profesional, biaya konstruksi dan biaya kepanitiaan.

#### Nilai Tercatat Aset Tetap

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali untuk aset tetap yang tidak disusutkan seperti tanah, aset tetap lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Nilai tercatat tanah, aset tetap lainnya dan KDP adalah seluruh biaya perolehan aset tersebut hingga dapat dipergunakan.

Perolehan Aset bersumber dari dana APBD, dropping atau Hibah. Untuk realisasi APBD tahun 2022 Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp79.178.814.360,33 namun yang tercatat sebagai aset tetap yang diperoleh dari pengadaan sebesar Rp88.517.559.317,00. Selisih nilai tersebut berasal dari rekonsiliasi yang dilakukan antara PPK OPD dengan Pengurus Barang OPD, untuk memperoleh data yang akurat terkait pengakuan aset atas pengeluaran APBD.

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi mutasi (bertambah/berkurang) pengeluaran APBD menjadi aset, diantaranya :

a. Bertambah:

- belanja pemeliharaan;
- pembulatan bertambah pembagian harga perolehan secara proporsional;
- hutang;
- reklas antar golongan; dan
- reklas dari barang dan jasa (jika terdapat belanja barang dan jasa seperti belanja persediaan, honor, biaya perjalanan dinas, dan lain-lain yang menurut kriterianya memenuhi kriteria sebagai aset).

b. Berkurang:

- belanja pemeliharaan;
- reklas ke barang dan jasa;
- pembulatan berkurang pembagian harga perolehan secara proporsional;
- hutang;



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

- reklas antar golongan; dan
- hibah.
- c. Aset di Bawah Kapitalisasi adalah aset yang tidak masuk ke dalam neraca karena tidak memenuhi kriteria nilai perolehan minimum aset tetap.
- d. Aset Tidak Berwujud  
Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki pemerintah daerah. Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Secara keseluruhan dapat diungkapkan bertambah dan berkurang aset tetap sebagai berikut :

<b>Belanja Modal LRA Tahun 2022 (Rp)</b>		<b>79.178.814.360,33</b>
Bertambah :		
- Belanja Pemeliharaan	119.342.994,00	
- Pembulatan	894,35	
- Hutang	4.543.668.258,00	
- Reklas Antar Golongan	12.580.869.818,35	
- Belanja Barang dan Jasa	7.545.591.976,00	
<b>Jumlah bertambah (Rp)</b>		<b>24.789.473.940,70</b>
Berkurang :		
- Belanja Pemeliharaan	129.698.337,03	
- Belanja Barang dan Jasa	73.136.506,00	
- Pembulatan	241,65	
- Hutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	12.580.869.818,35	
- Hibah	0,00	
<b>Jumlah berkurang (Rp)</b>		<b>12.783.704.903,03</b>
<b>Aset di Bawah Kapitalisasi (Rp)</b>		<b>2.642.369.081,00</b>
<b>Aset Tidak Berwujud (Rp)</b>		<b>24.655.000,00</b>
<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Tahun 2022 (Rp)</b>		<b>88.517.559.317,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Rincian Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022 yang diakui sebagai aset tetap per golongan adalah sebagai berikut:

Golongan Aset Tetap	LRA (Rp)	Mutasi Bertambah	Mutasi Berkurang	Aset di Bawah Kapitalisasi	Aset Tak Berwujud	Aset Tetap (Rp)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Tanah	0,00	34.978.000,00	0,00	0,00	0,00	34.978.000,00
Peralatan dan Mesin	30.522.088.004,00	2.403.538.984,00	1.268.456.469,00	694.776.681,00	24.655.000,00	30.937.738.838,00
Gedung dan Bangunan	23.708.809.580,03	275.688.695,00	11.392.161.382,03	20.300.000,00	0,00	12.572.036.893,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.794.316.695,30	6.797.049.931,70	6.160.052,00	0,00	0,00	30.585.206.575,00
Aset Tetap Lainnya	1.153.600.081,00	1.395.220.300,00	116.927.000,00	1.927.292.400,00	0,00	504.600.981,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	13.882.998.030,00	0,00	0,00	0,00	13.882.998.030,00
<b>Total</b>	<b>79.178.814.360,33</b>	<b>24.789.473.940,70</b>	<b>12.783.704.903,03</b>	<b>2.642.369.081,00</b>	<b>24.655.000,00</b>	<b>88.517.559.317,00</b>

Rincian Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022 per OPD yang diakui sebagai aset tetap adalah sebagai berikut :

NO	OPD	LRA (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Aset di bawah kapitalisasi (Rp)	Aset Tak Berwujud (Rp)	Aset tetap (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8= 3+4-5-6-7
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	19.218.992.626,00	4.032.235.320,00	2.701.242.798,00	2.582.933.959,00	0,00	17.967.051.189,00
2	Dinas Kesehatan	8.376.973.737,00	8,00	0,00	28.645.742,00	0,00	8.348.328.003,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.575.139.827,12	19.742.621.480,23	9.232.261.221,35	0,00	0,00	42.085.500.086,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	883.700.394,00	0,00	52,00	0,00	24.655.000,00	859.045.342,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
8	Dinas Pertanian dan Pangan	198.728.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	202.428.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

NO	OPD	LRA (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Aset di bawah kapitalisasi (Rp)	Aset Tak Berwujud (Rp)	Aset tetap (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8= 3+4-5-6-7
9	Dinas Lingkungan Hidup	2.031.905.000,00	79.230.000,00	8,00	0,00	0,00	2.111.134.992,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	332.594.000,00	2.280.004,00	0,00	0,00	0,00	334.874.004,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	94.450.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	94.449.998,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	192.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.950.000,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.935.597,00	74.475.300,00	0,00	0,00	0,00	76.410.897,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	204.483.000,00	103.292.350,00	0,00	0,00	0,00	307.775.350,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	668.061.753,00	3.895.009,00	0,00	12.077.322,00	0,00	659.879.440,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	142.400,00	0,00	142.400,00	0,00	0,00
18	Sekretariat DPRD	4.164.514.028,40	116.861.143,00	96.403.001,40	0,00	0,00	4.184.972.170,00
19	Sekretariat Daerah	1.183.174.000,00	34.430.076,00	46.943.584,00	850.000,00	0,00	1.169.810.492,00
20	Kecamatan Muntok	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
21	Kecamatan Simpang Teritip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Jebus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Kelapa	114.876.098,53	43.630.000,47	39.975.000,00	0,00	0,00	118.531.099,00
24	Kecamatan Tempilang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

NO	OPD	LRA (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Aset di bawah kapitalisasi (Rp)	Aset Tak Berwujud (Rp)	Aset tetap (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8= 3+4-5-6-7
25	Kecamatan Parittiga	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
26	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	236.978.500,00	0,00	3,00	0,00	0,00	236.978.497,00
29	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Badan Kesatuan Bangsa Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	BLUD	9.666.357.799,28	537.180.850,00	666.879.233,28	17.719.658,00	0,00	9.518.939.758,00
	<b>Total</b>	<b>79.178.814.360,33</b>	<b>24.789.473.940,70</b>	<b>12.783.704.903,03</b>	<b>2.642.369.081,00</b>	<b>24.655.000,00</b>	<b>88.517.559.317,00</b>

Rincian dan Mutasi Aset Tetap

Nilai aset tetap yang disajikan sebagai aset tetap pada neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.900.502.244.491,00 dan Rp2.695.704.225.587,00 dengan mutasi bertambah dan berkurang sebagai berikut :

**Mutasi Bertambah dan Mutasi Berkurang Aset Tetap**  
**Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022**

Golongan Aset Tetap	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Tanah	147.855.803.217,00	9.458.345.343,00	2.833.647.154,00	154.480.501.406,00
Peralatan dan Mesin	354.844.136.624,00	48.389.374.799,00	30.110.848.451,00	373.122.662.972,00
Gedung dan Bangunan	553.459.363.614,00	31.411.252.531,00	11.450.815.807,00	573.419.800.338,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.574.623.240.771,00	197.371.180.412,00	48.307.886.458,00	1.723.686.534.725,00
Aset Tetap Lainnya	13.376.720.747,00	505.707.759,00	7.625.500,00	13.874.803.006,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	51.544.960.614,00	62.482.534.044,00	52.109.552.614,00	61.917.942.044,00
<b>Total Aset Tetap Bruto</b>	<b>2.695.704.225.587,00</b>	<b>349.618.394.888,00</b>	<b>144.820.375.984,00</b>	<b>2.900.502.244.491,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Golongan Aset Tetap	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.497.561.744.470,00)	(117.723.265.471,00)	(29.566.070.367,00)	(1.585.718.939.574,00)
<b>Total Aset Tetap Netto</b>	<b>1.198.142.481.117,00</b>	<b>231.895.129.417,00</b>	<b>115.254.305.617,00</b>	<b>1.314.783.304.917,00</b>

Penjelasan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2021 (Rp)</b>			<b>2.695.704.225.587,00</b>
Mutasi Bertambah			
1.	Pengadaan/Belanja Modal	88.517.559.317,00	
2.	Hibah	127.302.738.545,00	
3.	Mutasi Antar OPD	125.571.049.670,00	
4.	Koreksi Nilai	2.744.767.063,00	
5.	Reklas Dari Persediaan	12.989.760,00	
6.	Reklas	671.434.633,00	
7.	Belum Tercatat	4.797.855.900,00	
	<b>Jumlah Mutasi Bertambah (Rp)</b>		<b>349.618.394.888,00</b>
Mutasi Berkurang			
1.	Penghapusan	15.146.536.644,00	
2.	Mutasi Antar OPD	125.571.049.670,00	
3.	Koreksi Nilai/Persediaan	1,00	
4.	Hibah	0,00	
5.	Reklas	4.102.789.669,00	
	<b>Jumlah Mutasi Berkurang (Rp)</b>		<b>144.820.375.984,00</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2022 (Rp)</b>			<b>2.900.502.244.491,00</b>

- ❖ Mutasi bertambah adalah penambahan atas aset tetap
- Pengadaan/Belanja Modal adalah hasil pengadaan atau realisasi anggaran tahun 2022 yang diakui sebagai aset tetap.
  - Hibah adalah penerimaan atas barang yang bersumber dari hibah kementerian dan masyarakat.
  - Mutasi antar OPD adalah penambahan aset tetap dari :
    - Satu unit OPD ke Unit OPD lain dalam Kabupaten Bangka Barat;
    - Unit OPD ke sub unit OPD;
    - Pengelola ke Unit OPD.
  - Koreksi Nilai adalah koreksi tambah atas nilai suatu aset berdasarkan dokumen atau koreksi atas suatu aset yang ternyata dikemudian hari diketahui bahwa barang milik daerah yang tercatat dalam Buku Inventaris tersebut nilainya berubah.
  - Reklas dari persediaan adalah perpindahan belanja persediaan yang diakui sebagai aset tetap.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

- Reklas adalah perpindahan dari satu golongan aset ke golongan aset yang lain atau dari aset *extra komptable* ke aset *intra komptable*.
- Kapitalisasi aset adalah penambahan nilai suatu aset akibat adanya kegiatan pemeliharaan atau renovasi atas satu aset yang sudah ada sebelumnya.
- ❖ Mutasi berkurang adalah pengurangan atas aset tetap
  - Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Dalam hal Barang Milik Daerah yang sudah tidak berada dalam Penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah harus dilakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
  - Mutasi antar OPD adalah pengurangan aset tetap dari satu unit OPD ke Unit OPD lain dalam Kabupaten Bangka Barat.
    - Satu unit OPD ke Unit OPD lain dalam Kabupaten Bangka Barat;
    - Unit OPD ke sub unit OPD;
    - Unit OPD ke Pengelola.
  - Koreksi Nilai/Persediaan adalah koreksi kurang atas nilai suatu aset berdasarkan dokumen atau koreksi atas suatu aset yang ternyata dikemudian hari diketahui bahwa barang milik daerah yang tercatat dalam Buku Inventaris tersebut bukan aset.
  - Hibah adalah pengeluaran atas aset yang diserahkan kepada instansi vertical, pemerintah desa atau masyarakat.
  - Reklas adalah perpindahan dari satu golongan aset ke golongan aset yang lain, atau dari aset *extra komptable* ke aset *intra komptable*.

**Mutasi Aset Tetap OPD per 31 Desember 2022**

OPD	31 Desember 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	359.437.780.127,00	33.310.102.123,00	14.260.953.143,00	378.486.929.107,00
Dinas Kesehatan	214.014.944.522,00	19.347.031.672,00	11.594.422.012,00	221.767.554.182,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.581.454.435.929,00	268.378.677.935,00	2.293.336.560,00	1.847.539.777.304,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan	145.923.574.979,00	1.409.222.342,00	101.442.894.840,00	45.889.902.481,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

OPD	31 Desember 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.838.592.995,00	0,00	387.360.000,00	5.451.232.995,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	170.721.850,00	174.450.000,00	0,00	345.171.850,00
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.041.505.860,00	11.000.000,00	313.800.000,00	2.738.705.860,00
Dinas Pertanian dan Pangan	32.677.739.435,00	202.428.000,00	367.300.000,00	32.512.867.435,00
Dinas Lingkungan Hidup	30.676.945.759,00	5.059.969.992,00	1.528.170.618,00	34.208.745.133,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.132.644.898,00	343.724.004,00	392.751.625,00	4.083.617.277,00
Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.609.600.651,00	94.449.998,00	313.800.000,00	9.390.250.649,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	8.193.989.629,00	384.960.000,00	213.100.000,00	8.365.849.629,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	35.092.266.708,00	80.778.897,00	806.814.863,00	34.366.230.742,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	6.501.438.373,00	0,00	656.348.100,00	5.845.090.273,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	35.030.375.398,00	604.717.625,00	537.667.498,00	35.097.425.525,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17.276.510.663,00	832.957.297,00	0,00	18.109.467.960,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	9.802.866.713,00	0,00	453.123.250,00	9.349.743.463,00
Sekretariat Daerah	93.263.563.595,00	4.344.886.734,00	3.582.522.147,00	94.025.928.182,00
Sekretariat DPRD	20.463.648.852,00	4.261.455.170,00	1.010.400.500,00	23.714.703.522,00
Kecamatan Muntok	11.048.235.656,00	15.000.000,00	555.525.297,00	10.507.710.359,00
Kecamatan Simpang Teritip	5.338.872.334,00	0,00	183.904.500,00	5.154.967.834,00
Kecamatan Jebus	5.345.922.118,00	0,00	564.211.449,00	4.781.710.669,00
Kecamatan Kelapa	5.368.923.642,00	953.464.844,00	340.145.000,00	5.982.243.486,00
Kecamatan Tempilang	4.809.773.305,00	0,00	180.658.000,00	4.629.115.305,00
Kecamatan Parittiga	6.583.734.646,00	500.000,00	176.495.000,00	6.407.739.646,00
Inspektorat Daerah	2.530.941.192,00	0,00	598.315.000,00	1.932.626.192,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	6.248.704.079,00	22.000.000,00	383.550.000,00	5.887.154.079,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	6.647.122.346,00	267.678.497,00	455.200.600,00	6.459.600.243,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	5.990.187.343,00	0,00	284.800.000,00	5.705.387.343,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	13.033.425.865,00	0,00	538.850.982,00	12.494.574.883,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

OPD	31 Desember 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.550.355.161,00	0,00	326.300.000,00	1.224.055.161,00
BLUD	8.604.880.964,00	9.518.939.758,00	77.655.000,00	18.046.165.722,00
Pengelola	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.695.704.225.587,00</b>	<b>349.618.394.888,00</b>	<b>144.820.375.984,00</b>	<b>2.900.502.244.491,00</b>

### **Masa Manfaat Aset Tetap**

Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Bangka Barat menetapkan masa manfaat untuk aset tetap per jenis dan per sub aset tetap. Penetapan masa manfaat tersebut menjadi salah satu dasar dalam penghitungan penyusutan aset tetap.

### **Perbedaan Pencatatan Perolehan Aset Tetap**

Terkadang terdapat perbedaan pencatatan perolehan aset tetap yang terjadi antara unit keuangan dengan unit yang mengelola/mencatat aset, umumnya karena adanya pembulatan nilai pada biaya yang membentuk nilai perolehan aset tersebut. Untuk itu dilakukan rekonsiliasi nilai aset tetap antara Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD dengan Pejabat Pengurus Barang minimal per semester dalam rangka pencocokan nilai perolehan aset.

### **Kapitalisasi Aset Tetap**

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap sehingga siap pakai, untuk meningkatkan kualitas, kapasitas/efisien/ dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

### **Nilai Perolehan Minimum Aset tetap**

Nilai perolehan minimum aset tetap yang menjadi penentu apakah suatu aset tetap masuk ke dalam neraca atau tidak berlaku untuk aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya berupa buku, hewan/ternak dan tumbuhan. Sedangkan untuk aset tetap tanah, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian dan konstruksi dalam pengerjaan tidak memiliki nilai perolehan minimum, sehingga seluruh aset tetap tersebut dalam kondisi baik akan disajikan dalam neraca.

Nilai perolehan minimum aset tetap yang ditetapkan sesuai Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**Daftar Nilai Perolehan Minimum Aset Tetap**

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	500.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	500.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Perternakan	500.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00
2.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	500.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	500.000,00
2.9	Alat-alat Keamanan	500.000,00
2.10	Komputer	500.000,00
2.11	Alat Eksplorasi	500.000,00
2.12	Alat Pengeboran	500.000,00
2.13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	500.000,00
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	500.000,00
2.15	Alat Keselamatan Kerja	500.000,00
2.16	Alat Peraga	500.000,00
2.17	Peralatan Proses/Produksi	500.000,00
2.18	Rambu-Rambu	500.000,00
2.19	Peralatan Olahraga	500.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	10.000.000,00
3.2	Monumen	10.000.000,00
3.3	Bangunan Menara	10.000.000,00
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	0,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	0,00
4.3	Instalasi	0,00
4.4	Jaringan	0,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	0,00
5.3	Hewan	100.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
5.4	Biodata Perairan	0,00
5.5	Tanaman	100.000,00
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	0,00
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00

### **Pengeluaran Setelah Perolehan**

Pengeluaran belanja modal yang nilainya melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan sesuai Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengatur bahwa perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas mengubah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan, dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual, maka pengeluaran belanja modal tersebut harus dikapitalisasi.

Perbaikan meliputi:

1. Renovasi  
Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dan/atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas serta umur teknis.
2. Overhaul  
Overhaul adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, serta mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut :

1. Peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya minimum 10% dari harga perolehan;
2. Gedung dan bangunan yang nilainya minimum 25 % dari harga perolehan;
3. Jalan, irigasi, dan jaringan yang nilainya minimum 10% dari harga perolehan;
4. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Batas minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:

1. Pengadaan/pembelian tanah;
2. Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak, dan tumbuhan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah dilakukan kapitalisasi.

Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:

1. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
2. Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi.
3. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan dilakukan dengan berpedoman pada tabel Masa Manfaat Aset Tetap akibat Perbaikan.

### **Pencatatan Ekstra Komptabel**

Pencatatan Ekstra Komptabel adalah penatausahaan aset tetap untuk nilai aset tetap di bawah nilai minimal kapitalisasi atau aset tetap yang karena sifat, kondisi dan keberadaannya, tidak perlu dilaporkan dalam neraca.

Pencatatan Ekstra Komptabel dilakukan terhadap:

1. Aset tetap yang nilai perolehannya tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi;
2. Aset tak berwujud;
3. Aset yang secara permanen sudah dihentikan atau dilepas dari penggunaan aktif pemerintah karena rusak berat sehingga tidak bisa digunakan lagi secara normal dalam operasional dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang;
4. Aset yang dipinjamkaikan oleh instansi lain untuk jangka waktu tertentu;
5. Aset yang digunakan oleh instansi lain untuk tujuan akhir diserahkan; dan
6. Aset hilang/tidak diketahui keberadaannya.

Khusus untuk aset tak berwujud, dalam penatausahaan aset tetap dimasukkan ke dalam ekstra komptabel, namun di neraca disajikan sebagai aset tak berwujud dan dilakukan penghitungan amortisasinya.

#### **3.1.3.1 Tanah**

Aset tetap tanah merupakan tanah yang dikuasai dan dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Sedangkan tanah yang dikuasai namun dipergunakan oleh pihak lain diklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

#### **Penilaian Tanah**

Aset tetap tanah dinilai berdasarkan harga perolehannya. Biaya perolehan tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya pembebasan lahan, biaya *land clearing*, biaya terkait pengurusan atau



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

perolehan hak atau sertifikat tanah, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap digunakan.

**Nilai Tercatat Tanah**

Aset tanah tidak dilakukan penyusutan, sehingga nilai tercatat (*carrying amount*) aset tanah adalah sama dengan nilai perolehan aset tetap tanah.

**Nilai Batasan Kapitalisasi Tanah**

Aset tetap tanah tidak memiliki nilai batasan minimal kapitalisasi, sehingga seluruh nilai aset tetap tanah disajikan dalam neraca.

Mutasi bertambah dan berkurang terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 yang diakui sebagai aset tetap untuk golongan tanah adalah sebagai berikut:

<b>Realisasi Anggaran tahun 2022 (Rp)</b>		<b>0,00</b>
<b>Bertambah :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Pembulatan	0,00	
- Piutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	34.978.000,00	
- Belanja Barang dan Jasa	0,00	
<b>Jumlah bertambah (Rp)</b>		<b>34.978.000,00</b>
<b>Berkurang :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Belanja Barang dan Jasa	0,00	
- Pembulatan	0,00	
- Hutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	0,00	
- Hibah	0,00	
<b>Jumlah berkurang (Rp)</b>		<b>0,00</b>
<b>Aset di Bawah Kapitalisasi (Rp)</b>		<b>0,00</b>
<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Tanah Tahun 2022 (Rp)</b>		<b>34.978.000,00</b>

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp154.480.501.406,00 dan Rp147.855.803.217,00. Mutasi bertambah nilai aset tetap tanah sebesar Rp9.458.345.343,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp2.833.647.154,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Penjelasan mutasi aset tetap tanah adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2021 Audited (Rp)</b>		<b>147.855.803.217,00</b>
Mutasi Bertambah		
1.	Pengadaan/Belanja Modal	34.978.000,00
2.	Hibah	107.436.000,00
3.	Mutasi Antar OPD	2.805.722.520,00
4.	Koreksi Nilai	2.744.767.063,00
5.	Reklas Dari Persediaan	12.989.760,00
6.	Reklas	550.177.000,00
7.	Belum Tercatat	3.202.275.000,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>		<b>9.458.345.343,00</b>
Mutasi Berkurang		
1.	Dihapus	0,00
2.	Mutasi Antar OPD	2.805.722.520,00
3.	Koreksi Nilai/Persediaan	1,00
4.	Hibah	0,00
5.	Reklas	27.924.633,00
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>		<b>2.833.647.154,00</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2022 (Rp)</b>		<b>154.480.501.406,00</b>

Secara lebih rinci, mutasi penambahan aset tetap tanah per OPD adalah sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	10.948.115.497,00	166.350.000,00	27.924.634,00	11.086.540.863,00
Dinas Kesehatan	861.910.853,00	2.627.700.583,00	8.621.760,00	3.480.989.676,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	118.324.545.252,00	2.797.100.760,00	12.989.760,00	121.108.656.252,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	4.987.108.561,00	550.177.000,00	2.784.111.000,00	2.753.174.561,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian dan Pangan	274.696.905,00	0,00	0,00	274.696.905,00
Dinas Lingkungan Hidup	200.919.280,00	2.720.835.000,00	0,00	2.921.754.280,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

OPD	31 Desember 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Perlindungan Anak				
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.178.250.354,00	4.368.000,00	0,00	2.182.618.354,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.519.020.100,00	0,00	0,00	1.519.020.100,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.056.291.180,00	0,00	0,00	2.056.291.180,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	108.270.000,00	0,00	0,00	108.270.000,00
Sekretariat Daerah	4.687.244.361,00	0,00	0,00	4.687.244.361,00
Sekretariat DPRD	240.775.000,00	34.978.000,00	0,00	275.753.000,00
Kecamatan Muntok	579.015.560,00	0,00	0,00	579.015.560,00
Kecamatan Simpang Teritip	9.239.550,00	0,00	0,00	9.239.550,00
Kecamatan Jebus	440.061.560,00	0,00	0,00	440.061.560,00
Kecamatan Kelapa	46.714.644,00	556.836.000,00	0,00	603.550.644,00
Kecamatan Tempilang	303.854.560,00	0,00	0,00	303.854.560,00
Kecamatan Parittiga	89.770.000,00	0,00	0,00	89.770.000,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengelola	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>147.855.803.217,00</b>	<b>9.458.345.343,00</b>	<b>2.833.647.154,00</b>	<b>154.480.501.406,00</b>

Batas minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk pengadaan/pembelian tanah.

Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai. Peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah dilakukan kapitalisasi.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:

1. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
2. Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi.
3. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Pengakuan Tanah

1. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Terdapat tanah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat namun belum ada bukti kepemilikan yang sah karena berbagai kondisi yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat belum dapat mengurus bukti kepemilikan atas tanah-tanah tersebut.

Daftar Tanah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat namun belum ada bukti kepemilikan yang sah adalah sebagai berikut :

No	OPD	Alamat/ Lokasi	Tahun Perolehan	Ukuran	Harga (Rp)	Pengguna	Keterangan
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga						
	Sekolah di Kec. Jebus	Dusun Kampak, Kec. Jebus	1981	7.000 M <sup>2</sup>	35.000.000,00	SDN 16 JEBUS	Tanah tersebut berstatus Hutan Lindung
	Sekolah di Kec. Kelapa	Dusun Lagok, Desa Kacung				SDN 25 Kelapa	Merupakan tanah milik PT. Bumi Permai Lestari
		Dusun Suban, Desa Terentang				SDN 26 Kelapa	Merupakan tanah milik PT. Bumi Permai Lestari
	Sekolah di Kec. Parittiga	Desa Bakit	2021		1,00	SMPN 4 Parittiga	
2	Dinas Kesehatan						
	Puskesmas di Kec. Teritip	Desa Simpang Gong	2008	625 M <sup>2</sup>	3.125.000	Polindes Sp. Gong	Merupakan Tanah Desa Simpang Gong
		Desa Air Nyatoh		195 M	248.000	Polindes Air Nyatoh	Tanah tersebut diakui oleh masyarakat setempat
	Puskesmas Kec. Jebus	Dusun Rukam	1985	187 M	219.000	Pustu Rukam	Tanah tersebut diakui oleh masyarakat setempat
Desa Ketap			2008	385,80 M	1.929.000	Poskesdes Ketap	Merupakan tanah Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	OPD	Alamat/ Lokasi	Tahun Perolehan	Ukuran	Harga (Rp)	Pengguna	Keterangan
		Desa Sinar Manik	1982	450 M	2.250.000	Rumah Para Medis	Tanah tersebut diakui oleh masyarakat setempat
	Puskesmas di Kec. Parittiga	Dusun Penganak	2006	694,60 M	4.966.390	Pustu Air Gantang	Tanah tersebut berstatus Hutan Lindung
		Desa Cupat	1998	600 M	4.290.000	Polindes Cupat	Kawasan Pertambangan PT. Timah dan Hutan Produksi
		Desa Kapit	1988	375 M	1.875.000	Poskesdes Kapit	Merupakan tanah Desa
	Puskesmas di Kec. Tempilang	Desa Air Lintang	1978	162,40 M	812.000	Pustu Air Lintang	Merupakan tanah Desa
		Desa Buyan Kelumbi	1994	280,50 M	1.402.500	Poskesdes Buyan Kelumbi	Merupakan tanah Desa
		Desa Sangku	1996	300 M	1.500.000	Poskesdes Sangku	Merupakan tanah Desa
		Desa Simpang Yul	2000	197 M	689.500	Polindes Simpang Yul	Merupakan tanah Desa
		Desa Sinar Surya	2006	546 M	262.080	Polindes Sinar Surya	Merupakan tanah Desa
		Desa Tanjung Nyiur	2008	578 M	2.023.000	Poskesdes Tanjung Nyiur	Merupakan tanah Desa
		Dusun Buyan. Desa Buyan Kelumbi	2008	600 M	3.000.000	Poskesdes Buyan	Merupakan tanah Desa

2. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Daftar tanah milik Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang di atasnya dibangun oleh masyarakat tanpa persetujuan ataupun perjanjian hukum dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian BMD	Pemanfaatan	Perolehan	Subjek Pemakai Hasil Investigasi	Luas (m <sup>2</sup> )	OPD/Instansi	Harga Sewa yang Ditetapkan Tahun 2017 (Rp)	Lokasi	Keterangan
1.	Tanah Eks SDN 262	Sebagian Tanah untuk Bengkel dan Warung Kopi Kebun Nanas	P3D Bangka Induk Ke Bangka Barat Tahun 2003	Sdr.Muzakir	50	Pengelola	688.000,00	Jl. Hos Cokroaminot RT/RW. 01/02 Kampung Air Terjun Kel. Sungai Daeng	- Telah dilakukan investigasi Kepemilikan - Telah dilakukan Pengamanan Berupa Papan Nama Kepemilikan
2.	Tanah GOR	Sebagian Tanah untuk	Hibah PT Timah	Sdr.Arlan	84.5	Pengelola	3.317.000,00	GOR Jl. Jend.	- Telah dilakukan Pendekatan/Pe



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	Uraian BMD	Pemanfaatan	Perolehan	Subjek Pemakai Hasil Investigasi	Luas (m <sup>2</sup> )	OPD/ Instansi	Harga Sewa yang Ditetapkan Tahun 2017 (Rp)	Lokasi	Keterangan
	Muntok	Kantin GOR	Tahun 1998					Sudirman Kel. Sungai Daeng	mberitahuan secara lisan tentang penjelasan kepada subjek hukum yang memanfaatkan
3.	Tanah GOR Muntok	Sebagian Tanah untuk Billiard Center	Hibah PT Timah Tahun 1998	Sdr.Arlan	84,5	Pengelola	3.317.000,00	GOR Jl. Jend. Sudirman Kel. Sungai Daeng	BMD tanggal 15 November 2016 - Telah dilakukan Penilaian Sewa - Telah dilayangkan surat pemberitahuan 1, 2 dan terakhir Sewa BMD
									berisi himbawan mengajukan Pemanfaatan BMD Berupa Sewa
<b>Total</b>							<b>7.322.000,00</b>		

3. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sampai dengan Semester II Tahun 2020 tidak terdapat tanah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang sertifikat bukti kepemilikannya ganda.
4. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran asset, hibah/donasi, dan lain-lain. Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada neraca, dan sebagai pendapatan-LO, Perolehan tanah melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca.
5. Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah karena Pemerintah tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Sampai dengan 31 Desember



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

2022 tidak terdapat tanah wakaf yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Daftar Tanah yang sudah bersertifikat :

No	Nama OPD/Pengguna (pada sertifikat)	Luas (m <sup>2</sup> )	No Sertifikat	Tahun	Ket
1	Gedung DPRD	15.282	153	2011	
2	DISHUBPARINFORM	2.659	154	2011	DINKOMINFO
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.547	155	2011	
4	DISPERINDAGKOP dan UKM	3.076	156	2011	DKUP
5	Dinas Pekerjaan Umum	11.174	157	2011	DPUPR
6	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	5.742	158	2011	BPKAD
7	DIKPORA	5.677	159	2011	
8	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	3.814	160	2011	DISPARBUD
9	Gedung Kantor Arsip dan Perpustakaan	3.285	161	2011	
10	Ruang Terbuka Hijau dan Lapangan Upacara	29.261	169	2013	
11	Ruang Terbuka Hijau	8.559	172	2013	
12	Kantor Pengelolaan Hutan Produksi	2.820	177	2014	
13	Gedung Metrologi	3.111	186	2018	
14	Gedung Uji Kelayakan Kendaraan	4.032	187	2018	
<b>Total</b>		<b>101.039</b>			

Sedangkan tanah yang ditempati OPD lain belum bersertifikat.

Catatan:

1. OPD belum mencatat tanah pada masing-masing buku inventaris karena belum ada penyerahan dari Sekretariat Daerah;
2. Tanah yang belum bersertifikat karena tanah masih berstatus Hutan Lindung (HL), dan sekarang masih dalam proses permohonan pengalihan status tanah dari HL menjadi APL ke Pemerintah Pusat.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2018 dan tahun 2019 telah melakukan pengukuran kembali tanah kompleks pemda tersebut yang dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Tahap I pengukuran ulang dengan cara menggunakan drone dan tahap ini telah selesai dilakukan, sedangkan
2. Tahap II pengukuran ulang dengan cara memasang patok beton dan membuat titik GPS, masih dalam proses penyelesaian hingga terbitnya laporan keuangan ini.

Sehingga ukuran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pengukuran ulang belum dapat disajikan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Data Tanah yang bersertifikat dan tidak bersertifikat adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Bidang	Keterangan
Total Aset Tanah	1081	
Aset yang bersertifikat	267	s.d. 31 Desember 2022
Aset yang belum bersertifikat	814	625 bidang adalah aset tanah di bawah jalan

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menganggarkan dan melaksanakan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten Sub Kegiatan Tersediannya Data dan Sertifikat Aset Milik Pemerintah Daerah. Berdasarkan Sub Kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berhasil menerbitkan 78 bidang sertifikat tanah yang tercatat pada Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya masing-masing Organisasi Perangkat Daerah akan melakukan pemutakhiran atas nomor sertifikat berdasarkan sertifikat yang telah diterbitkan tersebut ke dalam aplikasi SIMDA BMD.

### 3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Aset tetap peralatan dan mesin dinilai berdasarkan harga perolehannya. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

#### Nilai Tercatat Peralatan dan Mesin

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap peralatan dan mesin adalah nilai buku aset tetap tersebut, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tersebut setelah dikurangi akumulasi penyusutannya.

#### Nilai Batasan Minimum Kapitalisasi Peralatan dan Mesin

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, nilai minimal kapitalisasi untuk aset peralatan dan mesin yaitu sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00.

#### Rincian dan Mutasi Peralatan dan Mesin

Mutasi bertambah dan berkurang terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 yang diakui sebagai aset tetap untuk golongan peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

<b>Realisasi Anggaran tahun 2022 (Rp)</b>		<b>30.522.088.004,00</b>
<b>Bertambah :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	14.096.796,00	
- Pembulatan	38,00	
- Piutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	985.485.824,00	
- Belanja Barang dan Jasa	1.403.956.326,00	
<b>Jumlah bertambah</b>		<b>2.403.538.984,00</b>
<b>Berkurang :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Belanja Barang dan Jasa	54.463.000,00	
- Pembulatan	186,00	
- Hutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	1.213.993.283,00	
- Hibah	0,00	
<b>Jumlah berkurang</b>		<b>1.268.456.469,00</b>
<b>Aset di Bawah Kapitalisasi</b>		<b>694.776.681,00</b>
<b>Aset Tak Berwujud</b>		<b>24.655.000,00</b>
<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 (Rp)</b>		<b>30.937.738.838,00</b>

Nilai aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp373.122.662.972,00 dan Rp354.844.136.624,00.

Mutasi bertambah nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp48.389.374.799,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp30.110.848.451,00.

**Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2021 (Rp)</b>		<b>354.844.136.624,00</b>
<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>		
1.	Pengadaan/Belanja Modal	30.937.738.838,00
2.	Hibah	1.650.591.991,00
3.	Mutasi Antar OPD	15.738.404.770,00
4.	Koreksi nilai/persediaan	0,00
5.	Reklas Dari Persediaan	0,00
6.	Reklas	12.148.800,00
7.	Belum Tercatat	50.490.400,00
	<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>48.389.374.799,00</b>
<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>		
1.	Penghapusan	11.611.735.250,00
2.	Mutasi Antar OPD	15.738.404.770,00
3.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

4.	Hibah	0,00	
5.	Reklas	2.760.708.431,00	
	<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>		<b>30.110.848.451,00</b>
	<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2022 (Rp)</b>		<b>373.122.662.972,00</b>

Secara lebih rinci, mutasi penambahan aset tetap peralatan dan mesin per OPD adalah sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	93.594.072.068,00	14.409.657.822,00	4.978.347.972,00	103.025.381.918,00
Dinas Kesehatan	109.050.370.911,00	13.618.203.489,00	9.960.133.902,00	112.708.440.498,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.600.177.039,00	1.508.608.433,00	198.800.000,00	9.909.985.472,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	16.821.568.174,00	10.310.000,00	1.341.167.410,00	15.490.710.764,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.028.329.195,00	0,00	387.360.000,00	4.640.969.195,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	170.721.850,00	174.450.000,00	0,00	345.171.850,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.639.474.985,00	11.000.000,00	313.800.000,00	1.336.674.985,00
Dinas Pertanian dan Pangan	10.457.239.948,00	3.700.000,00	367.300.000,00	10.093.639.948,00
Dinas Lingkungan Hidup	12.395.739.558,00	2.339.134.992,00	1.324.048.211,00	13.410.826.339,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.491.840.698,00	343.724.004,00	392.751.625,00	2.442.813.077,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.580.462.868,00	94.449.998,00	313.800.000,00	5.361.112.866,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.047.954.172,00	384.960.000,00	213.100.000,00	4.219.814.172,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

OPD	31 Desember 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	3.415.972.919,00	0,00	433.846.500,00	2.982.126.419,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.082.595.162,00	0,00	378.800.000,00	2.703.795.162,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.692.495.881,00	316.911.275,00	515.312.498,00	6.494.094.658,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.318.406.071,00	831.850.519,00	0,00	2.150.256.590,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	2.248.556.566,00	0,00	370.165.350,00	1.878.391.216,00
Sekretariat Daerah	26.528.110.722,00	3.591.345.750,00	3.205.751.655,00	26.913.704.817,00
Sekretariat DPRD	7.925.435.982,00	1.409.248.652,00	904.257.500,00	8.430.427.134,00
Kecamatan Muntok	1.726.150.949,00	15.000.000,00	555.525.297,00	1.185.625.652,00
Kecamatan Simpang Teritip	933.641.340,00	0,00	183.904.500,00	749.736.840,00
Kecamatan Jebus	1.923.994.562,00	0,00	488.361.449,00	1.435.633.113,00
Kecamatan Kelapa	1.745.983.799,00	73.975.338,00	340.145.000,00	1.479.814.137,00
Kecamatan Tempilang	927.077.747,00	0,00	180.658.000,00	746.419.747,00
Kecamatan Parittiga	1.487.310.299,00	500.000,00	176.495.000,00	1.311.315.299,00
Inspektorat Daerah	1.588.026.442,00	0,00	598.315.000,00	989.711.442,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	3.185.514.259,00	22.000.000,00	383.550.000,00	2.823.964.259,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.500.124.622,00	267.678.497,00	455.200.600,00	3.312.602.519,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	4.522.771.570,00	0,00	284.800.000,00	4.237.971.570,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.773.562.773,00	0,00	538.850.982,00	4.234.711.791,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	850.412.501,00	0,00	326.300.000,00	524.112.501,00
BLUD	6.590.040.992,00	8.962.666.030,00	0,00	15.552.707.022,00
<b>Total</b>	<b>354.844.136.624,00</b>	<b>48.389.374.799,00</b>	<b>30.110.848.451,00</b>	<b>373.122.662.972,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah dilakukan kapitalisasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap ditetapkan untuk peralatan dan mesin dan peralatan olahraga adalah yang nilainya minimum 10,00% dari harga perolehan.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya.

Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:

1. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
2. Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi.
3. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya.

Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah dilakukan kapitalisasi.

Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:

1. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
2. Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi.
3. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line*).



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Berikut nilai aset tetap peralatan dan mesin per OPD :

**Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin OPD  
Per 31 Desember 2022**

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Nilai Buku Aset Tetap Peralatan dan Mesin
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	103.025.381.918,00	73.365.110.150,00	29.660.271.768,00
Dinas Kesehatan	112.708.440.498,00	83.104.049.367,00	29.604.391.131,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.909.985.472,00	8.567.831.851,00	1.342.153.621,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	15.490.710.764,00	8.252.018.164,00	7.238.692.600,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.640.969.195,00	4.152.675.540,00	488.293.655,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	345.171.850,00	174.700.783,00	170.471.067,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.336.674.985,00	1.249.543.396,00	87.131.589,00
Dinas Pertanian dan Pangan	10.093.639.948,00	8.752.502.147,00	1.341.137.801,00
Dinas Lingkungan Hidup	13.410.826.339,00	10.490.089.231,00	2.920.737.108,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.442.813.077,00	1.415.499.972,00	1.027.313.105,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.361.112.866,00	4.258.080.550,00	1.103.032.316,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.219.814.172,00	3.408.566.781,00	811.247.391,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.982.126.419,00	2.804.378.191,00	177.748.228,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.703.795.162,00	2.561.184.698,00	142.610.464,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.494.094.658,00	6.006.009.212,00	488.085.446,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.150.256.590,00	1.287.215.151,00	863.041.439,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.878.391.216,00	1.834.301.906,00	44.089.310,00
Sekretariat Daerah	26.913.704.817,00	22.472.422.253,00	4.441.282.564,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Nilai Buku Aset Tetap Peralatan dan Mesin
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Sekretariat DPRD	8.430.427.134,00	6.112.106.259,00	2.318.320.875,00
Kecamatan Muntok	1.185.625.652,00	1.001.910.362,00	183.715.290,00
Kecamatan Simpang Teritip	749.736.840,00	735.805.175,00	13.931.665,00
Kecamatan Jebus	1.435.633.113,00	1.106.747.918,00	328.885.195,00
Kecamatan Kelapa	1.479.814.137,00	973.653.959,00	506.160.178,00
Kecamatan Tempilang	746.419.747,00	739.604.747,00	6.815.000,00
Kecamatan Parittiga	1.311.315.299,00	1.304.786.133,00	6.529.166,00
Inspektorat Daerah	989.711.442,00	989.711.442,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	2.823.964.259,00	2.712.392.500,00	111.571.759,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.312.602.519,00	2.945.761.622,00	366.840.897,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	4.237.971.570,00	4.055.255.868,00	182.715.702,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.234.711.791,00	3.825.731.485,00	408.980.306,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	524.112.501,00	522.312.501,00	1.800.000,00
BLUD	15.552.707.022,00	5.416.363.476,00	10.136.343.546,00
<b>Total</b>	<b>373.122.662.972,00</b>	<b>276.598.322.790,00</b>	<b>96.524.340.182,00</b>

### 3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Biaya Perolehan Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.

Nilai Tercatat Gedung dan Bangunan

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap gedung dan bangunan adalah nilai buku aset tetap tersebut, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tersebut setelah dikurangi akumulasi penyusutannya.

Nilai Batasan Minimum Kapitalisasi Gedung dan Bangunan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, nilai minimal kapitalisasi untuk gedung dan bangunan adalah sama dengan atau lebih Rp10.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Jika biaya perolehan per satuan gedung dan bangunan kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan, maka OPD mengakui/mencatat perolehan gedung dan bangunan sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak disajikan di dalam neraca, namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Mutasi bertambah dan berkurang terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 yang diakui sebagai aset tetap untuk golongan Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

<b>Realisasi Anggaran tahun 2022</b>		<b>23.708.809.580,03</b>
<b>Bertambah :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	104.250.540,00	
- Pembulatan	855,00	
- Piutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	96.962.000,00	
- Belanja Barang dan Jasa	74.475.300,00	
<b>Jumlah bertambah</b>		<b>275.688.695,00</b>
<b>Berkurang :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	129.698.337,03	
- Belanja Barang dan Jasa	12.513.506,00	
- Pembulatan	3,65	
- Hutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	11.249.949.535,35	
- Hibah	0,00	
<b>Jumlah berkurang</b>		<b>11.392.161.382,03</b>
<b>Aset di Bawah Kapitalisasi</b>		<b>20.300.000,00</b>
<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 (Rp)</b>		<b>12.572.036.893,00</b>

Rincian dan Mutasi Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap berupa gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp573.419.800.338,00 dan Rp553.459.363.614,00.

Mutasi bertambah nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp31.411.252.531,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp11.450.815.807,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Penjelasan mutasi aset tetap gedung dan bangunan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2021 (Rp)</b>			<b>553.459.363.614,00</b>
<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>			
1.	Pengadaan/Belanja Modal	12.572.036.893,00	
2.	Hibah	7.082.366.397,00	
3.	Mutasi Antar OPD	10.119.499.908,00	
4.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00	
5.	Reklas Dari Persediaan	0,00	
6.	Reklas	92.258.833,00	
7.	Belum Tercatat	1.545.090.500,00	
	<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>		<b>31.411.252.531,00</b>
<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>			
1.	Penghapusan	787.639.094,00	
2.	Mutasi Antar OPD	10.119.499.908,00	
3.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00	
4.	Hibah	0,00	
5.	Reklas	543.676.805,00	
	<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>		<b>11.450.815.807,00</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2022 (Rp)</b>			<b>573.419.800.338,00</b>

Secara lebih rinci, mutasi penambahan aset tetap gedung dan bangunan per OPD adalah sebagai berikut :

<b>OPD</b>	<b>31 Desember 2021 (Audited) (Rp)</b>	<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>	<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	241.573.522.237,00	17.267.476.851,00	8.618.511.271,00	250.222.487.817,00
Dinas Kesehatan	94.649.219.341,00	3.101.127.600,00	1.625.666.350,00	96.124.680.591,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.214.690.766,00	7.269.922.647,00	0,00	12.484.613.413,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	5.778.553.600,00	0,00	211.357.000,00	5.567.196.600,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	806.007.300,00	0,00	0,00	806.007.300,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

<b>OPD</b>	<b>31 Desember 2021 (Audited) (Rp)</b>	<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>	<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.285.078.050,00	0,00	0,00	1.285.078.050,00
Dinas Pertanian dan Pangan	10.679.414.132,00	0,00	0,00	10.679.414.132,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.951.383.646,00	0,00	204.122.407,00	6.747.261.239,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.545.224.200,00	0,00	0,00	1.545.224.200,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.131.389.741,00	0,00	0,00	3.131.389.741,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.534.594.600,00	0,00	0,00	1.534.594.600,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	28.223.063.331,00	74.475.300,00	372.968.363,00	27.924.570.268,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.355.162.086,00	0,00	0,00	2.355.162.086,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	19.096.367.357,00	0,00	0,00	19.096.367.357,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.026.446.857,00	0,00	0,00	13.026.446.857,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	4.408.068.355,00	0,00	0,00	4.408.068.355,00
Sekretariat Daerah	59.728.266.830,00	684.680.832,00	342.340.416,00	60.070.607.246,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

OPD	31 Desember 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Sekretariat DPRD	11.234.852.279,00	2.727.172.518,00	0,00	13.962.024.797,00
Kecamatan Muntok	6.492.637.147,00	0,00	0,00	6.492.637.147,00
Kecamatan Simpang Teritip	4.363.907.444,00	0,00	0,00	4.363.907.444,00
Kecamatan Jebus	2.811.165.996,00	0,00	75.850.000,00	2.735.315.996,00
Kecamatan Kelapa	2.911.401.667,00	204.122.407,00	0,00	3.115.524.074,00
Kecamatan Tempilang	3.520.707.548,00	0,00	0,00	3.520.707.548,00
Kecamatan Parittiga	4.779.747.847,00	0,00	0,00	4.779.747.847,00
Inspektorat Daerah	878.585.000,00	0,00	0,00	878.585.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	2.484.806.742,00	0,00	0,00	2.484.806.742,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	2.944.408.519,00	0,00	0,00	2.944.408.519,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.402.303.000,00	0,00	0,00	1.402.303.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.743.348.295,00	0,00	0,00	7.743.348.295,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	664.873.460,00	0,00	0,00	664.873.460,00
BLUD	1.240.166.241,00	82.274.376,00	0,00	1.322.440.617,00
<b>Total</b>	<b>553.459.363.614,00</b>	<b>31.411.252.531,00</b>	<b>11.450.815.807,00</b>	<b>573.419.800.338,00</b>

Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah dilakukan kapitalisasi.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap ditetapkan untuk gedung dan bangunan yang nilainya minimum 25,00% dari harga perolehan.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya.

Pengeluaranyang tidak dikapitalisasi terdiri dari:

1. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
2. Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi.
3. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Penyusutan aset tetap gedung dan bangunan dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line*).

Berikut nilai aset tetap gedung dan bangunan per OPD :

**Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan OPD  
Per 31 Desember 2022**

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rp)	Nilai Buku Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	250.222.487.817,00	68.922.783.247,00	181.299.704.570,00
Dinas Kesehatan	96.124.680.591,00	22.525.574.679,00	73.599.105.912,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.484.613.413,00	1.431.712.336,00	11.052.901.077,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	5.567.196.600,00	877.386.164,00	4.689.810.436,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	806.007.300,00	216.913.784,00	589.093.516,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.285.078.050,00	346.149.595,00	938.928.455,00
Dinas Pertanian dan Pangan	10.679.414.132,00	2.388.488.392,00	8.290.925.740,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.747.261.239,00	1.563.382.360,00	5.183.878.879,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.545.224.200,00	401.388.498,00	1.143.835.702,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rp)	Nilai Buku Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Rp)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.131.389.741,00	641.861.294,00	2.489.528.447,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.534.594.600,00	337.722.106,00	1.196.872.494,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	27.924.570.268,00	6.929.020.278,00	20.995.549.990,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.355.162.086,00	562.541.019,00	1.792.621.067,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	19.096.367.357,00	3.588.257.476,00	15.508.109.881,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.026.446.857,00	945.604.588,00	12.080.842.269,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	4.408.068.355,00	1.278.066.564,00	3.130.001.791,00
Sekretariat Daerah	60.070.607.246,00	12.085.117.821,00	47.985.489.425,00
Sekretariat DPRD	13.962.024.797,00	2.655.753.607,00	11.306.271.190,00
Kecamatan Muntok	6.492.637.147,00	1.247.379.738,00	5.245.257.409,00
Kecamatan Simpang Teritip	4.363.907.444,00	747.787.952,00	3.616.119.492,00
Kecamatan Jebus	2.735.315.996,00	956.703.424,00	1.778.612.572,00
Kecamatan Kelapa	3.115.524.074,00	1.178.014.246,00	1.937.509.828,00
Kecamatan Tempilang	3.520.707.548,00	1.033.688.825,00	2.487.018.723,00
Kecamatan Parititiga	4.779.747.847,00	733.610.582,00	4.046.137.265,00
Inspektorat Daerah	878.585.000,00	252.335.541,00	626.249.459,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	2.484.806.742,00	618.112.272,00	1.866.694.470,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	2.944.408.519,00	691.561.291,00	2.252.847.228,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	1.402.303.000,00	366.620.955,00	1.035.682.045,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.743.348.295,00	2.216.560.608,00	5.526.787.687,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	664.873.460,00	181.837.691,00	483.035.769,00
BLUD	1.322.440.617,00	99.616.003,00	1.222.824.614,00
<b>Total</b>	<b>573.419.800.338,00</b>	<b>138.021.552.936,00</b>	<b>435.398.247.402,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**3.1.3.4 Jalan,Irigasi dan Jaringan**

Biaya Perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap digunakan.

Nilai Batasan Minimum Kapitalisasi Jalan Irigasi dan Jaringan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, bahwa jalan, irigasi dan jaringan tidak memiliki nilai minimum kapitalisasi, sehingga seluruh jalan irigasi dan jaringan yang dalam kondisi baik dan digunakan dalam operasional disajikan di neraca.

Nilai Tercatat Jalan Irigasi dan Jaringan

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap jalan, irigasi dan jaringan adalah nilai buku aset tetap tersebut, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tersebut setelah dikurangi akumulasi penyusutannya.

Mutasi bertambah dan berkurang terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 yang diakui sebagai aset tetap untuk golongan Jalan Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

<b>Realisasi Anggaran tahun 2022</b>		<b>23.794.316.695,30</b>
<b>Bertambah :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	995.658,00	
- Pembulatan	0,70	
- Piutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	836.592.473,00	
- Belanja Barang dan Jasa	5.959.461.800,00	
<b>Jumlah bertambah</b>		<b>6.797.049.931,70</b>
<b>Berkurang :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Belanja Barang dan Jasa	6.160.000,00	
- Pembulatan	52,00	
- Hutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	0,00	
- Hibah	0,00	
<b>Jumlah berkurang</b>		<b>6.160.052,00</b>
<b>Aset di Bawah Kapitalisasi</b>		<b>0,00</b>
<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 (Rp)</b>		<b>30.585.206.575,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Rincian dan Mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan

Nilai aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.723.686.534.725,00 dan Rp1.574.623.240.771,00.

Mutasi bertambah nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp197.371.180.412,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp48.307.886.458,00.

Penjelasan mutasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2021 (Rp)</b>			<b>1.574.623.240.771,00</b>
<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>			
1.	Pengadaan/Belanja Modal	30.585.206.575,00	
2.	Hibah	118.461.237.379,00	
3.	Mutasi Antar OPD	48.307.886.458,00	
4.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00	
5.	Reklas Dari Persediaan	0,00	
6.	Reklas	16.850.000,00	
7.	Belum Tercatat	0,00	
	<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>		<b>197.371.180.412,00</b>
<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>			
1.	Dihapus	0,00	
2.	Mutasi Antar OPD	48.307.886.458,00	
3.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00	
4.	Hibah	0,00	
5.	Reklas	0,00	
	<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>		<b>48.307.886.458,00</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2022 (Rp)</b>			<b>1.723.686.534.725,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Secara lebih rinci, mutasi penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per OPD adalah sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3.126.691.173,00	1.280.267.532,00	628.543.766,00	3.778.414.939,00
Dinas Kesehatan	9.255.643.017,00	0,00	0,00	9.255.643.017,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.448.440.510.072,00	194.419.285.401,00	0,00	1.642.859.795.473,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	68.552.651.330,00	848.735.342,00	47.644.912.616,00	21.756.474.056,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	83.379.200,00	0,00	0,00	83.379.200,00
Dinas Pertanian dan Pangan	10.946.999.597,00	198.728.000,00	0,00	11.145.727.597,00
Dinas Lingkungan Hidup	11.127.386.075,00	0,00	0,00	11.127.386.075,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95.580.000,00	0,00	0,00	95.580.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	582.436.022,00	0,00	0,00	582.436.022,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.609.898.857,00	0,00	0,00	2.609.898.857,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.257.076.364,00	1.935.597,00	0,00	1.259.011.961,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	567.633.025,00	0,00	0,00	567.633.025,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.272.158.428,00	189.033.000,00	0,00	7.461.191.428,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	576.898.686,00	0,00	0,00	576.898.686,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	2.824.718.900,00	0,00	0,00	2.824.718.900,00
Sekretariat Daerah	2.223.781.914,00	68.860.152,00	34.430.076,00	2.258.211.990,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

OPD	31 Desember 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Sekretariat DPRD	745.991.341,00	90.056.000,00	0,00	836.047.341,00
Kecamatan Muntok	1.995.613.000,00	0,00	0,00	1.995.613.000,00
Kecamatan Simpang Teritip	28.500.000,00	0,00	0,00	28.500.000,00
Kecamatan Jebus	170.700.000,00	0,00	0,00	170.700.000,00
Kecamatan Kelapa	664.083.532,00	118.531.099,00	0,00	782.614.631,00
Kecamatan Tempilang	42.335.000,00	0,00	0,00	42.335.000,00
Kecamatan Parittiga	221.008.000,00	0,00	0,00	221.008.000,00
Inspektorat Daerah	54.540.250,00	0,00	0,00	54.540.250,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	174.391.000,00	0,00	0,00	174.391.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	190.283.800,00	0,00	0,00	190.283.800,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	58.995.673,00	0,00	0,00	58.995.673,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	503.658.947,00	0,00	0,00	503.658.947,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.069.200,00	0,00	0,00	35.069.200,00
BLUD	194.628.368,00	155.748.289,00	0,00	350.376.657,00
<b>Total</b>	<b>1.574.623.240.771,00</b>	<b>197.371.180.412,00</b>	<b>48.307.886.458,00</b>	<b>1.723.686.534.725,00</b>

Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah dilakukan kapitalisasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap ditetapkan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang nilainya minimum 10,00% dari harga perolehan.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya.

Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:

1. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
2. Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

3. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Penyusutan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line*).

Berikut nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per OPD :

**Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan OPD  
Per 31 Desember 2022**

<b>OPD</b>	<b>Nilai Bruto Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)</b>	<b>Nilai Bersih Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)</b>
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	3.778.414.939,00	1.017.087.891,00	2.761.327.048,00
Dinas Kesehatan	9.255.643.017,00	2.875.108.118,00	6.380.534.899,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.642.859.795.473,00	1.133.759.927.791,00	509.099.867.682,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	21.756.474.056,00	11.513.739.235,00	10.242.734.821,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	83.379.200,00	27.367.198,00	56.012.002,00
Dinas Pertanian dan Pangan	11.145.727.597,00	7.419.269.271,00	3.726.458.326,00
Dinas Lingkungan Hidup	11.127.386.075,00	7.949.403.997,00	3.177.982.078,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95.580.000,00	26.585.133,00	68.994.867,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	582.436.022,00	129.953.421,00	452.482.601,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.609.898.857,00	1.266.500.383,00	1.343.398.474,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.259.011.961,00	388.039.330,00	870.972.631,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	567.633.025,00	167.676.189,00	399.956.836,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Nilai Bersih Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.461.191.428,00	1.394.833.471,00	6.066.357.957,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	576.898.686,00	75.378.806,00	501.519.880,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	2.824.718.900,00	623.138.748,00	2.201.580.152,00
Sekretariat Daerah	2.258.211.990,00	893.853.979,00	1.364.358.011,00
Sekretariat DPRD	836.047.341,00	189.066.655,00	646.980.686,00
Kecamatan Muntok	1.995.613.000,00	711.484.528,00	1.284.128.472,00
Kecamatan Simpang Teritip	28.500.000,00	7.375.000,00	21.125.000,00
Kecamatan Jebus	170.700.000,00	25.265.909,00	145.434.091,00
Kecamatan Kelapa	782.614.631,00	162.654.676,00	619.959.955,00
Kecamatan Tempilang	42.335.000,00	19.282.886,00	23.052.114,00
Kecamatan Parittiga	221.008.000,00	148.283.058,00	72.724.942,00
Inspektorat Daerah	54.540.250,00	19.572.564,00	34.967.686,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	174.391.000,00	71.283.670,00	103.107.330,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	190.283.800,00	60.494.097,00	129.789.703,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	58.995.673,00	33.123.702,00	25.871.971,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	503.658.947,00	88.214.148,00	415.444.799,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.069.200,00	10.348.708,00	24.720.492,00
BLUD	350.376.657,00	24.751.286,00	325.625.371,00
<b>Total</b>	<b>1.723.686.534.725,00</b>	<b>1.171.099.063.848,00</b>	<b>552.587.470.877,00</b>

### 3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap Lainnya terdiri dari buku-buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya, aset tetap dalam renovasi.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap dipakai.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Nilai Batasan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya yang memiliki nilai minimum kapitalisasi adalah buku dan hewan/ternak dan tumbuhan, yaitu:

- Nilai batasan minimum kapitalisasi buku perpustakaan adalah Rp100.000,00;
- Nilai batasan minimum kapitalisasi barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga adalah Rp0,00;
- Nilai batasan minimum kapitalisasi hewan, ternak, tumbuhan pohon dan tumbuhan tanaman hias adalah Rp100.000,00.

Sehingga aset tetap lainnya berupa buku dan hewan/ternak dan tumbuhan yang melampaui nilai batasan minimum kapitalisasi dan dalam kondisi baik, akan disajikan dan dilaporkan di neraca. Sebaliknya, jika tidak melampaui nilai batasan minimal kapitalisasi ataupun dalam kondisi rusak berat, maka aset tetap tersebut tidak disajikan dalam neraca.

Sedangkan untuk aset tetap lainnya berupa alat kesenian/barang bercorak kesenian karena tidak memiliki nilai batasan minimal kapitalisasi, maka seluruh aset tetap tersebut jika dalam kondisi baik akan disajikan seluruhnya di neraca.

Nilai Tercatat aset tetap lainnya

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap lainnya adalah nilai buku aset tetap tersebut. yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya berupa buku perpustakaan. hewan dan tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Mutasi bertambah dan berkurang terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran yang diakui sebagai aset tetap untuk golongan Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Realisasi Anggaran tahun 2022		1.153.600.081,00
<b>Bertambah :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Pembulatan	0,00	
- Piutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	1.394.590.300,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

- Belanja Barang dan Jasa	630.000,00	
<b>Jumlah bertambah</b>		<b>1.395.220.300,00</b>
<b>Berkurang :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Belanja Barang dan Jasa	0,00	
- Pembulatan	0,00	
- Hutang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	116.927.000,00	
- Hibah	0,00	
<b>Jumlah berkurang</b>		<b>116.927.000,00</b>
<b>Aset di Bawah Kapitalisasi</b>		<b>1.927.292.400,00</b>
<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 (Rp)</b>		<b>504.600.981,00</b>

Rincian dan Mutasi aset tetap lainnya

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp13.874.803.006,00 dan Rp13.376.720.747,00.

Mutasi bertambah nilai aset tetap lainnya sebesar Rp505.707.759,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp7.625.500,00.

Penjelasan mutasi aset tetap lainnya adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2021(Rp)</b>			<b>13.376.720.747,00</b>
<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>			
1.	Pengadaan/Belanja Modal	504.600.981,00	
2.	Hibah	1.106.778,00	
3.	Mutasi Antar OPD	0,00	
4.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00	
5.	Reklas Dari Persediaan	0,00	
6.	Reklas	0,00	
7.	Belum Tercatat	0,00	
	<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>		<b>505.707.759,00</b>
<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>			
1.	Penghapusan	7.625.500,00	
2.	Mutasi Antar OPD	0,00	
3.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00	
4.	Hibah	0,00	
5.	Reklas	0,00	
	<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>		<b>7.625.500,00</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2022 (Rp)</b>			<b>13.874.803.006,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Rincian Aset Tetap Lainnya per rincian objek adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya	Nilai (Rp)
Bahan Perpustakaan	10.491.733.732,00
Barang Bercorak Kebudayaan/Kesenian	2.013.732.068,00
Hewan	246.000.000,00
Biota Perairan	32.799.992,00
Tanaman	0,00
Barang Koleksi Non Budaya	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	1.090.537.214,00
<b>Total</b>	<b>13.874.803.006,00</b>

Secara lebih rinci, mutasi penambahan aset tetap lainnya per OPD dengan rincian sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	10.195.379.152,00	186.349.918,00	7.625.500,00	10.374.103.570,00
Dinas Kesehatan	3.842.400,00	0,00	0,00	3.842.400,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	322.346.500,00	0,00	0,00	322.346.500,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.256.500,00	0,00	0,00	4.256.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	33.573.625,00	0,00	0,00	33.573.625,00
Dinas Pertanian dan Pangan	319.388.853,00	0,00	0,00	319.388.853,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.517.200,00	0,00	0,00	1.517.200,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan	315.312.020,00	0,00	0,00	315.312.020,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

OPD	31 Desember 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Perlindungan Anak				
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.542.000,00	0,00	0,00	1.542.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	17.903.740,00	0,00	0,00	17.903.740,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	218.500.000,00	00,0	0,00	218.500.000,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	274.383.632,00	0,00	0,00	274.383.632,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	298.467.869,00	1.106.778,00	0,00	299.574.647,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	35.244.992,00	0,00	0,00	35.244.992,00
Sekretariat Daerah	96.159.768,00	0,00	0,00	96.159.768,00
Sekretariat DPRD	10.612.250,00	0,00	0,00	10.612.250,00
Kecamatan Muntok	254.819.000,00	0,00	0,00	254.819.000,00
Kecamatan Simpang Teritip	3.584.000,00	0,00	0,00	3.584.000,00
Kecamatan Jebus	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kelapa	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
Kecamatan Tempilang	15.798.450,00	0,00	0,00	15.798.450,00
Kecamatan Parittiga	5.898.500,00	0,00	0,00	5.898.500,00
Inspektorat Daerah	9.789.500,00	0,00	0,00	9.789.500,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	403.992.078,00	0,00	0,00	403.992.078,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	12.305.405,00	0,00	0,00	12.305.405,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

OPD	31 Desember 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	6.117.100,00	0,00	0,00	6.117.100,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.855.850,00	0,00	0,00	12.855.850,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD	502.390.363,00	318.251.063,00	0,00	820.641.426,00
<b>Total</b>	<b>13.376.720.747,00</b>	<b>505.707.759,00</b>	<b>7.625.500,00</b>	<b>13.874.803.006,00</b>

Batas minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak, dan tumbuhan.

Aset tetap lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca. Aset tetap lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### 3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran atau belum mencapai 100,00% pengerjaannya (belum selesai/dilanjutkan tahun berikutnya).

#### Pengakuan KDP

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

#### Penilaian KDP

Nilai KDP menggambarkan jumlah akumulasi biaya yang telah dikeluarkan melalui belanja modal untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai akhir tahun pelaporan. Biaya tersebut merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi :



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

1. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
2. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
3. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
4. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Dan biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan konstruksi tertentu, antara lain:

1. Asuransi;
2. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
3. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya tersebut dialokasikan dengan metode yang sistematis, rasional dan konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.

#### Nilai Tercatat KDP

Karena aset tetap KDP tidak dihitung penyusutannya, maka nilai tercatat untuk aset tetap KDP adalah sama dengan nilai perolehan aset tetap tersebut, yaitu jumlah akumulasi biaya yang telah dikeluarkan melalui belanja modal untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai akhir tahun pelaporan.

Mutasi bertambah dan berkurang terhadap Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 yang diakui sebagai aset tetap untuk golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

<b>Realisasi Anggaran tahun 2022 (Rp)</b>		<b>0,00</b>
<b>Bertambah :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Pembulatan	0,65	
- Utang	4.543.668.258,00	
- Reklas Antar Golongan	9.232.261.221,35	
- Belanja Barang dan Jasa	107.068.550,00	
<b>Jumlah bertambah (Rp)</b>		<b>13.882.998.030,00</b>
<b>Berkurang :</b>		
- Belanja Pemeliharaan	0,00	
- Belanja Barang dan Jasa	0,00	
- Pembulatan	0,00	
- Utang	0,00	
- Reklas Antar Golongan	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

- Hibah	0,00	
<b>Jumlah berkurang (Rp)</b>		<b>0,00</b>
<b>Aset di Bawah Kapitalisasi (Rp)</b>		<b>0,00</b>
<b>Realisasi belanja yang dicatat sebagai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 (Rp)</b>		<b>13.882.998.030,00</b>

**Daftar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan  
Per 31 Desember 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		<b>61.176.726.694,00</b>
Bangunan Venue sport hall	2020	29.961.499.875,00
DED Sport Center	2012	463.812.500,00
Bangunan Stadion	2020	30.653.085.319,00
DED Jalan	2021	98.329.000,00
<b>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</b>		<b>252.368.350,00</b>
Masterplan (DED) Jalan, Landscape, dan Tempat Parkir Pantai Batu Rakit	2022	98.773.350,00
Landscape jalan setapak Gunung Menumbing	2018	7.130.000,00
Buku Pengetahuan Umum ( buku Penyusunan DED/SID Pariwisata batu rakit	2019	104.010.000,00
Jasa Kons tempat parkir di Menumbing	2020	15.670.000,00
Jasa Kons perencana turis information center (TIC)	2020	16.170.000,00
Jasa Kons Perencana Landscape Menumbing	2020	10.615.000,00
<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>		<b>95.050.000,00</b>
Tambatan Perahu Sungai Kampak Jebus	2014	25.050.000,00
Tambatan Perahu Sukal	2015	35.000.000,00
Tambatan Perahu Rambat	2015	35.000.000,00
<b>Dinas Kesehatan</b>		<b>193.958.000,00</b>
Rumah Sakit Pratama Kelapa (Master Plan)	2014	193.958.000,00
<b>Sekretariat DPRD</b>		<b>199.839.000,00</b>
Jasa Kons Perencana Rehab Gedung Kantor	2021	99.869.000,00
Jasa Kons Perencana Interior Gedung Kantor	2021	99.970.000,00
<b>Sub Total</b>		<b>61.917.942.044,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tetap dilanjutkan namun belum dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) karena pekerjaan konstruksi tersebut belum dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Nilai aset KDP yang tetap dilanjutkan sampai dengan Tahun 2022 sesuai dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/291.B/BPKAD/2022 tentang Verifikasi dan Klasifikasi Terhadap Barang Milik Daerah Golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Tercatat Dalam Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Bangka Barat senilai Rp768.910.500,00,00 dengan rincian per OPD adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun	Jumlah (Rp)
<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		<b>463.812.500,00</b>
DED Sport Center	2012	463.812.500,00
<b>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</b>		<b>111.140.000,00</b>
Landscape jalan setapak Gunung Menumbing	2018	7.130.000,00
Buku Pengetahuan Umum ( buku Penyusunan DED/SID Pariwisata batu rakit	2019	104.010.000,00
<b>Dinas Kesehatan</b>		<b>193.958.000,00</b>
Rumah Sakit Pratama Kelapa (Master Plan)	2014	193.958.000,00
<b>Sub Total</b>		<b>768.910.500,00</b>

Pada Tahun 2022, terdapat 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan belanja aset tetap yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran atau belum mencapai 100,00% pengerjaannya (belum selesai/dilanjutkan tahun berikutnya), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menganggarkan dan merealisasikan pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan Masterplan dan Review DED Pantai Batu Rakit berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 556/05/JKPM&RDED/SPK-PL/DISPARBUD/2022 tanggal 8 November 2022 dan telah direalisasikan dengan nilai Rp98.773.350,00 dengan jangka waktu pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender dan tanggal penyelesaian/serah terima 20 Desember 2022.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menganggarkan dan merealisasikan pekerjaan Pembangunan Sport Hall Lanjutan 2022-2023 (Multi Years) berdasarkan Surat Perjanjian Perubahan Pertama (SP-PP) Nomor



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

643.1/02.a.PSHL/SP-PPAPBD/BB/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 atas Surat Perjanjian (SP) Nomor 643.1/02.PSHL/PS/APBD/BB/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belanja yang telah direalisasikan adalah uang muka senilai Rp5.975.089.200,00 dengan Jaminan Uang Muka Nomor 1603.22.039.1.00162-2/00 serta Termyn I (5%) sebesar Rp1.991.696.400,00 dengan jangka waktu pelaksanaan mulai 03 Agustus 2022 selesai 20 Agustus 2023 dengan Jaminan Pelaksanaan Nomor 1602.22.039.4.00001-5/00.

#### **Mutasi KDP**

Mutasi KDP yang terjadi selama Tahun 2022 bertambah sebesar Rp62.482.534.044,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp52.109.552.614,00. Penjelasan mutasi aset tetap KDP adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2021 (Rp)</b>			<b>51.544.960.614,00</b>
<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>			
1.	Pengadaan/Belanja Modal	13.882.998.030,00	
2.	Hibah	0,00	
3.	Mutasi Antar OPD	48.599.536.014,00	
4.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00	
5.	Belum Tercatat	0,00	
6.	Reklas	0,00	
7.	Selain Pengadaan	0,00	
	<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>		<b>62.482.534.044,00</b>
<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>			
1.	Dihapus	2.739.536.800,00	
2.	Mutasi Antar OPD	48.599.536.014,00	
3.	Koreksi Nilai/Persediaan	0,00	
4.	Hibah	0,00	
5.	Reklas	770.479.800,00	
	<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>		<b>52.109.552.614,00</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2022 (Rp)</b>			<b>61.917.942.044,00</b>

#### **Mutasi Penambahan KDP**

Penambahan KDP di Tahun 2022 umumnya merupakan penambahan dari pengadaan aset tetap yang belum sempurna/selesai proses konstruksi maupun pengadaannya. Aset tetap yang belum selesai proses pembangunannya tersebut dikategorikan konstruksi dalam pengerjaan. Jika aset tetap tersebut sudah selesai proses pengadaannya, sudah diserahterimakan dan siap digunakan, maka aset tetap tersebut akan dipindahkan ke dalam golongan aset tetap sesuai golongan asetnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Mutasi Berkurang KDP

- Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Dalam hal barang milik daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah harus dilakukam penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar barang pengguna dan atau daftar barang Kuasa Pengguna. Nilai penghapusan aset KDP pada Tahun 2022 sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 188.4/189/BPKAD/2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan Dari Daftar Buku Inventaris Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 senilai Rp2.739.536.800,00 dengan rincian per OPD adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun	Jumlah (Rp)
<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		<b>1.937.727.000,00</b>
DED Gedung Serba Guna Kec. Muntok	2012	140.130.000,00
DED Penambahan Pasar Baru Muntok	2012	94.487.000,00
RP4D	2012	333.142.000,00
DED Kolong Retensi Menumbing	2012	437.032.000,00
DED Gedung PKK	2013	45.787.000,00
DED Rumah Dinas Bupati	2014	118.790.000,00
DED Rumah Dinas DPRD	2014	118.200.000,00
DED Ruang Terbuka Hijau	2014	93.527.000,00
DED Kota Pusaka Muntok	2014	361.300.000,00
SID Jaringan Irigasi Pangkal Beras	2015	48.865.000,00
SID Jaringan Irigasi Bukit Terak	2015	48.597.000,00
SID Potensi Banjir Kecamatan Muntok	2015	72.480.000,00
Jalan Pebuar-Pangkal Balok	2015	12.470.000,00
Jalan Pantai Desa Air Nyatoh	2015	12.920.000,00
<b>Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan</b>		<b>311.633.800,00</b>
DED Pembangunan Terminal B	2013	311.633.800,00
<b>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</b>		<b>22.355.000,00</b>
Pengadaan tanah sumur dewa dan makam	2014	22.355.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Uraian	Tahun	Jumlah (Rp)
<b>DPM Nakertrans</b>		<b>277.548.100,00</b>
DED Buku Laporan/Dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan	2012	221.333.100,00
DED Buku Laporan Identifikasi Kawasan Transmigrasi	2012	56.215.000,00
<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>		<b>82.957.900,00</b>
Pagar BBI	2015	77.957.900,00
Jasa Konsultan Perencana Pembangunan TPI Cupat	2019	5.000.000,00
<b>Sekretariat DPRD</b>		<b>29.660.000,00</b>
Jasa Konsultan Perencana Pembangunan Pagar	2016	19.760.000,00
Jasa Konsultan Perencana Koridor Gedung	2016	9.900.000,00
<b>BLUD</b>		<b>77.655.000,00</b>
DED Pagar RSUD	2016	20.460.000,00
DED Kantin RSUD	2016	10.395.000,00
Konsultan Perencana Gedung Poli	2018	46.800.000,00
<b>Sub Total</b>		<b>2.739.536.800,00</b>

- Reklas adalah perpindahan dari satu golongan aset ke golongan aset yang lain. KDP dapat dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria berikut :
  - o Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
  - o Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.Suatu KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan sudah diserahkan dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Nilai aset KDP yang direklas pada Tahun 2022 sesuai dengan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/291.B/BPKAD/2022 tentang Verifikasi dan Klasifikasi Terhadap Barang Milik Daerah Golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Tercatat Dalam Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Bangka Barat senilai Rp693.996.800,00,00 dengan rincian per OPD adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun	Jumlah (Rp)
<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		<b>143.819.800,00</b>
Jaringan irigasi Buyan – Kelumbi Kec. Tempilang	2014	126.969.800,00
Jalan TPA Air Belo Muntok	2014	16.850.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Uraian	Tahun	Jumlah (Rp)
<b>Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan</b>		<b>550.177.000,00</b>
Tanah Kosong (Konsultan Bantuan Jasa Penilai Publik)	2019	50.699.000,00
Pembersihan Lokasi Pelabuhan Terminal Tanjung Ular	2019	499.478.000,00
<b>Sub Total</b>		<b>693.996.800,00</b>

Rincian KDP per OPD Tahun 2022 sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	193.958.000,00	0,00	0,00	193.958.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	874.512.800,00	62.383.760.694,00	2.081.546.800,00	61.176.726.694,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	49.461.346.814,00	0,00	49.461.346.814,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	277.548.100,00	0,00	277.548.100,00	0,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	175.950.000,00	98.773.350,00	22.355.000,00	252.368.350,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

OPD	31 Desember 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	178.007.900,00	0,00	82.957.900,00	95.050.000,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	305.982.000,00	0,00	106.143.000,00	199.839.000,00
Kecamatan Muntok	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Simpang Teritip	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Jebus	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kelapa	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Tempilang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Parittiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
BLUD	77.655.000,00	0,00	77.655.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>51.544.960.614,00</b>	<b>62.482.534.044,00</b>	<b>52.109.552.614,00</b>	<b>61.917.942.044,00</b>

#### Penghentian KDP

Dalam beberapa kasus suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena tidak tersedianya dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca. Namun apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca.

#### 3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:

- a. peralatan dan mesin;
- b. gedung dan bangunan; dan
- c. jalan, irigasi, dan jaringan;

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- a. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tetap *Idle*;
- b. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan/atau telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk diproses TGR atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan untuk dilakukan penghapusan;
- d. Aset tetap yang direncanakan untuk dipindahtangankan; dan
- e. Aset Tetap berupa tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

#### **Metode dan Penghitungan Penyusutan Aset Tetap**

Metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah metode garis lurus dengan nilai residu adalah Rp0,00 (nol Rupiah). Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana. Metode garis lurus (*straight line method*) merupakan metode yang menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, bahwa perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan per tahun, namun karena sistem



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

pencatatan akrual dan aplikasi SIMDA BMD yang menggunakan metode per bulan dalam penghitungan dan pencatatan penyusutanaset tetap.

Masa manfaat aset tetap dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

Kode Barang					Uraian	Masa Manfaat(Tahun)
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>Golongan Peralatan Dan Mesin</b>	
1	3	2	01		Alat Besar	
1	3	2	01	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat-Alat Bantu	7
1	3	2	02		Alat Angkutan	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04		Alat Pertanian	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08		Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01	Unit Alar Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Kode Barang					Uraian	Masa Manfaat(Tahun)
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	Radiation Aplication And Non Destructive Testing Laboratory (Batam)	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumen	8
1	3	2	09		Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	3
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	3
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	5
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	5
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	7
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	7
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	7
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	7
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	
1	3	2	13	01	Sumur	7
1	3	2	13	02	Produksi	7
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	7
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	7
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	7
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	03	Alat SAR	5
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	5
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Kode Barang					Uraian	Masa Manfaat(Tahun)
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1	3	2	18		Rambu-Rambu	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>Golongan Gedung Dan Bangunan</b>	
1	3	3	01		Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	03		Bangunan Menara	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/ Pasti	
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			<b>Golongan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan</b>	
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	3	4	02		Bangunan Air	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/ Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03		Instalasi	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Kode Barang					Uraian	Masa Manfaat(Tahun)
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Intalasi Lain	20
1	3	4	04		Jaringan	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30

Perhitungan penyusutan dilakukan secara bulanan tanpa memperhitungkan tanggal perolehan pada bulan tersebut dan disajikan laporannya secara semesteran. Adapun rumus perhitungannya dipengaruhi oleh kondisi sebagai berikut :

- 1) Aset Tetap tanpa adanya kapitalisasi  
 Aset tetap tanpa adanya kapitalisasi disusutkan berdasarkan nilai perolehannya dibagi estimasi masa manfaat, tanpa memperhitungkan nilai sisa dengan contoh perhitungan sebagai berikut :

DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN  
 Sampai dengan 31-Des-2016

Bidang : Sekwan / DPRD  
 Unit Organisasi : Sekretariat Dewan  
 Sub Unit Organisasi : Sekretariat Dewan  
 UPB : Sekretariat Dewan

No	Kode Aset	No. Reg	Nama Aset	Masa Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Sisa Masa Manfaat		Akumulasi Penyusutan 1 Jan 2016 (Rp)	Penyusutan		Akumulasi Penyusutan 31 Des 2016 (Rp)	Nilai Buku (Rp)
						Thn	Bln		Semester I (Rp)	Semester II (Rp)		
1. Gedung dan Bangunan					6.000.000.000			650.000.000	60.000.000	60.000.000	770.000.000	5.230.000.000
1	1.11.1.1.1	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8/2010	6.000.000.000	43	7	650.000.000	60.000.000	60.000.000	770.000.000	5.230.000.000

	GEDUNG KANTOR	KETERANGAN
1	Nilai	<b>6.000.000.000,00</b>
2	Tanggal Perolehan	19 Agustus 2010
3	Masa Manfaat 50 Tahun (50 x 12 Bln) Agustus 2010 - Juli 2060	600 Bulan



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

	GEDUNG KANTOR	KETERANGAN
4	Penyusutan Perbulan (6.000.000.000/600 Bulan)	10.000.000,00
5	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2015 (65 Bulan)	65 Bulan
	- 19/08/2010 sd 31/12/2010 = 5 Bln	5 Bulan
	- 01/01/2011 sd 31/12/2015 = 60 Bln	60 Bulan
	65 Bulan x Rp.10.000.000	<b>650.000.000,00</b>
6	Penyusutan Tahun 2016 (12 Bulan)	
	- Semester 1 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000,00
	- Semester 2 = 6 Bulan x Rp10.000.000	60.000.000,00
7	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2016 (77 Bulan)	<b>770.000.000,00</b>
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2016	<b>5.230.000.000,00</b>
9	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2016 (600-77 Bulan)	<b>523 Bulan</b>
	- 43 Tahun = 43 x 12 Bln (sd 2059)	516 Bulan
	- 7 Bulan (di tahun 2060)	7 Bulan

Pada metode perhitungan diatas jumlah bulan penyusutan pada tahun 2010 hanya dihitung 5 bulan dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2010 dan tidak dihitung 12 bulan (1 tahun penuh) karena SIMDA BMD menggunakan perhitungan penyusutan aset berdasarkan model bulanan dan bukan menggunakan metode tahunan.

Untuk perhitungan penyusutan perbulan didapat dari nilai perolehan aset dibagi dengan masa manfaat aset sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan nilai penyusutan setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (Rp6.000.000.000,00/600 bulan).

Sehingga untuk penyusutan tahun 2016 semester I dan II adalah masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 (6 Bulan x Rp10.000.000,00) dengan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp770.000.000,00 dan nilai buku aset Rp5.230.000.000,00 (Rp6.000.000.000,00-Rp770.000.000,00) dengan nilai sisa manfaat 43 tahun dan 7 bulan atau 523 bulan.

2) Aset Tetap Dengan Kapitalisasi

Aset tetap yang dikapitalisasi memperhitungkan akumulasi dan nilai buku sebelum kapitalisasi dilakukan serta sisa manfaat aset dari aset awal ditambah dengan manfaat tambahan dari kapitalisasi yang dilakukan. Contoh



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

perhitungan aset tetap dengan kapitalisasi (renovasi) dapat disajikan sebagai berikut :

**DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN**  
 Sampai dengan 31-Des-2017

Bidang : Sekwan / DPRD  
 Unit Organisasi : Sekretariat Dewan  
 Sub Unit Organisasi : Sekretariat Dewan  
 UPB : Sekretariat Dewan

No	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2017	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Des 2017	NILAI BUKU
						Thn	Bln		Semester I	Semester II		
1. Gedung dan Bangunan					6.000.000.000			770.000.000	56.557.659	54.836.489	881.394.148	5.218.605.852
1	1.11.1.1.1	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8 2010	6.000.000.000	43	7	770.000.000	56.557.659	54.836.489	881.394.148	5.218.605.852

A	GEDUNG KANTOR	KETERANGAN
1	Nilai	<b>6.000.000.000,00</b>
2	Tanggal Perolehan	19 Agustus 2010
3	Masa Manfaat 50 Tahun (50 x 12 Bln) Agustus 2010 - Juli 2060	600 Bulan
4	Penyusutan Perbulan (6.000.000.000/600 Bulan)	10.000.000,00
5	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2015 (65 Bulan)	65 Bulan
	- 19/08/2010 sd 31/12/2010 = 5 Bln	5 Bulan
	- 01/01/2011 sd 31/12/2015 = 60 Bln	60 Bulan
	65 Bulan x 10.000.000	<b>650.000.000,00</b>
6	Penyusutan Tahun 2016 (12 Bulan)	
	- Semester 1 = 6 Bulan x 10.000.000	60.000.000,00
	- Semester 2 = 6 Bulan x 10.000.000	60.000.000,00
7	Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2016 (77 Bulan)	<b>770.000.000,00</b>
8	Nilai Buku Per 31 Desember 2016	<b>5.230.000.000,00</b>
9	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2016 (600-77 Bulan)	<b>523 Bulan</b>
	- 43 Tahun = 43 x 12 Bln (sd 2059)	516 Bulan
	- 7 Bulan (di tahun 2060)	7 Bulan

B	GEDUNG KANTOR (KAPITALISASI)	KETERANGAN
1	Nilai Kapitalisasi	100.000.000,00
2	Nilai Perolehan Setelah Kapitalisasi (A1+B1)	6.100.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

B	GEDUNG KANTOR (KAPITALISASI)	KETERANGAN
3	Tanggal Perolehan Kapitalisasi	01 Maret 2017
4	Tambahan Masa Manfaat Kapitalisasi 5 Tahun (5 x 12 Bulan)	60 Bulan
5	Nilai Disusutkan (NB 2016 + NKAPITALISASI-PENY 2 BLN 1 JAN -28 FEB ) A8 + B1-20.000.000	5.310.000.000,00
6	Sisa Masa Manfaat sd 01/03/2017 (TIDAK BOLEH LEBIH 600 BLN <=A3)	581
	- Masa 31 Desember 2016 sd 1 Maret 2017 (A9-2 BLN) 523 BLN-2 BLN	521
	- Tambahan Masa Kapitalisasi (B4)	60
7	Besarnya Penyusutan Perbulan di Tahun 2017	
	- Januari - Februari 2017 (2 Bulan) Menggunakan Penyusutan Awal Sebelum Kapitalisasi	10.000.000,00
	- Maret - Desember 2017 (10 Bulan) Menggunakan Penyusutan Kapitalisasi (B5/B6)	9.139.415,00
8	Penyusutan Tahun 2017	<b>111.394.148,00</b>
	- Semester I	56.557.659,00
	1 Jan 2017 - 28 Februari 2017 ( 2 Bln x 10.000.000 (B7)) = 20.000.000	
	1 Maret 2017 - 31 Desember 2017 ( 4 Bln x 9.139.415 (B7)) = 36.557.659	
	- Semester II = 6 Bulan x B 7 ( 6 Bulan x 9.139.415)	54.836.489,00
9	Akumulasi Penyusutan sd Per 31 Desember 2017 (A7 + B8)	881.394.148,00
10	Nilai Buku Per 31 Desember 2017	5.218.605.852,00
11	Sisa Masa Manfaat sd 31 Desember 2017 (A9+B4-12 Bulan)	571
	- 47 Tahun = 47 x 12 Bln (Sd Tahun 2064)	564
	- 7 Bulan (di tahun 2065)	7

Pada perhitungan di atas terlihat perbedaan perhitungan metode aset tanpa adanya kapitalisasi dengan metode kapitalisasi. Hal ini karena sudah memperhitungkan umur manfaat tambahan dari renovasi tanpa menambah masa manfaat aset melebihi selama 50 tahun (600 bulan) dalam contoh diatas setelah kapitalisasi masa manfaat aset tersebut menjadi 581 bulan.

Nilai aset yang akan disusutkan setelah penambahan biaya renovasi menjadi Rp5.310.000.000,00 per 1 Maret 2017 sehingga mulai Maret 2017 (penambahan biaya kapitalisasi tersebut dimulai sejak 1 Maret 2017) biaya penyusutan perbulan berubah yang awal Rp10.000.000,00 menjadi Rp9.139.415,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Akumulasi Penyusutan sampai dengan Per 31 Desember 2017 (A7 + B8) menjadi Rp881.394.148,00. Sehingga Nilai Buku Per 31 Desember 2017 menjadi Rp5.218.605.852,00 dengan Sisa Masa Manfaat sampai dengan 31 Desember 2017 (A9+B4-12 Bulan) tersisa 47 tahun 7 Bulan atau sama dengan 571 bulan.

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per Organisasi/Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap OPD**  
**Per 31 Desember 2022**

<b>OPD</b>	<b>Nilai Bruto Aset Tetap (Rp)</b>	<b>Akumulasi Penyusutan (Rp)</b>	<b>Nilai Bersih Aset Tetap (Rp)</b>
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	378.486.929.107,00	143.304.981.288,00	235.181.947.819,00
Dinas Kesehatan	221.767.554.182,00	108.504.732.164,00	113.262.822.018,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.847.539.777.304,00	1.143.759.471.978,00	703.780.305.326,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	45.889.902.481,00	20.643.143.563,00	25.246.758.918,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.451.232.995,00	4.369.589.324,00	1.081.643.671,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	345.171.850,00	174.700.783,00	170.471.067,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	2.738.705.860,00	1.623.060.189,00	1.115.645.671,00
Dinas Pertanian dan Pangan	32.512.867.435,00	18.560.259.810,00	13.952.607.625,00
Dinas Lingkungan Hidup	34.208.745.133,00	20.002.875.588,00	14.205.869.545,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.083.617.277,00	1.843.473.603,00	2.240.143.674,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.390.250.649,00	5.029.895.265,00	4.360.355.384,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	8.365.849.629,00	5.012.789.270,00	3.353.060.359,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	34.366.230.742,00	10.121.437.799,00	24.244.792.943,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5.845.090.273,00	3.291.401.906,00	2.553.688.367,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

OPD	Nilai Bruto Aset Tetap (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Bersih Aset Tetap (Rp)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	35.097.425.525,00	10.989.100.159,00	24.108.325.366,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18.109.467.960,00	2.308.198.545,00	15.801.269.415,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	9.349.743.463,00	3.735.507.218,00	5.614.236.245,00
Sekretariat Daerah	94.025.928.182,00	35.451.394.053,00	58.574.534.129,00
Sekretariat DPRD	23.714.703.522,00	8.956.926.521,00	14.757.777.001,00
Kecamatan Muntok	10.507.710.359,00	2.960.774.628,00	7.546.935.731,00
Kecamatan Simpang Teritip	5.154.967.834,00	1.490.968.127,00	3.663.999.707,00
Kecamatan Jebus	4.781.710.669,00	2.088.717.251,00	2.692.993.418,00
Kecamatan Kelapa	5.982.243.486,00	2.314.322.881,00	3.667.920.605,00
Kecamatan Tempilang	4.629.115.305,00	1.792.576.458,00	2.836.538.847,00
Kecamatan Parittiga	6.407.739.646,00	2.186.679.773,00	4.221.059.873,00
Inspektorat Daerah	1.932.626.192,00	1.261.619.547,00	671.006.645,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	5.887.154.079,00	3.401.788.442,00	2.485.365.637,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	6.459.600.243,00	3.697.817.010,00	2.761.783.233,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	5.705.387.343,00	4.455.000.525,00	1.250.386.818,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.494.574.883,00	6.130.506.241,00	6.364.068.642,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.224.055.161,00	714.498.900,00	509.556.261,00
BLUD	18.046.165.722,00	5.540.730.765,00	12.505.434.957,00
<b>Total</b>	<b>2.900.502.244.491,00</b>	<b>1.585.718.939.574,00</b>	<b>1.314.783.304.917,00</b>

**Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.585.718.939.574,00 dan Rp1.497.561.744.470,00.

Penjelasan mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah sebagai berikut :

Saldo Akhir per 31 Desember 2021 (Rp)			1.497.561.744.470,00
<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>			
1.	Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022	99.335.191.003,00	
2.	Beban Penyusutan Reklas/Hapus	8.964.131,00	
3.	Hibah	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

4.	Mutasi Antar OPD	14.907.294.175,00	
5.	Koreksi Akumulasi	3.471.816.162,00	
6.	Belum Tercatat	0,00	
7.	Reklas	0,00	
8.	Kapitalisasi Aset	0,00	
	<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>		<b>117.723.265.471,00</b>
<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>			
1.	Dihapus	11.711.542.045,00	
2.	Mutasi Antar OPD	14.907.294.175,00	
3.	Koreksi Akumulasi	54.526.996,00	
4.	Hibah	0,00	
5.	Reklas	2.892.707.151,00	
	<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>		<b>29.566.070.367,00</b>
	<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2022 (Rp)</b>		<b>1.585.718.939.574,00</b>

Rincian mutasi bertambah dan berkurang akumulasi penyusutan aset tetap per OPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	129.297.326.378,00	15.244.541.313,00	1.236.886.403,00	143.304.981.288,00
Dinas Kesehatan	101.322.318.933,00	10.500.781.634,00	3.318.368.403,00	108.504.732.164,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.070.799.665.777,00	73.158.606.201,00	198.800.000,00	1.143.759.471.978,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	30.007.260.341,00	2.666.112.677,00	12.030.229.455,00	20.643.143.563,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.308.153.643,00	448.795.681,00	387.360.000,00	4.369.589.324,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	170.721.850,00	3.978.933,00	0,00	174.700.783,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.882.189.762,00	54.670.427,00	313.800.000,00	1.623.060.189,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

<b>OPD</b>	<b>31 Desember 2021 (Audited) (Rp)</b>	<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>	<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
Dinas Pertanian dan Pangan	17.489.692.836,00	1.437.866.974,00	367.300.000,00	18.560.259.810,00
Dinas Lingkungan Hidup	20.042.161.659,00	1.205.426.970,00	1.244.713.041,00	20.002.875.588,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.862.444.987,00	373.780.241,00	392.751.625,00	1.843.473.603,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.873.765.355,00	469.929.910,00	313.800.000,00	5.029.895.265,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.551.503.097,00	674.386.173,00	213.100.000,00	5.012.789.270,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	9.772.560.452,00	782.723.847,00	433.846.500,00	10.121.437.799,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.522.755.032,00	147.446.874,00	378.800.000,00	3.291.401.906,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	10.381.321.825,00	1.123.090.832,00	515.312.498,00	10.989.100.159,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.949.909.521,00	358.289.024,00	0,00	2.308.198.545,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	3.911.273.698,00	194.398.870,00	370.165.350,00	3.735.507.218,00
Sekretariat Daerah	32.813.097.334,00	5.051.008.374,00	2.412.711.655,00	35.451.394.053,00
Sekretariat DPRD	9.140.790.526,00	720.393.495,00	904.257.500,00	8.956.926.521,00
Kecamatan Muntok	3.052.708.770,00	460.216.155,00	552.150.297,00	2.960.774.628,00
Kecamatan Simpang Teritip	1.549.037.905,00	125.834.722,00	183.904.500,00	1.490.968.127,00
Kecamatan Jebus	2.454.565.197,00	161.160.731,00	527.008.677,00	2.088.717.251,00
Kecamatan Kelapa	2.261.412.493,00	379.545.269,00	326.634.881,00	2.314.322.881,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

OPD	31 Desember 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kecamatan Tempilang	1.883.342.505,00	89.891.953,00	180.658.000,00	1.792.576.458,00
Kecamatan Parittiga	2.240.439.838,00	122.734.935,00	176.495.000,00	2.186.679.773,00
Inspektorat Daerah	1.806.522.599,00	53.411.948,00	598.315.000,00	1.261.619.547,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	3.647.823.178,00	137.515.264,00	383.550.000,00	3.401.788.442,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.967.950.165,00	185.067.445,00	455.200.600,00	3.697.817.010,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	4.583.269.031,00	156.531.494,00	284.800.000,00	4.455.000.525,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.325.747.849,00	343.609.374,00	538.850.982,00	6.130.506.241,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.021.710.332,00	19.088.568,00	326.300.000,00	714.498.900,00
BLUD	4.668.301.602,00	872.429.163,00	0,00	5.540.730.765,00
<b>Total</b>	<b>1.497.561.744.470,00</b>	<b>117.723.265.471,00</b>	<b>29.566.070.367,00</b>	<b>1.585.718.939.574,00</b>

Aset Tetap Bernilai Buku Rp0,00 (Nol Rupiah)

Aset tetap yang sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0,00 (Nol Rupiah). Namun secara teknis aset itu dalam kondisi baik dan masih dapat dimanfaatkan, oleh karena itu aset tetap tersebut masih tetap dicatat dan disajikan dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dilaporkan dalam neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya. Berikut rincian data aset tetap yang bernilai buku Rp0,00 (Nol Rupiah):

OPD	Nilai Perolehan Aset Tetap yang Bernilai Buku Nol Rupiah (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	54.319.302.090,00
Dinas Kesehatan	69.947.254.175,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	825.369.387.703,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

<b>OPD</b>	<b>Nilai Perolehan Aset Tetap yang Bernilai Buku Nol Rupiah (Rp)</b>
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	6.395.901.148,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.758.177.572,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	170.721.850,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.202.989.485,00
Dinas Pertanian dan Pangan	10.170.943.240,00
Dinas Lingkungan Hidup	13.251.889.261,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	404.100.520,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.233.662.175,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.514.072.713,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.196.286.326,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.342.359.673,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.564.565.706,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.103.910.871,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.777.810.661,00
Sekretariat Daerah	17.022.850.618,00
Sekretariat DPRD	5.050.265.303,00
Kecamatan Muntok	1.185.761.746,00
Kecamatan Simpang Teritip	684.036.840,00
Kecamatan Jebus	848.571.844,00
Kecamatan Kelapa	516.361.300,00
Kecamatan Tempilang	714.719.747,00
Kecamatan Parittiga	1.266.815.299,00
Inspektorat Daerah	989.711.442,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pembangunan Daerah	2.421.723.883,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	2.583.487.988,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	3.610.238.230,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.395.789.324,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	506.112.501,00
BLUD	3.465.730.253,00
<b>Total</b>	<b>1.045.985.511.487,00</b>

Jika aset tetap tersebut dalam kondisi rusak berat.maka aset tetap tersebut dilaporkan dalam aset lainnya. Aset tetap dalam kondisi nilai bukunya menjadi Rp0,00 (Nol Rupiah) dapat dilakukan penghapusannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Aset Bernilai di Bawah Kapitalisasi

Terdapat Aset di Bawah Kapitalisasi Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

<b>OPD</b>	<b>Nilai Aset Di Bawah Kapitalisasi (Rp)</b>
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	74.141.840.644,00
Dinas Kesehatan	2.559.970.248,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68.304.975,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	1.170.167.400,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	62.475.834,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	81.149.407,00
Dinas Pertanian dan Pangan	238.589.483,00
Dinas Lingkungan Hidup	396.399.420,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.342.762,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	137.471.187,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	226.022.957,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	269.522.758,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	115.196.224,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	310.981.179,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	896.423.851,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	54.021.929,00
Sekretariat Daerah	457.001.128,00
Sekretariat DPRD	311.252.271,00
Kecamatan Muntok	214.555.627,00
Kecamatan Simpang Teritip	86.437.624,00
Kecamatan Jebus	67.019.766,00
Kecamatan Kelapa	273.489.425,00
Kecamatan Tempilang	60.522.452,00
Kecamatan Parittiga	45.681.500,00
Inspektorat Daerah	68.574.586,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	183.838.391,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	49.425.667,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	84.616.822,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

OPD	Nilai Aset Di Bawah Kapitalisasi (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	361.146.316,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	151.136.884,00
BLUD	354.617.757,00
<b>Total</b>	<b>83.515.196.474,00</b>

### 3.1.5 Aset Lainnya

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, bahwa suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tersebut sudah tidak memenuhi definisi aset tetap sehingga harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset tetap dimaksud adalah aset tetap yang memiliki kondisi rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan dan penyertaan modal).

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

**Aset Lainnya**  
**Per 31 Desember 2022**

Keterangan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi	2.436.178.391,15	2.613.077.591,15
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	4.172.142.675,00	4.147.487.675,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(4.119.091.274,00)	(4.068.556.996,00)
Aset Lain-lain	240.335.063.233,00	131.533.106.287,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(49.815.133.179,00)	(44.316.871.865,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Keterangan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	143.944,00	209.944,00
<b>Total</b>	<b>193.009.303.790,15</b>	<b>89.908.452.636,15</b>

### 3.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Tagihan Penjualan Angsuran.

### 3.1.5.2 Tuntutan Perbendaharaan

Tuntutan perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

### 3.1.5.3 Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp2.436.178.391,15 yang terdapat pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason.

Mutasi saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022:

<b>Saldo Tahun 2021 (Rp)</b>		<b>2.613.077.591,15</b>
Sdr. Yudi Widyansyah (Rp)	2.415.203.380,15	
Sdr. Armus H (Rp)	141.899.200,00	
Sdr. Erik Juanda (Rp)	55.975.011,00	
Bertambah :		
<b>Jumlah bertambah (Rp)</b>		<b>0,00</b>
Berkurang :		
Pelunasan TGR Yudi Widyansyah Tahun 2022(Rp)	35.000.000,00	
Pelunasan TGR Armus Tahun 2022(Rp)	141.899.200,00	
<b>Jumlah berkurang (Rp)</b>		<b>176.899.200,00</b>
<b>Saldo Tahun 2022 (Rp)</b>		<b>2.436.178.391,15</b>
Sdr. Yudi Widyansyah(Rp)	2.380.203.380,15	
Sdr. Armus H(Rp)	0,00	
Sdr. Erik Juanda(Rp)	55.975.011,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**3.1.5.4 Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

**3.1.5.5 Aset Tak Berwujud**

Aset tak berwujud merupakan aset yang berupa aplikasi/*software* tertentu atau aplikasi/*software* khusus yang masih digunakan untuk menunjang kerja pegawai, sedangkan aplikasi/*software* yang tidak digunakan lagi diklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Khusus untuk aset tak berwujud, dalam penatausahaan aset tetap dimasukkan ke dalam ekstra komptabelnamun di neraca disajikan sebagai aset tak berwujud dan dilakukan penghitungan amortisasinya.

Mutasi Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.172.142.675,00 dan Rp4.147.487.675,00.

Rincian mutasi aset tak berwujud adalah sebagai berikut :

No	OPD	31 Desember 2021 Audited (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	218.221.000,00	0,00	0,00	218.221.000,00
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	0,00	24.655.000,00	0,00	24.655.000,00
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.242.835.743,00	0,00	0,00	2.242.835.743,00
4.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	10.191.185,00	0,00	0,00	10.191.185,00
5.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	418.165.000,00	0,00	0,00	418.165.000,00
6.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	68.078.925,00	0,00	0,00	68.078.925,00
7.	Sekretariat DPRD	38.919.100,00	0,00	0,00	38.919.100,00
8.	Kecamatan Muntok	85.785.000,00	0,00	0,00	85.785.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	OPD	31 Desember 2021 Audited (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
9.	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	62.200.000,00	0,00	0,00	62.200.000,00
10.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	375.421.722,00	0,00	0,00	375.421.722,00
11.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	284.850.000,00	0,00	0,00	284.850.000,00
12.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	216.320.000,00	0,00	0,00	216.320.000,00
13.	BLUD	126.500.000,00	0,00	0,00	126.500.000,00
	<b>Total</b>	<b>4.147.487.675,00</b>	<b>24.655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172.142.675,00</b>

### 3.1.5.5 Amortisasi Aset Tak Berwujud

Metode dan Penghitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud

Metode amortisasi aset tak berwujud yang digunakan adalah metode garis lurus dengan nilai residu adalah Rp0,00 (Nol Rupiah).

Metode garis lurus (*straight line method*) merupakan metode yang menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bahwa perhitungan dan pencatatan amortisasi aset tak berwujud dilakukan per tahun.

Formula besaran persentase amortisasi per bulan adalah:

Persentase amortisasi per bulan =  $\frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{Masa Manfaat}} : 12$

Berikut daftar Aset tidak berwujud, akumulasi amortisasidan nilai buku aset tak berwujud Kabupaten Bangka Barat per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	OPD	Aset Tidak Berwujud (Rp)	Akumulasi Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	218.221.000,00	218.221.000,00	0,00
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	24.655.000,00	1.232.750,00	23.422.250,00
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.242.835.743,00	2.227.985.743,00	14.850.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	OPD	Aset Tidak Berwujud (Rp)	Akumulasi Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
4.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	10.191.185,00	10.191.185,00	0,00
5.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	418.165.000,00	418.165.000,00	0,00
6.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	68.078.925,00	66.353.940,00	1.724.985,00
7.	Sekretariat DPRD	38.919.100,00	38.919.100,00	0,00
8.	Kecamatan Muntok	85.785.000,00	81.201.667,00	4.583.333,00
9.	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	62.200.000,00	62.200.000,00	0,00
10.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	375.421.722,00	375.421.722,00	0,00
11.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	284.850.000,00	276.379.167,00	8.470.833,00
12.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	216.320.000,00	216.320.000,00	0,00
13.	BLUD	126.500.000,00	126.500.000,00	0,00
<b>Total</b>		<b>4.172.142.675,00</b>	<b>4.119.091.274,00</b>	<b>53.051.401,00</b>

### 3.1.5.7 Aset Lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang dimiliki oleh pemerintah daerah yaitu :

- a. secara permanen sudah dihentikan atau dilepas dari penggunaan aktif pemerintah karena rusak berat sehingga tidak bisa digunakan lagi secara normal dalam operasional dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang,
- b. dipinjamkaikan oleh instansi lain untuk jangka waktu tertentu,
- c. digunakan oleh instansi lain untuk tujuan akhir diserahkan,
- d. aset hilang/tidak diketahui keberadaannya, dan
- e. kerugian daerah yang belum ditetapkan sebagai tuntutan perbendaharaan.

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pada neraca per 31 Desember 2022 disajikan aset lain-lain sebesar Rp240.335.063.233,00 berupa aset rusak berat, aset *idle* atau aset yang belum dimanfaatkan oleh OPD lain yang dikelola oleh Pengelola Barang, dan aset yang dipinjamkaikan/dimanfaatkan oleh instansi lain untuk jangka waktu tertentu dan kerugian daerah yang disebabkan oleh bendahara yang belum ditetapkan sebagai tuntutan perbendaharaan.

Rincian Aset lain-lain adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

OPD	Rusak Berat (Rp)	Dimanfaatkan Pihak Lain (Rp)	AsetIdle (Rp)	Kerugian Daerah (Rp)	Treasury Deposit Facility
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	7.469.477.890,00	0,00	0,00	0,00	
Dinas Kesehatan	11.619.346.038,00	0,00	0,00	0,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.597.520.760,00	50.873.403.654,00	0,00	0,00	
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	90.915.000,00	0,00	0,00	0,00	
Satuan Polisi Pamong Praja	391.840.156,00	0,00	0,00	0,00	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.353.070.586,00	0,00	0,00	0,00	
Dinas Pertanian dan Pangan	881.311.217,00	0,00	0,00	0,00	
Dinas Lingkungan Hidup	621.144.645,00	0,00	0,00	0,00	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	585.848.900,00	0,00	0,00	0,00	
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	119.687.592,00	0,00	0,00	0,00	
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.414.607.098,00	0,00	0,00	0,00	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	269.772.703,00	0,00	0,00	0,00	
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.068.306.602,00	0,00	0,00	0,00	
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	223.259.755,00	0,00	0,00	0,00	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	511.583.166,00	0,00	0,00	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

OPD	Rusak Berat (Rp)	Dimanfaatkan Pihak Lain (Rp)	Aset Idle (Rp)	Kerugian Daerah (Rp)	Treasury Deposit Facility
Dinas Kelautan dan Perikanan	114.482.080,00	0,00	0,00	0,00	
Sekretariat Daerah	1.135.130.327,00	2.490.892.170,00	0,00	0,00	
Sekretariat DPRD	450.090.424,00	0,00	0,00	0,00	
Kecamatan Muntok	954.289.540,00	0,00	0,00	0,00	
Kecamatan Simpang Teritip	114.654.398,00	0,00	0,00	0,00	
Kecamatan Jebus	278.786.949,00	0,00	0,00	0,00	
Kecamatan Kelapa	496.146.000,00	193.370.000,00	0,00	0,00	
Kecamatan Tempilang	133.979.315,00	0,00	0,00	0,00	
Kecamatan Parittiga	216.033.000,00	0,00	0,00	0,00	
Inspektorat	171.622.267,00	0,00	0,00	0,00	
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	570.435.927,00	0,00	0,00	0,00	
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	532.366.950,00	0,00	0,00	0,00	
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	372.439.240,00	0,00	0,00	0,00	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	323.769.590,00	0,00	0,00	0,00	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	380.000.300,00	0,00	0,00	0,00	
BLUD	194.390.549,00	0,00	0,00	0,00	
PPKD/Pengelola	0,00	0,00	141.974.792.398,00	231.400.134,00	6.914.895.913,00
<b>Total</b>	<b>37.656.308.964,00</b>	<b>53.557.665.824,00</b>	<b>141.974.792.398,00</b>	<b>231.400.134,00</b>	<b>6.914.895.913,00</b>

**Mutasi Aset Rusak Berat**

Aset tak berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp37.656.308.964,00 dan Rp38.319.370.720,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Rincian mutasi bertambah dan berkurang aset rusak berat per OPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

<b>OPD</b>	<b>31 Desember 2021 (Audited) (Rp)</b>	<b>Mutasi Bertambah (Rp)</b>	<b>Mutasi Berkurang (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	7.606.904.790,00	736.401.627,00	873.828.527,00	7.469.477.890,00
Dinas Kesehatan	12.079.940.764,00	1.536.721.232,00	1.997.315.958,00	11.619.346.038,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.106.117.760,00	0,00	508.597.000,00	3.597.520.760,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	90.915.000,00	0,00	0,00	90.915.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	391.840.156,00	0,00	0,00	391.840.156,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.418.070.586,00	0,00	65.000.000,00	1.353.070.586,00
Dinas Pertanian dan Pangan	1.054.240.217,00	0,00	172.929.000,00	881.311.217,00
Dinas Lingkungan Hidup	621.144.645,00	0,00	0,00	621.144.645,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	585.848.900,00	0,00	0,00	585.848.900,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	119.687.592,00	0,00	0,00	119.687.592,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.583.307.098,00	14.300.000,00	183.000.000,00	1.414.607.098,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

OPD	31 Desember 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	269.772.703,00	0,00	0,00	269.772.703,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.068.306.602,00	0,00	0,00	2.068.306.602,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	223.259.755,00	0,00	0,00	223.259.755,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	867.083.166,00	0,00	355.500.000,00	511.583.166,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	114.482.080,00	643.500,00	643.500,00	114.482.080,00
Sekretariat Daerah	618.077.584,00	517.052.743,00	0,00	1.135.130.327,00
Sekretariat DPRD	450.090.424,00	0,00	0,00	450.090.424,00
Kecamatan Muntok	604.874.243,00	349.415.297,00	0,00	954.289.540,00
Kecamatan Simpang Teritip	114.654.398,00	0,00	0,00	114.654.398,00
Kecamatan Jebus	106.585.500,00	172.201.449,00	0,00	278.786.949,00
Kecamatan Kelapa	349.371.000,00	146.775.000,00	0,00	496.146.000,00
Kecamatan Tempilang	133.979.315,00	0,00	0,00	133.979.315,00
Kecamatan Parittiga	216.033.000,00	0,00	0,00	216.033.000,00
Inspektorat Daerah	171.622.267,00	0,00	0,00	171.622.267,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	570.435.927,00	0,00	0,00	570.435.927,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	532.366.950,00	0,00	0,00	532.366.950,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	372.439.240,00	0,00	0,00	372.439.240,00
Badan Kepegawaian dan	303.528.209,00	20.241.381,00	0,00	323.769.590,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

OPD	31 Desember 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah				
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	380.000.300,00	0,00	0,00	380.000.300,00
BLUD	194.390.549,00	0,00	0,00	194.390.549,00
<b>Total</b>	<b>38.319.370.720,00</b>	<b>3.493.752.229,00</b>	<b>4.156.813.985,00</b>	<b>37.656.308.964,00</b>

*Mutasi Aset Idle*

Aset *idle* atau aset yang belum dimanfaatkan oleh OPD lain yang dikelola oleh Pengelola Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp141.974.792.398,00 dan Rp38.453.877.416,00.

Rincian mutasi bertambah dan berkurang aset rusak berat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

OPD	31 Desember 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi Bertambah (Rp)	Mutasi Berkurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Pengelola	38.453.877.416,00	103.520.915.001,00	19,00	141.974.792.398,00

Berikut rincian aset dipinjam pakai/dimanfaatkan oleh instansi lain untuk jangka waktu tertentu:

No	OPD	Aset Pinjam Pakai/ Dimanfaatkan pihak lain	Nilai (Rp)	Instansi Pinjam Pakai
1	Sekretariat Daerah	Peralatan dan Mesin	2.490.892.170,00	PDAM. BAZDA. dll.
2	Dinas Pekerjaan Umum	Gedung dan bangunan	3.268.379.000,00	Masyarakat dan pihak ketiga
		Jalan Irigasi dan Jaringan	47.605.024.654,00	
3	Kecamatan Kelapa	Kendaraan Dinas	193.370.000,00	Kejaksaan Negeri Bangka Barat
<b>Total</b>			<b>53.557.665.824,00</b>	

Aset lainnya berupa aset pinjam pakai yang berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan aset yang digunakan/dimanfaatkan di masyarakat yang pada laporan sebelumnya berada di aset tetap gedung dan bangunan dan jalan irigasi dan jaringan, namun pada laporan keuangan tahun 2016 direklas ke akun aset lainnya. Aset tersebut berupa pagar pemakaman, dinding pemandian umum, rehab bangunan tempat kerja, sumur gali, irigasi dan lain-lain.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Terdapat 22 unit gedung dan bangunan yang dicatat di Buku Inventaris (BI) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, namun sifatnya tidak menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Terdiri atas pemagaran pemakaman umum, pembangunan pos polisi, tribun, balai pertemuan, dinding pemandian umum, dan lain-lain senilai Rp3.268.379.000,00 di wilayah Kabupaten Bangka Barat.

Aset tersebut dicatat di Buku Inventaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang karena penganggaran dan pelaksanaannya pada tahun 2003 s.d tahun 2015 dilakukan oleh Dinas PUPR, sedangkan fisik aset tetap gedung dan bangunan berada dan telah digunakan oleh masyarakat/pihak lain. Semenjak dibangun aset tersebut dicatat di aset gedung dan bangunan, pada laporan keuangan tahun 2016 aset tersebut dipindahkan ke aset lainnya karena aset tersebut sifatnya tidak menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pada saat dibangun diperuntukkan untuk menunjang sarana dan prasarana kepada masyarakat sebagai pelayanan publik.

Terdapat 319 unit sumur gali yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bangka Barat yang dicatat di Buku Inventaris (BI) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, namun sifatnya tidak menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas PU dengan nilai Rp6.917.494.187,00.

Aset tersebut dicatat di Buku Inventaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang karena penganggaran dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas PUPR pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Fisik aset tetap sumur gali tersebut berada di wilayah Kabupaten Bangka Barat dan telah digunakan oleh masyarakat. Semenjak dibangun aset tersebut dicatat di aset jalan, irigasi dan jaringan, pada laporan keuangan tahun 2016 dipindahkan ke aset lainnya karena sifatnya tidak menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas PU dan pada saat dibangun diperuntukkan untuk menunjang sarana dan prasarana kepada masyarakat sebagai pelayanan publik. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sudah melakukan proses pemindahtanganan dengan cara hibah atas 148 unit sumur gali dengan kondisi baik berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/439/4.4.1.1/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat Berupa Sumur Gali Pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat yang akan Dihilangkan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2017, namun belum sampai pada tahap hibah dan Penghapusan sehingga aset sumur gali tersebut masih tercatat di dalam Buku Inventaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Atas aset sumur gali tersebut akan dilaksanakan penelitian dan pengecekan fisik kembali ke lapangan dan jika memang fisik aset tersebut masih ada dan dalam kondisi baik maka proses pemindahtanganan dalam bentuk hibah atas sumur gali tersebut akan dilanjutkan secara bertahap untuk selanjutnya dilaksanakan proses penghapusan. Sedangkan untuk sumur gali yang berdasarkan hasil penelitian dan pengecekan fisik sudah dalam kondisi rusak berat maka akan dilakukan penghapusan secara bertahap.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Terdapat 12 unit irigasi yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bangka Barat yang dicatat di Buku Inventaris (BI) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan nilai Rp32.862.561.935,00 dengan kondisi Baik.

Aset tersebut dicatat di Buku Inventaris Dinas Pekerjaan Umum karena penganggaran dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas PUPR pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2014. Atas aset irigasi tersebut akan dilaksanakan penelitian dan pengecekan fisik ke lapangan dan jika memang fisik aset tersebut masih ada dan dalam kondisi baik maka akan dilakukan penatausahaan aset atas 12 unit irigasi tersebut dengan mereklas ke aset tetap. Namun jika berdasarkan hasil penelitian dan pengecekan fisik sudah dalam kondisi rusak berat maka akan dilakukan penghapusan secara bertahap.

Rincian aset lain-lain irigasi adalah sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)
1	Irigasi Desa Pancur	2006	1.523.118.000,00
2	Irigasi Mislak Desa Jebus	2007	1.563.920.671,00
3	Irigasi Tuik	2007	5.251.167.499,00
4	Irigasi Beruas	2008	1.673.467.547,00
5	Irigasi Buleng Tuik	2012	709.136.000,00
6	Irigasi Kundi (Bukit Terak)	2008	1.053.706.973,00
7	Irigasi Kedondong Kecamatan Jebus	2009	953.912.329,00
8	Irigasi Tumbak Petar	2014	594.473.000,00
9	Irigasi Tanjung Punai Kecamatan Muntok	2008	2.103.799.000,00
10	Irigasi Simpang Yul	2003	6.507.842.800,00
11	Irigasi Kelumbi	2013	4.482.417.315,00
12	Irigasi Buyan	2013	6.445.600.801,00
	<b>Total</b>		<b>32.862.561.935,00</b>

Terdapat 3 unit Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) yang berlokasi di Desa Rambat, Desa Air Nyatoh, dan Desa Air Limau yang penganggaran dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2013 dan tercatat pada Buku Inventaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat *dropping* mutasi bertambah 3 unit Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan yaitu Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Kecamatan Muntok, Jaringan Perpipaan (Tanjung) dan Jaringan Perpipaan Sungai Daeng.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Rincian Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN BMD	Tahun Perolehan	NILAI PADA BI (Rp)	Keterangan
1	SPAM Desa Rambat	2013	408.781.500,00	
2	SPAM Desa Air Nyatoh	2013	2.155.399.065,00	
3	SPAM Desa Teluk Limau	2013	1.232.077.000,00	
4	Pemb. Jaringan Perpipaan SPAM IKK Kec. Muntok	2020	1.578.593.967,00	Dropping dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
5	Pengembangan Jaringan Perpipaan (Tanjung)	2019	499.645.000,00	Dropping dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
6	Pengembangan Jaringan Perpipaan (Sungai Daeng)	2020	1.950.472.000,00	Dropping dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
	<b>Total</b>		<b>7.824.968.532,00</b>	

Terdapat kegiatan normalisasi, pengerukan alur sungai, saluran pembuangan dan lain-lain sejumlah Rp1.075.895.000,00 yang pelaksanaannya pada tahun 2006 s.d 2014 dianggarkan melalui belanja modal, namun setelah dilakukan pengecekan fisik ke lapangan tidak ditemukan adanya aset fisik dari pelaksanaan kegiatan normalisasi, pengerukan alur sungai, saluran pembuangan dan lain-lain tersebut. Sehingga kegiatan tersebut pada tahun 2016 harus dikeluarkan dari pencatatan aset dan dipindahkan ke dalam aset lainnya, serta dilakukan tahapan penghapusan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/280.A/4.4.1.1/2017 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat Berupa Bangunan Air Lain-lain Pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat Akibat Sebab Lain Tahun 2017 Tanggal 12 Juni 2017, maka pada tahun 2022 dilakukan penghapusan terhadap aset lain-lain tersebut.

Berikut rincian kegiatan normalisasi, pengerukan alur sungai, saluran pembuangan dan lain-lain yang dihapuskan adalah sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Tahun Pengadaan	Nilai (Rp)
1	Pengerukan Alur Sungai Kp. Suntai di kec. Jebus	2006	99.519.000,00
2	Normalisasi Saluran Pembuangan / Drainase / Siring Pasar Muntok di Kec. Muntok	2007	96.962.000,00
3	Normalisasi Alur Sungai Suntai sep.2 Km	2008	485.172.000,00
4	Normalisasi Saluran TPI Parit III Jebus	2009	98.000.000,00
5	Normalisasi Alur Sungai Goreng Desa Tuik Sep 300 M	2013	196.393.000,00
6	Normalisasi Alur sungai Muntok	2013	196.811.000,00
7	Pengerukan Alur Sungai Semusuk Dusun II Belo Laut di Kec. Muntok	2014	99.415.000,00
8	Pengerukan Alur Sungai Dusun Puput Atas di Kec. Parittiga	2014	194.720.000,00
	<b>Total</b>		<b>1.466.992.000,00</b>

### 3.1.5.8 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain merupakan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat dan Aset yang dipinjam-pakaikan ke Instansi pemerintah. Akumulasi



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun 2022 sebesar Rp49.815.133.179,00 dengan rincian per OPD sebagai berikut :

OPD	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	3.440.298.172,00
Dinas Kesehatan	10.972.918.840,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.771.619.202,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan	90.109.166,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	390.551.155,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa	1.305.793.322,00
Dinas Pertanian dan Pangan	709.952.932,00
Dinas Lingkungan Hidup	595.375.430,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	580.688.901,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	117.373.469,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.288.418.503,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	268.607.566,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.025.236.224,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	134.636.832,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	503.619.408,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	66.880.416,00
Sekretariat Daerah	3.608.553.962,00
Sekretariat DPRD	425.512.558,00
Kecamatan Muntok	912.894.872,00
Kecamatan Simpang Teritip	86.747.485,00
Kecamatan Jebus	248.441.677,00
Kecamatan Kelapa	673.771.764,00
Kecamatan Tempilang	130.578.115,00
Kecamatan Parittiga	212.233.237,00
Inspektorat Daerah	169.245.673,00
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	399.581.589,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	529.828.218,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	370.953.824,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	274.152.097,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	380.000.300,00
BLUD	130.558.270,00
<b>Total</b>	<b>49.815.133.179,00</b>

### 3.1.5.9 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang Dibatasi Penggunaannya adalah kas yang tidak dapat digunakan secara bebas untuk membiayai belanja daerah. Saldo Kas Yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp143.944,00 merupakan saldo Rekening Dana Hibah di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp143.944,00 yang ditetapkan



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/256/BPKAD/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/14/4.4.1.1/2020 Tentang Penetapan Nomor Rekening Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Rincian Kas Yang Dibatasi Penggunaannya pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut :

OPD	Uraian	Nama Bank	Nomor Rekening	31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dana Pendidikan Keluarga	BRI	355501023526532	143.944,00
<b>Total</b>				<b>143.944,00</b>

### 3.2 Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	11.804.953.533,13	3.944.829.411,07
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>11.804.953.533,13</b>	<b>3.944.829.411,07</b>

Kewajiban Jangka Pendek tahun 2022 sebesar Rp11.804.953.533,13 terdiri dari:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga tahun 2022 sebesar Rp55.027,00.
2. Utang belanja di OPD tahun 2022 sebesar Rp4.666.304.011,24 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Utang Belanja Pegawai	13.005.216,24
2.	Utang Belanja Jasa	85.015.582,00
3.	Utang Persediaan	24.614.955,00
4.	Utang Belanja Modal	4.543.668.258,00
<b>Total</b>		<b>4.666.304.011,24</b>

3. Utang Jangka Pendek lainnya tahun 2022 sebesar Rp7.012.005.687,40 merupakan utang belanja pada BLUD.
4. Pendapatan diterima tahun 2022 dimuka sebesar Rp 126.588.807,49.

#### 3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Tahun 2022 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp55.027,00 merupakan Utang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Belum Disetor.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**3.2.1.2 Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga**

Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2022 sebesar Rp4.666.304.011,24 merupakan utang belanja OPD. Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga terdiri dari Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa dan Utang Belanja Modal. Utang Belanja Pegawai merupakan utang atas kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala ASN, Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan utang atas listrik, air, telepon, jasa service dan internet sedangkan utang belanja modal merupakan utang pembangunan Stadion Kabupaten Bangka Barat kepada PT. CIPTA INFRA KARYA berdasarkan Laporan Hasil Reviu (LHR) Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 700/003/IRDA/2023 tanggal 21 Maret 2023.

Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga Per OPD tahun 2022

OPD	Utang Belanja Pegawai	Utang Persediaan	Utang Belanja Jasa	Utang Belanja Modal	Total Utang Belanja
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	814.790,00	0,00	814.790,00
Dinas Kesehatan	0,00	24.614.955,00	0,00	0,00	24.614.955,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	7.922.922,00	4.543.668.258,00	4.551.591.180,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	3.234.338,00	0,00	3.234.338,00
Dinas Pertanian dan Pangan	1.355.700,00	0,00	273.972,00	0,00	1.629.672,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	11.744.397,00	0,00	11.744.397,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	1.024.487,00	0,00	1.024.487,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	737.700,00	0,00	3.364.670,00	0,00	4.102.370,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	5.464.781,00	0,00	5.464.781,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	86.170,00	0,00	86.170,00
Sekretariat Daerah	3.945.733,00	0,00	0,00	0,00	3.945.733,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	22.132.259,00	0,00	22.132.259,00
Kecamatan Muntok	0,00	0,00	3.483.812,00	0,00	3.483.812,00
Inspektorat Kabupaten	5.950.783,24	0,00	3.493.884,00	0,00	9.444.667,24
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	0,00	0,00	7.554.388,00	0,00	7.554.388,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.015.300,00	0,00	5.061.471,00	0,00	6.076.771,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	2.105.952,00	0,00	2.105.952,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	0,00	7.253.289,00	0,00	7.253.289,00
<b>Total</b>	<b>13.005.216,24</b>	<b>24.614.955,00</b>	<b>85.015.582,00</b>	<b>4.543.668.258,00</b>	<b>4.666.304.011,24</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**3.2.1.7 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2022 sebesar Rp7.012.005.687,40 merupakan utang belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat.

**3.2.1.8 Kewajiban-Penerimaan Kas yang belum teridentifikasi kepemilikannya**

Kewajiban-Penerimaan Kas yang belum teridentifikasi kepemilikannya merupakan penerimaan yang masuk ke kas daerah, namun belum diketahui jenis penerimaannya. Kewajiban-Penerimaan Kas yang belum teridentifikasi kepemilikannya tahun 2022 yang disajikan di neraca sebesar Rp0,00.

**3.2.1.9 Pendapatan diterima dimuka**

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima secara kas, namun belum menjadi hak pemerintah daerah. Pendapatan diterima dimuka yang disajikan di neraca sebesar Rp126.588.807,49 merupakan penerimaan pajak reklame tahun 2023 yang telah diterima di kas daerah namun belum menjadi hak pemerintah kabupaten bangka barat dikarenakan pajak reklame tersebut merupakan pajak yang dibayar untuk masa pajak 2022 sampai dengan 2023 yang terdapat pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat. Perhitungan pendapatan diterima di muka berdasarkan SIMDA Pendapatan Daerah.

Rincian Pendapatan diterima dimuka dapat dilihat pada lampiran 6.

**3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang**

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.

**3.3 Ekuitas Dana**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Ekuitas Dana per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

<b>Ekuitas Dana</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2021 (Rp)</b>
<b>Ekuitas Dana</b>		
Ekuitas Dana	1.699.264.211.713,21	1.409.262.172.443,38



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**4. LAPORAN OPERASIONAL**

**4.1 Pendapatan-LO**

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

**4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO**

Pendapatan Asli Daerah LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi, pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah yang telah diterima pembayarannya serta yang belum diterima pembayarannya namun sudah diakui sebagai piutang pajak di neraca. Pendapatan Asli Daerah atas pelunasan Piutang Pajak Daerah tidak diakui sebagai Pendapatan Asli Daerah-LO.

**4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO**

Pendapatan Pajak Daerah-LO merupakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang berasal dari pajak yang dipungut dari wajib pajak berdasarkan subjek dan objek pajak. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan Organisasi perangkat daerah yang mengelola pajak daerah. Pendapatan Pajak Daerah-LO merupakan pendapatan pajak daerah yang telah diterima pembayarannya serta yang belum diterima pembayarannya namun sudah diakui sebagai piutang pajak di neraca. Pendapatan Pajak Daerah atas pelunasan Piutang Pajak Daerah tidak diakui sebagai Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2022 sebesar Rp23.601.437.236,63 dan tahun 2021 sebesar Rp20.235.546.941,04 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rek.	Jenis Pajak	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Kenaikan/ Penurunan
4.1.1.1.1	Pajak Hotel	65.351.001,00	58.074.135,00	7.276.866,00	12,53
4.1.1.1.2	Pajak Restoran	2.055.779.317,00	2.499.623.400,00	(443.844.083,00)	17,76
4.1.1.1.3	Pajak Hiburan	40.407.399,00	2.036.000,00	38.371.399,00	1884,65
4.1.1.1.4	Pajak Reklame	378.924.927,83	445.674.120,54	(66.749.192,71)	14,98
4.1.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan	12.465.654.940,00	10.930.973.586,00	1.534.681.354,00	14,04
4.1.1.1.6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	381.669.363,00	848.263.554,50	(466.594.191,50)	55,01
4.1.1.1.7	Pajak Parkir	4.100.000,00	3.825.000,00	275.000,00	7,19
4.1.1.1.8	Pajak Air Tanah	129.648.851,80	127.266.906,00	2.381.945,80	1,87
3.1.1.1.9	Pajak Sarang Burung Walet	232.118.500,00	284.367.575,00	(52.249.075,00)	18,37
4.1.1.1.10	Pajak Bumi dan Bangunan P2	6.613.199.993,00	3.789.726.172,00	2.823.473.821,00	74,50
4.1.1.1.11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.234.582.944,00	1.245.716.492,00	(11.133.548,00)	0,89
<b>Total</b>		<b>23.601.437.236,63</b>	<b>20.235.546.941,04</b>	<b>3.365.890.295,59</b>	<b>16,63</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Pendapatan pajak daerah LO tahun 2022 sebesar Rp23.601.437.236,63 jika disandingkan dengan pendapatan pajak LRA sebesar Rp21.724.751.484,90 terdapat perbedaan sebesar Rp1.876.685.751,73. Perbedaan tersebut dikarenakan :

1. Penerbitan SKPD tahun 2022 namun belum diterima pembayarannya sebesar Rp2.189.685.082,25 dan disajikan sebagai pendapatan LO tahun 2022.
2. Pelunasan atas piutang pajak tahun 2021 yang diterima pada tahun 2022 sebesar Rp314.525.935,75 yang tidak disajikan sebagai pendapatan LO tahun 2022.
3. Pendapatan diterima dimuka pajak reklame tahun 2021 sebesar Rp128.115.412,72 yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah di tahun 2022 dan disajikan sebagai pendapatan LO tahun 2022.
4. Pendapatan diterima dimuka pajak reklame tahun 2022 sebesar Rp126.588.807,49 yang telah diterima pembayarannya namun belum menjadi hak Pemerintah daerah sehingga tidak disajikan sebagai pendapatan LO tahun 2022.

Perbedaan nilai tersebut dijelaskan dalam tabel berikut :

Jenis Pajak	Pendapatan Pajak yang masuk ke kas daerah s.d Bulan Desember 2022 (Pendapatan Pajak-LRA) (Rp)	Piutang Pajak atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Tahun 2022 (Rp)	Pelunasan Piutang s.d Tahun 2021 di tahun 2022 (Rp)	Pendapatan diterima dimuka tahun 2021 (Rp)	Pendapatan diterima dimuka tahun 2022 (Rp)	Pendapatan LO tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + 3 - 4 + 5-6
Pajak Hotel	65.351.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.351.001,00
Pajak Restoran	2.055.812.417,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	2.055.779.317,00
Pajak Hiburan	40.526.399,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	40.407.399,00
Pajak Reklame	342.360.716,10	43.577.875,25	8.540.268,75	126.588.807,49	128.115.412,72	378.924.927,83
Pajak Penerangan Jalan	12.465.654.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465.654.940,00
Pajak Mineral Bukan Logam lainnya	381.669.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.669.363,00
Pajak Parkir	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
Pajak Air Tanah	126.994.263,80	6.286.906,00	3.632.318,00	0,00	0,00	129.648.851,80
Pajak Sarang Burung Walet	232.118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.118.500,00
Pajak Bumi dan Bangunan	4.775.580.941,00	2.139.820.301,00	302.201.249,00	0,00	0,00	6.613.199.993,00
Pajak BPHTB	1.234.582.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.582.944,00
<b>Total</b>	<b>21.724.751.484,90</b>	<b>2.189.685.082,25</b>	<b>314.525.935,75</b>	<b>126.588.807,49</b>	<b>128.115.412,72</b>	<b>23.601.437.236,63</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO**

Pendapatan retribusi daerah merupakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO merupakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang berasal dari retribusi yang dipungut dari wajib retribusi berdasarkan subjek dan objek retribusi. Pendapatan Retribusi Daerah atas pelunasan Piutang Retribusi Daerah tidak diakui sebagai Pendapatan Retribusi Daerah-LO. Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2022 sebesar Rp7.398.091.610,00 dan tahun 2021 sebesar Rp4.430.769.655,25 dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Referensi	Jenis Retribusi	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
4.1.2.01.01	Pelayanan Kesehatan	3.165.820.800,00	2.337.250.500,00	828.570.300,00	35,45
4.1.2.01.02	Pelayanan Persampahan	484.730.000,00	242.768.000,00	241.962.000,00	99,67
4.1.2.01.03	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	99.058.000,00	1.020.395.500,00	(921.337.500,00)	90,29
4.1.2.01.04	Pelayanan Pasar	50.880.300,00	9.860.400,00	41.019.900,00	416,01
4.1.2.01.05	Pengujian Kendaraan Bermotor	141.618.600,00	118.745.200,00	22.873.400,00	19,26
4.1.2.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	45.276.600,00	0,00	45.276.600,00	100,00
4.1.2.02.11	Pelayanan Tera/ Tera Ulang	138.936.500,00	10.591.954,00	128.344.546,00	1.211,72
4.1.2.02.12	Pengendalian Menara Telekomunikasi	608.773.769,00	0,00	608.773.769,00	100,00
4.1.2.02.13	Pemakaian Kekayaan Daerah	1.000.000,00	18.700.000,00	(17.700.000,00)	94,65
4.1.2.02.14	Pasar Grosir/Pertokoan	166.188.850,00	196.912.000,00	(30.723.150,00)	15,61
4.1.2.02.15	Tempat Pelelangan	0,00	1.985.100,00	(1.985.100,00)	100,00
4.1.2.02.17	Retribusi Terminal	172.942.928,00	154.555.220,00	18.387.708,00	11,90
4.1.2.02.18	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.244.054.000,00	0,00	1.244.054.000,00	100,00
4.1.2.02.19	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	16.750.000,00	5.250.000,00	11.500.000,00	219,05
4.1.2.02.20	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	603.103.000,00	155.518.000,00	447.585.000,00	287,80
4.1.2.02.21	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	6.130.000,00	6.705.000,00	(575.000,00)	8,58
4.1.2.02.22	Izin Mendirikan Bangunan	452.828.263,00	97.616.781,25	355.211.481,75	363,88
4.1.2.02.24	Pemberian Izin usaha Perikanan	0,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	100,00
4.1.2.02.25	IMTA	0,00	52.116.000,00	(52.116.000,00)	100,00
<b>Total</b>		<b>7.398.091.610,00</b>	<b>4.430.769.655,25</b>	<b>2.967.321.954,75</b>	<b>66,97</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Pendapatan retribusi daerah LO tahun 2022 sebesar Rp7.398.091.610,00 jika disandingkan dengan pendapatan retribusi LRA sebesar Rp7.355.787.438,00 terdapat perbedaan sebesar Rp 42.304.172,00. Perbedaan tersebut dikarenakan :

1. Penerbitan SKRD tahun 2022 namun belum diterima pembayarannya sebesar Rp35.779.172,00 dan disajikan sebagai pendapatan LO tahun 2022.
2. Pendapatan retribusi tahun 2022 yang disetorkan oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah tahun 2023 sebesar Rp6.525.000,00.

Perhitungan Pendapatan Retribusi-LO tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Pendapatan Retribusi yang masuk ke kas daerah (Pendapatan Retribusi-LRA) (Rp)	Piutang Retribusi atas penerbitan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) Tahun 2022 (Rp)	Pendapatan Retribusi Tahun 2022 yang Disetorkan Bendahara ke Kasda Tahun 2023 (Rp)	Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2022 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 2 + 3 + 4</i>
Pelayanan Kesehatan	3.165.820.800,00	0,00	0,00	3.165.820.800,00
Pelayanan Persampahan	483.970.000,00	0,00	760.000,00	484.730.000,00
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	99.058.000,00	0,00	0,00	99.058.000,00
Pelayanan Pasar	50.880.300,00	0,00	0,00	50.880.300,00
Pengujian Kendaraan Bermotor	141.618.600,00	0,00	0,00	141.618.600,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	45.276.600,00	0,00	0,00	45.276.600,00
Pelayanan Tera/ Tera Ulang	138.936.500,00	0,00	0,00	138.936.500,00
Pengendalian Menara Telekomunikasi	608.773.769,00	0,00	0,00	608.773.769,00
Pemakaian Kekayaan Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Pasar Grosir/Pertokoan	158.808.850,00	6.480.000,00	900.000,00	166.188.850,00
Tempat Pelelangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Terminal	172.942.928,00	0,00	0,00	172.942.928,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.239.189.000,00	0,00	4.865.000,00	1.244.054.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	16.750.000,00	0,00	0,00	16.750.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	603.103.000,00	0,00	0,00	603.103.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00
Izin Mendirikan Bangunan	423.529.091,00	29.299.172,00	0,00	452.828.263,00
Pemberian Izin usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
IMTA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7.355.787.438,00</b>	<b>35.779.172,00</b>	<b>6.525.000,00</b>	<b>7.398.091.610,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang telah diterima pembayarannya maupun yang belum diterima pembayarannya namun sudah diakui sebagai piutang di neraca. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atas pelunasan piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak diakui sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO. Tahun 2022 terdapat pelunasan piutang Dividen tahun 2021 dan terdapat piutang yang timbul yaitu piutang atas dividen tahun buku tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun 2023. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2022 sebesar Rp6.844.661.601,09.

Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2022 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

<b>Kode Rek.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Kenaikan / Penurunan (Rp)</b>	<b>% Kenaikan/ Penurunan</b>
3.1.1.3.1	Dividen PT. BPD Sumsel Babel	6.844.661.601,09	5.306.960.199,78	1.537.701.401,31	28,98
3.1.1.3.2	Dividen PT. BPR Syariah Bangka Belitung	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>6.844.661.601,09</b>	<b>5.306.960.199,78</b>	<b>1.537.701.401,31</b>	<b>28,98</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2022 sebesar Rp6.844.661.601,09 jika disandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA sebesar Rp5.306.960.199,78 terdapat perbedaan sebesar Rp1.537.701.401,31. Perbedaan tersebut dikarenakan :

1. Dividen PT. BPD Sumsel Babel tahun buku 2022 sebesar Rp6.844.661.601,09 yang belum diterima pembayarannya namun disajikan sebagai pendapatan LO tahun 2022.
2. Pelunasan atas piutang dividen PT. BPD Sumsel Babel tahun 2021 yang diterima pada tahun 2022 sebesar Rp5.306.960.199,78 yang tidak disajikan sebagai pendapatan LO tahun 2022.

Perhitungan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2022 sebesar Rp6.844.661.601,09 adalah sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Uraian	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang masuk ke kas daerah (Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LRA) (Rp)	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2022 (Rp)	Pelunasan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah s.d Tahun 2021 (Rp)	Pendapatan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah -LO Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4
Dividen PT. BPD Sumsel Babel	5.306.960.199,78	6.844.661.601,09	5.306.960.199,78	6.844.661.601,09
Dividen PT. BPR Syariah Bangka Belitung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.306.960.199,78</b>	<b>6.844.661.601,09</b>	<b>5.306.960.199,78</b>	<b>6.844.661.601,09</b>

**4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO merupakan pendapatan selain Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO.

Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2022 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Nomor Referensi	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
4.1.1.4.1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	5.362.039.000,00	139.278.000,00	5.222.761.000,00	3.749,88
4.1.1.4.2	Hasil Sewa BMD	0,00	254.996.000,00	(254.996.000,00)	100,00
4.1.1.4.3	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	311.369.750,00	0,00	311.369.750,00	100,00
4.1.1.4.4	Jasa Giro pada Kas Daerah	593.167.711,31	709.987.358,00	(116.819.646,69)	16,45
4.1.1.4.5	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	705.616.407,00	865.123.276,00	(159.506.869,00)	18,44
4.1.1.4.7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	6.500.000,00	(6.500.000,00)	100,00
4.1.1.4.8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	107.102.591,00	103.190.501,00	3.912.090,00	3,79
4.1.1.4.9	Pendapatan Denda Pajak Hotel		205.476,00	(205.476,00)	100,00
4.1.1.4.10	Pendapatan Denda Pajak Restoran	4.053.967,00	7.045.472,00	(2.991.505,00)	42,46
4.1.1.4.11	Pendapatan Denda Pajak Reklame	870.715,00	3.012.155,00	(2.141.440,00)	71,09
4.1.1.4.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.097.280,00	2.845.256,60	(1.747.976,60)	61,43
4.1.1.4.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	419.700,00	306.752,00	112.948,00	36,82
4.1.1.4.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	14.000,00	(14.000,00)	100,00
4.1.1.4.20	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	18.368.067,00	15.412.006,00	2.956.061,00	19,18
4.1.1.4.21	Pendapatan BLUD	27.126.727.611,65	33.851.906.034,00	(6.725.178.422,35)	19,87



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Nomor Referensi	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
4.1.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	6.771.378.941,00	(6.771.378.941,00)	100,00
4.1.1.4.23	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	987.901.854,15	3.949.455.312,00	(2.961.553.457,85)	74,99
<b>Total</b>		<b>35.218.734.654,11</b>	<b>46.680.656.539,60</b>	<b>(11.461.921.885)</b>	<b>(24,55)</b>

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2022 sebesar Rp35.218.734.654,11 jika disandingkan dengan pendapatan pajak LRA sebesar Rp54.146.803.100,11 terdapat perbedaan sebesar Rp18.928.068.446,00. Perbedaan tersebut dikarenakan :

1. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2022 sebesar Rp136.614.054,00 dan disajikan sebagai Pendapatan-LO tahun 2022 namun tidak disajikan pada Lain-Lain PAD Yang Sah-LRA tahun 2022.
2. Pelunasan atas piutang Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2021 yang diterima pada tahun 2022 sebesar Rp18.882.783.300,00 yang disajikan pada pendapatan LRA tahun 2022 namun tidak disajikan sebagai Pendapatan-LO tahun 2022.
3. Lain-Lain PAD Yang Sah-LO tahun 2022 sebesar Rp176.899.200,00 yang merupakan pelunasan Tuntutan Ganti Rugi pada BLUD yang disajikan pada pendapatan LRA tahun 2022 namun tidak disajikan sebagai Lain-Lain PAD Yang Sah-LO tahun 2022.
4. Lain-Lain PAD Yang Sah-LO tahun 2022 sebesar Rp5.000.000,00 yang merupakan pelunasan Tuntutan Perbendaharaan yang disajikan pada pendapatan LRA tahun 2022 namun tidak disajikan sebagai Lain-Lain PAD Yang Sah-LO tahun 2022.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO merupakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran ditambah dengan penambahan piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2022 dan dikurangi pelunasan piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan tahun 2021.

Perhitungan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2022 sebesar Rp35.218.734.654,11 adalah sebagai berikut :

Uraian	Lain-Lain PAD yang Sah yang masuk ke kas daerah (Lain-Lain PAD yang Sah -LRA) (Rp)	Penerimaan yang diakui di LRA namun tidak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah- LO (Rp)	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2022 (Rp)	Pelunasan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah s.d Tahun 2021 (Rp)	Lain-Lain PAD yang Sah -LO Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6=-3+4-5
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	5.362.039.000,00	0,00	0,00	0,00	5.362.039.000,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	311.369.750,00	0,00	0,00	0,00	311.369.750,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	593.167.711,31	0,00	0,00	0,00	593.167.711,31



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Uraian	Lain-Lain PAD yang Sah yang masuk ke kas daerah (Lain-Lain PAD yang Sah -LRA) (Rp)	Penerimaan yang diakui di LRA namun tidak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah- LO (Rp)	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2022 (Rp)	Pelunasan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah s.d Tahun 2021 (Rp)	Lain-Lain PAD yang Sah -LO Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6=-3+4-5
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	705.616.407,00	0,00	0,00	0,00	705.616.407,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	107.102.591,00	0,00	0,00	0,00	107.102.591,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	4.053.967,00	0,00	0,00	0,00	4.053.967,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	870.715,00	0,00	0,00	0,00	870.715,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.097.280,00	0,00	0,00	0,00	1.097.280,00
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	419.700,00	0,00	0,00	0,00	419.700,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	18.368.067,00	0,00	0,00	0,00	18.368.067,00
Pendapatan BLUD	46.049.796.057,65	176.899.200,00	136.614.054,00	18.882.783.300,00	27.126.727.611,65
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	992.901.854,15	5.000.000,00	0,00	0,00	987.901.854,15
<b>Total</b>	<b>54.146.803.100,11</b>	<b>181.899.200,00</b>	<b>136.614.054,00</b>	<b>18.882.783.300,00</b>	<b>35.218.734.654,11</b>

#### 4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

##### 4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Untuk Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Pemerintah Kabupaten Bangka Bangka tidak mengakui adanya piutang, sehingga seluruh Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang masuk ke kas daerah diakui sebagai pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO.

Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO tahun 2022 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
4.1.2.1.1	<b>Bagi Hasil Pajak</b>				
4.1.2.1.1.1	Pajak Bumi dan Bangunan	30.868.337.324,00	31.191.990.947,00	(323.653.623)	1,04
4.1.2.1.1.2	Pajak Penghasilan Orang Pribadi/PPH 21 s.d. 29	6.485.731.859,00	6.983.815.400,00	(498.083.541)	7,13



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.1.2.1.1.3	Cukai Hasil Tembakau	0,00	535	(535)	100,00
	<b>Sub Total</b>	<b>37.354.069.183,00</b>	<b>38.175.806.882,00</b>	<b>(821.737.699)</b>	<b>2,15</b>
<b>4.1.2.1.2</b>	<b>Bagi Hasil Sumber Daya Alam</b>				
4.1.2.1.2.1	Bagi Hasil Pungutan Hasil Kehutanan	19.694.803,00	36.120.511,00	(16.425.708)	45,47
4.1.2.1.2.2	Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan	2.170.064.211,00	1.357.619.150,00	812.445.061	59,84
4.1.2.1.2.3	Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi	1.170.228.940,00	612.736.103,00	557.492.837	90,98
4.1.2.1.2.4	Bagi Hasil Pertambangan Umum	183.783.603.021,00	58.536.872.461,00	125.246.730.560	213,96
	<b>Sub Total</b>	<b>187.143.590.975,00</b>	<b>60.543.348.225,00</b>	<b>126.600.242.750</b>	<b>209,11</b>
<b>4.1.2.1.3</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>419.082.296.005,00</b>	<b>419.681.643.719,00</b>	<b>(599.347.714)</b>	<b>0,14</b>
<b>4.1.2.1.4</b>	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>86.607.050.142,00</b>	<b>128.720.362.350,00</b>	<b>(42.113.312.208)</b>	<b>32,72</b>
	<b>Total</b>	<b>730.187.006.305,00</b>	<b>647.121.161.176,00</b>	<b>83.065.845.129,00</b>	<b>12,84</b>

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO tahun 2022 sebesar Rp730.187.006.305,00 jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA sebesar Rp750.004.671.444,00 terdapat perbedaan sebesar Rp19.817.665.139,00. Perbedaan tersebut dikarenakan :

1. Dana *Treasury Deposit Facility (TDF)* Bagi Hasil Pajak sebesar Rp2.789.481.277,00 yang tidak disajikan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil Pajak-LRA tahun 2022 namun disajikan sebagai pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2022.
2. Dana *Treasury Deposit Facility (TDF)* Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp11.040.310.636,00 yang tidak disajikan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA tahun 2022 namun disajikan sebagai pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO tahun 2022.
3. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana BOS sebesar Rp33.647.457.052,00 yang disajikan sebagai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA sedangkan di Laporan Operasional disajikan sebagai Lain-lain Pendapatan yang Sah-Pendapatan Hibah-LO.

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp83.065.845.129,00. Kenaikan ini disebabkan meningkatnya Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO dari Pemerintah Pusat.

#### 4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO merupakan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya yang terdiri dari penerimaan Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.

Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO tahun 2022 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Nomor Referensi	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
<b>4.1.2.2.1</b>	<b>Dana Penyesuaian</b>				
4.1.2.2.1.1	Dana Insentif Daerah	6.374.370.000,00	29.857.710.000,00	(23.483.340.000,00)	78,65
4.1.2.2.1.2	Dana Desa	52.346.309.000,00	61.297.214.000,00	(8.950.905.000,00)	14,60
	<b>Total</b>	<b>58.720.679.000,00</b>	<b>91.154.924.000,00</b>	<b>(32.434.245.000,00)</b>	<b>35,58</b>

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2022 sebesar Rp58.720.679.000,00 jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA tahun 2022 sebesar Rp58.720.679.000,00 tidak terdapat perbedaan. Hal ini disebabkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang tidak mengakui adanya piutang atas Transfer Pemerintah Pusat Lainnya.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp32.434.245.000,00). Penurunan ini disebabkan menurunnya transfer Dana Desa dan Dana Insentif Daerah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.

#### 4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi-LO

Transfer Pemerintah Provinsi-LO merupakan pendapatan bagi hasil pajak yang diterima pemerintah kabupaten/kota dari pemerintah provinsi maupun yang belum diterima namun sudah diakui sebagai piutang serta Dana Bantuan dari Provinsi. Pendapatan bagi hasil pajak atas pelunasan Piutang Bagi Hasil Pajak tidak diakui sebagai Pendapatan-LO.

Rincian Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2022 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi-LO :

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	30.504.110.421,00	18.905.809.626,70	11.598.300.794,30	61,35
Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	10.912.115.902,00	3.014.593.215,17	7.897.522.686,83	261,98
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor(PKB)	10.915.282.914,00	7.691.022.943,06	3.224.259.970,94	41,92
Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	642.948.436,00	496.556.401,80	146.392.034,20	29,48
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	3.237.278.073,00	9.680.312.961,01	(6.443.034.888,01)	66,56
<b>Total</b>	<b>56.211.735.746,00</b>	<b>39.788.295.147,74</b>	<b>16.423.440.598,26</b>	<b>41,28</b>

Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2022 sebesar Rp56.211.735.746,00 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Uraian	Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang masuk ke kas daerah Tahun 2022 (Pendapatan Bagi Hasil Pajak- LRA) (Rp)	Piutang Bagi Hasil Pajak yang timbul pada Tahun 2022 (Rp)	Pelunasan Piutang Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2022 atas Piutang Bagi Hasil Pajak s.d Tahun 2021 (Rp)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2022 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=2+3-4</i>
Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	24.760.881.137,00	5.743.229.284,00	0,00	30.504.110.421,00
Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	9.247.704.349,00	1.664.411.553,00	0,00	10.912.115.902,00
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.022.849.985,00	1.892.432.929,00	0,00	10.915.282.914,00
Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	526.971.130,00	115.977.306,00	0,00	642.948.436,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	11.009.072.114,00	2.073.769.619,00	9.845.563.660,00	3.237.278.073,00
<b>Total</b>	<b>54.567.478.715,00</b>	<b>11.489.820.691,00</b>	<b>9.845.563.660,00</b>	<b>56.211.735.746,00</b>

Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Dana Bantuan Bidang Pendidikan	3.790.800.000,00
Dana Bantuan Bidang Kebudayaan	1.176.000.000,00
<b>Total</b>	<b>4.966.800.000,00</b>

Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2022 sebesar Rp61.178.535.746,00 jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Provinsi-LRA tahun 2022 sebesar Rp59.534.278.715,00 terdapat perbedaan sebesar Rp1.644.257.031,00. Perbedaan ini disebabkan oleh :

1. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi tahun 2022 sebesar Rp11.489.820.691,00 yang diakui sebagai Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2022 namun tidak diakui sebagai Transfer Pemerintah Provinsi-LRA tahun 2022.
2. Pelunasan atas Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi tahun 2021 sebesar Rp9.845.563.660,00 yang tidak diakui sebagai Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2022 namun diakui sebagai Transfer Pemerintah Provinsi-LRA tahun 2022.

Transfer Pemerintah Provinsi-Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya LO tahun 2022 sebesar Rp4.966.800.000,00 jika dibandingkan dengan Transfer Pemerintah Provinsi-Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya LRA tahun 2022 sebesar Rp4.966.800.000,00 tidak terdapat perbedaan, hal ini dikarenakan tidak terdapat piutang Pendapatan Transfer Provinsi Lainnya tahun 2021 dan tahun 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO**

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO merupakan pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Lainnya berupa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
4.1.3.1	Pendapatan Hibah	165.394.106.266,17	36.707.932.094,28	128.686.174.171,89	350,57
4.1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.3	Pendapatan Lainnya	9.116.562.372,00	0,00	9.116.562.372,00	100,00
<b>Total</b>		<b>174.510.668.638,17</b>	<b>36.707.932.094,28</b>	<b>137.802.736.543,89</b>	<b>375,40</b>

**4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO**

Pendapatan Hibah - LO merupakan pendapatan hibah berupa uang dan barang yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Lainnya. Pendapatan hibah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 sebesar Rp165.394.106.266,17 terdiri dari :

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	34.767.527.802,00
2	Dinas Kesehatan	4.078.215.895,17
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	125.519.803.026,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	179.246.580,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	28.000.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	152.260.568,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	349.608.216,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	213.348.179,00
9	Kecamatan Kelapa	75.396.000,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	30.700.000,00
<b>Total</b>		<b>165.394.106.266,17</b>

Pendapatan Hibah-LO tahun 2022 sebesar Rp165.394.106.266,17 jika disandingkan dengan Pendapatan Hibah-LRA tahun 2022 sebesar Rp0,00 terdapat perbedaan sebesar Rp165.394.106.266,17 yang terdiri dari :

- Penerimaan Dana BOS sebesar Rp33.647.457.052,00 di disajikan pada akun Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA sedangkan di Laporan Operasional disajikan sebagai pendapatan hibah-LO.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

- Hibah barang sebesar Rp131.746.649.214,17 yang diterima oleh beberapa OPD yang tidak disajikan pada Pendapatan Hibah-LRA tahun 2022.

Daftar Hibah-LO tahun 2022 yang tidak disajikan pada Pendapatan Hibah-LRA

No	OPD	Dana BOS (Rp)	Hibah Persediaan (Rp)	Hibah Aset (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	33.647.457.052,00	0,00	1.120.070.750,00	1.120.070.750,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	3.879.044.983,17	199.170.912,00	4.078.215.895,17
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	125.519.803.026,00	125.519.803.026,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	29.246.580,00	150.000.000,00	179.246.580,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	143.410.568,00	8.850.000,00	152.260.568,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	349.608.216,00	0,00	349.608.216,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	213.348.179,00	213.348.179,00
9	Kecamatan Kelapa	0,00	0,00	75.396.000,00	75.396.000,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	30.700.000,00	30.700.000,00
<b>Total</b>		<b>33.647.457.052,00</b>	<b>4.401.310.347,17</b>	<b>127.345.338.867,00</b>	<b>165.394.106.266,17</b>

#### 4.1.3.2 Pendapatan Dana Darurat - LO

Pendapatan Dana Darurat adalah pendapatan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa. Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Pendapatan Dana Darurat-LO.

#### 4.1.3.3 Pendapatan Lainnya - LO

Pendapatan Lainnya-LO merupakan pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pendapatan Lainnya-LO tahun 2022 sebesar Rp9.116.562.372,00 jika dibandingkan dengan Pendapatan Lainnya -LRA tahun 2022 sebesar Rp9.116.562.372,00 tidak terdapat perbedaan.

#### 4.2 Beban

Beban adalah penurunan masa manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Rincian beban tahun 2022 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Pegawai	340.550.005.470,24	330.841.250.378,00	9.708.755.092,24	2,93
Beban Persediaan	48.613.313.236,35	47.210.522.017,44	1.402.791.218,92	2,97
Beban Jasa	230.598.754.366,04	212.728.808.955,10	17.869.945.410,94	8,40
Beban Pemeliharaan	12.465.617.905,56	11.057.565.375,20	1.408.052.530,36	12,73
Beban Perjalanan Dinas	33.232.728.223,68	28.328.893.217,01	4.903.835.006,67	17,31
Beban Hibah	15.049.649.575,00	12.966.036.565,00	2.083.613.010,00	16,07
Beban Bantuan Sosial	7.139.353.521,00	2.381.477.274,00	4.757.876.247,00	199,79
Beban Penyisihan Piutang Pajak	490.515.959,05	474.502.625,88	16.013.333,17	3,37
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	3.386.495,86	5.040.000,00	(1.653.504,14)	32,81
Beban Penyusutan Aset Tetap	99.344.155.134,00	112.092.171.076,00	(12.748.015.942,00)	11,37
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	50.534.278,00	103.755.303,00	(53.221.025,00)	51,29
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	1.030.005.101,00	941.881.265,00	88.123.836,00	9,36
Beban Transfer	114.215.469.015,00	114.402.645.627,98	(187.176.612,98)	0,16
<b>Total</b>	<b>902.783.488.280,78</b>	<b>873.534.549.679,61</b>	<b>29.248.938.601,18</b>	<b>3,35</b>

#### 4.2.1 **Beban Pegawai**

Beban Pegawai merupakan beban untuk pembayaran gaji PNS/CPNS, Tunjangan Tambahan Penghasilan, Uang Makan, Tunjangan Guru Bersertifikasi dan Non Sertifikasi, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, baik yang telah direalisasikan maupun yang belum direalisasikan namun sudah menjadi kewajiban. Beban pegawai tahun 2022 adalah sebesar Rp340.550.005.470,24 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Pegawai - LO 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	162.621.908.402,00
2	Dinas Kesehatan	73.251.884.139,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.793.033.294,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	2.948.105.099,00
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	3.361.994.597,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.969.049.635,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	2.754.164.374,00
8	Dinas Pertanian dan Pangan	10.439.106.431,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	2.731.810.519,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.249.693.037,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.315.938.376,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.377.403.952,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	Uraian	Beban Pegawai - LO 2022 (Rp)
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.568.925.024,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.147.885.033,00
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.011.643.876,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.419.814.429,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.636.835.920,00
18	Sekretariat Daerah	9.533.033.619,00
19	Sekretariat DPRD	13.761.263.972,00
20	Kecamatan Muntok	3.991.903.427,00
21	Kecamatan Simpang Teritip	1.667.258.783,00
22	Kecamatan Jebus	2.550.314.912,00
23	Kecamatan Kelapa	2.715.301.347,00
24	Kecamatan Tempilang	2.043.635.198,00
25	Kecamatan Parittiga	1.883.263.971,00
26	Inspektorat Kabupaten	3.690.309.124,24
27	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	3.113.588.726,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.252.896.912,00
29	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	3.943.823.541,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.054.449.822,00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.749.765.979,00
<b>Total</b>		<b>340.550.005.470,24</b>

Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja pegawai mapping - LRA	340.559.407.327,00
2.	Bertambah:	13.005.216,24
	Hutang pegawai 2022	13.005.216,24
3.	Berkurang :	22.407.073,00
	Hutang pegawai 2021	22.407.073,00
4.	<b>Beban Pegawai-LO 2022 ( 1 + 2 - 3 )</b>	<b>340.550.005.470,24</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Rincian Hutang Pegawai Tahun 2021 yang dibayar pada Tahun 2022 dan Hutang Pegawai yang timbul pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

OPD	Hutang Pegawai Tahun 2021 yang dibayar pada Tahun 2022 (Rp)	Hutang Pegawai yang timbul pada Tahun 2022 (Rp)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	0,00	802.800,00
Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	10.016.100,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	737.700,00	2.201.800,00
Sekretariat Daerah	3.945.733,00	7.843.291,00
Inspektorat	5.950.783,24	1.543.082,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.015.300,00	0,00
<b>Total</b>	<b>13.005.216,24</b>	<b>22.407.073,00</b>

#### 4.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban atas penggunaan persediaan selama satu periode pelaporan. Beban persediaan didapat dengan menjumlahkan saldo persediaan awal tahun ditambah dengan pembelian persediaan tahun berjalan dan dikurangi dengan saldo persediaan akhir tahun. Beban Persediaan tahun 2022 sebesar Rp48.613.313.236,35. Rincian Beban Persediaan tahun 2022 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	OPD	Beban Persediaan – LO 2022	Beban Persediaan – LO 2021	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	8.431.985.400,00	8.313.261.488,00	118.723.912,00	1,43
2	Dinas Kesehatan	23.464.259.693,35	26.658.518.795,77	(3.194.259.102,42)	11,98
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	557.066.500,00	474.867.700,00	82.198.800,00	17,31
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	7.174.257.898,00	210.147.360,00	6.964.110.538,00	3.313,92
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	208.414.926,00	337.715.790,00	(129.300.864,00)	38,29
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	162.435.171,00	190.973.854,57	(28.538.683,57)	14,94



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	OPD	Beban Persediaan – LO 2022	Beban Persediaan – LO 2021	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	210.523.960,00	288.195.520,00	(77.671.560,00)	26,95
8	Dinas Pertanian dan Pangan	592.744.894,00	740.615.191,00	(147.870.297,00)	19,97
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.371.452.260,00	1.104.476.309,00	266.975.951,00	24,17
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	564.276.970,00	713.488.475,00	(-149.211.505,00)	20,91
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	386.703.960,00	496.909.555,30	(110.205.595,30)	22,18
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	93.838.500,00	210.431.260,00	(116.592.760,00)	55,41
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	158.900.760,00	211.611.860,00	(52.711.100,00)	24,91
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	153.052.700,00	367.591.625,00	(214.538.925,00)	58,36
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	452.815.715,00	437.054.239,76	15.761.475,24	3,61
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	140.686.674,00	174.532.168,00	(33.845.494,00)	19,39
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	127.615.350,00	176.994.350,00	(49.379.000,00)	27,90
18	Sekretariat Daerah	1.731.777.081,00	1.927.352.887,04	(195.575.806,04)	10,15
19	Sekretariat DPRD	720.134.421,00	936.699.671,00	(216.565.250,00)	23,12
20	Kecamatan Muntok	437.577.698,00	630.519.110,00	(192.941.412,00)	30,60
21	Kecamatan Simpang Teritip	87.050.400,00	154.875.100,00	(67.824.700,00)	43,79
22	Kecamatan Jebus	53.590.050,00	200.618.750,00	(147.028.700,00)	73,29
23	Kecamatan Kelapa	179.832.300,00	227.173.350,00	(47.341.050,00)	20,84
24	Kecamatan Tempilang	82.908.875,00	146.069.046,00	(63.160.171,00)	43,24
25	Kecamatan Parittiga	120.649.850,00	149.939.200,00	(29.289.350,00)	19,53
26	Inspektorat Kabupaten	84.312.600,00	232.918.440,00	(148.605.840,00)	63,80



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	OPD	Beban Persediaan – LO 2022	Beban Persediaan – LO 2021	Kenaikan/Penurunan	% Kenaikan/Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
27	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	130.629.950,00	206.636.155,00	(76.006.205,00)	36,78
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	251.852.340,00	388.754.451,00	(136.902.111,00)	35,22
29	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	225.438.990,00	494.961.166,00	(269.522.176,00)	54,45
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	142.439.300,00	269.640.590,00	(127.201.290,00)	47,17
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	114.088.050,00	136.978.560,00	(22.890.510,00)	16,71
<b>Total</b>		<b>48.613.313.236,35</b>	<b>47.210.522.017,44</b>	<b>1.402.791.218,91</b>	<b>2,97</b>

Tahun 2022 terdapat kenaikan beban persediaan sebesar Rp1.402.791.218,91. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya realisasi belanja persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah.

Perhitungan Beban Persediaan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Persediaan Mapping - LRA	23.694.575.809,00
2	<b>Bertambah :</b>	<b>47.044.710.571,80</b>
	Persediaan Awal 2022	24.939.624.517,34
	Persediaan Dari Hibah	4.401.310.347,17
	Penerimaan Persediaan dropping	325.659.889,00
	Hutang Persediaan 2022	346.971.705,00
	Reklas Dari Belanja Aset berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	54.463.000,00
	Reklas Dari Beban Jasa berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	15.887.610.163,30
	Reklas Dari Beban Pemeliharaan berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	976.000,00
	Reklas dari Belanja Bantuan Sosial	864.602.000,00
	Reklas dari Aset Tetap JIJ	223.492.950,00
3	<b>Berkurang :</b>	<b>22.125.973.144,45</b>
	Persediaan Akhir 2022	17.130.984.042,55
	Hutang Persediaan 2021	350.970.798,95
	Reklas Ke Beban Jasa berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	2.925.839.192,59
	Hibah Persediaan Ke Instansi Vertikal	132.486.821,36



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Reklas Ke Aset berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	1.260.032.400,00
	Dropping Persediaan Ke OPD	325.659.889,00
<b>4</b>	<b>Beban Persediaan-LO 2022 (1 + 2 - 3)</b>	<b>48.613.313.236,35</b>

Dropping persediaan antar OPD merupakan penyaluran persediaan yang diperoleh dari pengadaan barang dan jasa dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat. Beban persediaan pada OPD yang menyalurkan persediaan tidak dicatat sebagai beban persediaan, namun dicatat pada beban persediaan OPD yang menerima persediaan sebesar pemakaian.

#### 4.2.3 Beban Jasa

Beban Jasa adalah beban atas konsumsi jasa selama satu periode pelaporan. Beban jasa tahun 2022 sebesar Rp230.598.754.366,04. Rincian beban jasa tahun 2022 dan tahun 2021 sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Jasa-LO 2022	Beban Jasa-LO 2021	Kenaikan/ Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	48.526.049.257,00	7.894.999.300,00	631.049.957,00	1,32
2	Dinas Kesehatan	85.682.011.293,04	70.799.534.505,10	14.882.476.787,94	21,02
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.302.198.311,00	2.995.046.166,0	7.307.152.145,00	243,97
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	4.074.510.012,00	12.181.807.408,0	(8.107.297.396,00)	66,55
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	4.868.006.864,00	5.514.716.839,0	(646.709.975,00)	11,73
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.565.159.560,00	633.779.628,0	931.379.932,00	146,96
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	6.265.848.358,00	4.953.643.808,0	1.312.204.550,00	26,49
8	Dinas Pertanian dan Pangan	3.090.215.242,00	2.891.745.238,0	198.470.004,00	6,86
9	Dinas Lingkungan Hidup	6.983.233.266,00	6.871.285.051,0	111.948.215,00	1,63
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.755.059.169,00	1.746.407.252,0	8.651.917,00	0,50



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	Uraian	Beban Jasa-LO 2022	Beban Jasa-LO 2021	Kenaikan/ Penurunan	% Kenaikan/Pen urunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.603.112.395,00	2.125.313.088,0	477.799.307,00	22,48
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.890.745.882,00	2.982.290.933,0	908.454.949,00	30,46
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2.384.632.566,00	2.261.331.277,0	123.301.289,00	5,45
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.267.465.012,00	1.283.109.222,00	(15.644.210,00)	1,22
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.702.246.206,00	3.821.515.674,00	(119.269.468,00)	3,12
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.698.870.262,00	1.157.610.366,00	541.259.896,00	46,76
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	798.890.737,00	1.010.583.439,00	(211.692.702,00)	20,95
18	Sekretariat Daerah	12.535.398.189,00	10.610.048.951,00	1.925.349.238,00	18,15
19	Sekretariat DPRD	5.542.088.876,00	5.371.654.645,00	170.434.231,00	3,17
20	Kecamatan Muntok	5.011.762.017,00	5.730.966.709,00	(719.204.692,00)	12,55
21	Kecamatan Simpang Teritip	655.585.200,00	838.044.900,00	(182.459.700,00)	21,77
22	Kecamatan Jebus	955.893.450,00	1.082.325.553,00	(126.432.103,00)	11,68
23	Kecamatan Kelapa	1.889.883.872,00	2.032.500.587,00	142.616.715,00	7,02
24	Kecamatan Tempilang	696.089.000,00	836.647.900,00	(140.558.900,00)	16,80
25	Kecamatan Paritiga	1.019.980.352,00	1.416.034.298,00	(396.053.946,00)	27,97
26	Inspektorat Kabupaten	943.002.458,00	1.035.100.444,00	(92.097.986,00)	8,90
27	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	2.281.578.046,00	3.039.674.541,00	(758.096.495,00)	24,94
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.100.004.297,00	3.423.458.850,00	(323.454.553,00)	9,45
29	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	2.684.273.889,00	2.738.587.156,00	(54.313.267,00)	1,98
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.576.391.040,00	2.613.030.034,00	(36.638.994,00)	1,40
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.248.569.288,00	836.015.193,00	412.554.095,00	49,35
<b>Total</b>		<b>230.598.754.366,04</b>	<b>212.728.808.955,10</b>	<b>17.869.945.410,94</b>	<b>8,40</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Tahun 2022 terdapat kenaikan beban jasa sebesar Rp17.869.945.410,94. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya realisasi belanja jasa pada Organisasi Perangkat Daerah.

Perhitungan Beban Jasa Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja jasa mapping- LRA	249.201.428.936,36
2.	<b>Bertambah :</b>	<b>9.734.132.897,99</b>
	Hutang jasa tahun 2022	6.774.664.519,40
	Reklas dari belanja pegawai Berdasarkan SK Mapping	0,00
	Reklas dari beban perjalanan dinas	14.889.680,00
	Beban jasa dari hibah dana keluarga pada Dinas Dikpora	66.000,00
	Reklas dari beban Persediaan Berdasarkan BA Rekon PPK OPD dengan Pengurus Barang	2.925.839.192,59
	Reklas dari Belanja aset berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	18.673.506,00
3.	<b>Berkurang :</b>	<b>28.336.807.468,31</b>
	Hutang jasa tahun 2021	3.435.044.382,80
	Reklas kebebasan Persediaan Berdasarkan BA Rekon PPK OPD dengan Pengurus Barang	15.887.610.163,30
	Reklas ke beban pemeliharaan Berdasarkan BA Rekon PPK OPD dengan Pengurus Barang	1.985.936.025,53
	Reklas ke Perjalanan Dinas Berdasarkan BA Rekon PPK OPD dengan Pengurus Barang	675.979.496,68
	Reklas ke Aset berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	6.352.237.400,00
4.	<b>Beban Jasa - LO 2022 ( 1 + 2 - 3 )</b>	<b>230.598.754.366,04</b>

#### 4.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban atas pemeliharaan aset dengan tujuan untuk menambah masa manfaat dan menambah nilai aset. Beban pemeliharaan tahun 2022 adalah sebesar Rp12.465.617.905,56. Rincian beban pemeliharaan tahun 2022 dan tahun 2021 sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Pemeliharaan-LO 2022	Beban Pemeliharaan-LO 2021	Kenaikan/ Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.732.706.853,00	2.941.208.801,0	(1.208.501.948,00)	41,09
2	Dinas Kesehatan	817.159.926,56	1.288.608.138,2	(471.448.211,64)	36,59
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.212.764.100,00	3.733.016.495,0	2.479.747.605,00	66,43
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	481.464.717,00	707.262.500,0	(225.797.783,00)	31,93
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	11.295.000,00	24.750.000,0	(13.455.000,00)	54,36
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.170.000,00	0,00	13.170.000,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	Uraian	Beban Pemeliharaan-LO 2022	Beban Pemeliharaan-LO 2021	Kenaikan/ Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	4.200.000,00	25.513.450,0	(21.313.450,00)	83,54
8	Dinas Pertanian dan Pangan	113.389.000,00	11.200.800,0	102.188.200,00	912,33
9	Dinas Lingkungan Hidup	616.658.000,00	344.423.000,0	272.235.000,00	79,04
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32.336.280,00	19.477.800,0	12.858.480,00	66,02
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	41.684.000,00	19.237.500,0	22.446.500,00	116,68
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	83.514.534,00	8.440.000,0	75.074.534,00	889,51
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	160.287.892,00	127.085.035,0	33.202.857,00	26,13
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.000.000,00	5.195.000,0	4.805.000,00	92,49
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	20.126.000,00	13.101.740,0	7.024.260,00	53,61
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49.108.000,00	31.329.302,0	17.778.698,00	56,75
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.058.000,00	14.403.000,0	(6.345.000,00)	44,05
18	Sekretariat Daerah	1.396.653.000,00	1.319.417.800,0	77.235.200,00	5,85
19	Sekretariat DPRD	342.986.000,00	175.915.000,0	167.071.000,00	94,97
20	Kecamatan Muntok	42.651.903,00	31.738.000,0	10.913.903,00	34,39
21	Kecamatan Simpang Teritip	5.000.000,00	15.000.000,0	(10.000.000,00)	66,67
22	Kecamatan Jebus	61.839.700,00	37.500.000,0	24.339.700,00	64,91
23	Kecamatan Kelapa	30.645.000,00	40.438.550,0	(9.793.550,00)	24,22
24	Kecamatan Tempilang	5.200.000,00	7.905.000,0	(2.705.000,00)	34,22
25	Kecamatan Parittiga	3.420.000,00	5.840.000,0	(2.420.000,00)	41,44
26	Inspektorat Kabupaten	2.450.000,00	12.500.000,0	(10.050.000,00)	80,40
27	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	0,00	13.970.000,0	(13.970.000,00)	0,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	94.565.500,00	22.320.000,0	72.245.500,00	323,68
29	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	3.486.500,00	16.390.500,0	(12.904.000,00)	78,73
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	68.798.000,00	42.953.964,0	25.844.036,00	60,17
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	1.424.000,0	(1.424.000,00)	0,00
<b>Total</b>		<b>12.465.617.905,56</b>	<b>11.057.565.375,20</b>	<b>1.408.052.530,36</b>	<b>12,73</b>

Tahun 2022 terdapat kenaikan beban pemeliharaan sebesar Rp1.408.052.530,36. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya realisasi belanja pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Perhitungan Beban Pemeliharaan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Pemeliharaan mapping-LRA	10.470.302.537,00
2.	<b>Bertambah :</b>	<b>2.115.634.362,56</b>
	Reklas dari beban Jasa Berdasarkan BA Rekon PPK OPD dengan Pengurus Barang	1.985.936.025,53
	Reklas dari Belanja aset berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	129.698.337,03
3.	<b>Berkurang :</b>	<b>120.318.994,00</b>
	Reklas ke beban Persediaan Berdasarkan BA Rekon PPK OPD dengan Pengurus Barang	976.000,00
	Reklas ke Aset berdasarkan BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	119.342.994,00
4.	<b>Beban Pemeliharaan -LO 2022 (1 + 2 - 3)</b>	<b>12.465.617.905,56</b>

#### 4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah beban atas perjalanan dinas pegawai dalam satu periode pelaporan, baik perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah maupun perjalanan dinas luar negeri. Belanja perjalanan dinas tahun 2022 adalah sebesar Rp33.232.728.223,68. Rincian beban perjalanan dinas tahun 2022 dan tahun 2021 sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Perjalanan Dinas-LO 2022	Beban Perjalanan Dinas-LO 2021	Kenaikan/ Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.313.710.647,00	630.997.972,00	682.712.675,00	108,20
2	Dinas Kesehatan	6.710.988.270,68	5.105.648.899,00	1.605.339.371,68	31,44
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	732.277.201,00	254.105.159,00	478.172.042,00	188,18
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	482.182.494,00	497.803.328,00	(15.620.834,00)	3,14
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	491.081.177,00	942.192.815,00	(451.111.638,00)	47,88
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	478.991.000,00	448.414.500,00	30.576.500,00	
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	671.898.677,00	534.277.610,00	137.621.067,00	25,76
8	Dinas Pertanian dan Pangan	561.400.804,00	440.925.250,00	120.475.554,00	27,32
9	Dinas Lingkungan Hidup	205.884.400,00	278.416.680,00	(72.532.280,00)	26,05
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	202.701.251,00	266.591.399,00	(63.890.148,00)	23,97
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.138.341.543,00	1.586.469.441,00	(448.127.898,00)	28,25
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	583.512.796,00	365.193.172,00	218.319.624,00	59,78
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	396.181.541,00	397.416.996,00	(1.235.455,00)	0,31
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	378.608.499,00	349.927.897,00	28.680.602,00	8,20
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	331.139.892,00	375.685.450,00	(44.545.558,00)	11,86



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	Uraian	Beban Perjalanan Dinas-LO 2022	Beban Perjalanan Dinas-LO 2021	Kenaikan/ Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	229.055.529,00	179.563.299,00	49.492.230,00	27,56
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	201.360.474,00	332.391.285,00	(131.030.811,00)	39,42
18	Sekretariat Daerah	2.058.864.905,00	1.682.552.028,01	376.312.876,99	22,37
19	Sekretariat DPRD	11.986.816.294,00	8.650.941.062,00	3.335.875.232,00	38,56
20	Kecamatan Muntok	368.799.074,00	397.312.113,00	(28.513.039,00)	7,18
21	Kecamatan Simpang Teritip	89.847.000,00	109.860.000,00	(20.013.000,00)	18,22
22	Kecamatan Jebus	126.975.000,00	116.379.000,00	10.596.000,00	9,10
23	Kecamatan Kelapa	173.069.800,00	182.352.230,00	(9.282.430,00)	5,09
24	Kecamatan Tempilang	106.448.800,00	126.970.000,00	(20.521.200,00)	16,16
25	Kecamatan Paritiga	115.719.800,00	125.450.000,00	(9.730.200,00)	7,76
26	Inspektorat Kabupaten	1.553.672.024,00	2.169.158.721,00	(615.486.697,00)	28,37
27	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	319.693.603,00	626.617.882,00	(306.924.279,00)	48,98
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	463.012.334,00	346.460.966,00	116.551.368,00	33,64
29	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	247.697.836,00	311.490.038,00	(63.792.202,00)	20,48
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	319.693.558,00	388.954.942,00	(69.261.384,00)	17,81
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	193.102.000,00	108.373.083,00	84.728.917,00	78,18
	<b>Total</b>	<b>33.232.728.223,68</b>	<b>28.328.893.217,01</b>	<b>4.903.835.006,67</b>	<b>17,31</b>

Tahun 2022 terdapat kenaikan beban perjalanan dinas sebesar Rp4.903.835.006,67. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya realisasi belanja perjalanan dinas pada Organisasi Perangkat Daerah.

Perhitungan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Perjalanan Dinas mapping- LRA	32.623.931.733,00
2.	<b>Bertambah :</b>	<b>675.979.496,68</b>
	Reklas dari belanja jasa Berdasarkan BA Rekon PPK OPD dengan Pengurus Barang	675.979.496,68
3.	<b>Berkurang :</b>	<b>67.183.006,00</b>
	Reklas ke beban jasa	14.889.680,00
	Reklas ke belanja aset BA Rekon Pengadaan Pengurus Barang	52.293.326,00
4.	<b>Beban Perjalanan Dinas-LO 2022 (1+2-3)</b>	<b>33.232.728.223,68</b>

#### 4.2.8 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah-LO tahun 2022 sebesar Rp15.049.649.575,00, jika dibandingkan



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

dengan Beban Hibah-LRA tahun 2022 sebesar Rp15.154.171.375,00 terdapat perbedaan sebesar Rp104.521.800 yang merupakan belanja hibah BOP PAUD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang direklas menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

Beban Hibah tahun 2022 adalah sebesar Rp15.049.649.575,00. dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Hibah-LO 2022
		(Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	9.770.027.700,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	129.565.000,00
3	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	275.000.000,00
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	163.471.875,00
5	Sekretariat Daerah	3.246.800.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.464.785.000,00
<b>Total</b>		<b>15.049.649.575,00</b>

#### 4.2.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat yang sifatnya selektif dan tidak berkelanjutan, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban Bantuan Sosial tahun 2022 adalah sebesar Rp7.139.353.521,00, jika disandingkan dengan Belanja Bantuan Sosial - LRA tahun 2022 sebesar Rp8.003.955.521,00 terdapat perbedaan sebesar Rp864.602.000,00 yang diakui sebagai belanja persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Beban Bantuan Sosial tahun 2022 adalah sebesar Rp7.139.353.521,00. Rincian beban pemeliharaan tahun 2022 dan tahun 2021 sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Bantuan Sosial-LO 2022	Beban Bantuan Sosial-LO 2021	Kenaikan/ Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	0,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	1.271.376.421,00	0,00	1.271.376.421,00	0,00
3	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	0,00	174.862.000,00	(174.862.000,00)	0,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	5.400.326.700,00	0,00	5.400.326.700,00	0,00
5	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	2.008.924.400,00	2.008.924.400,00	-100,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
7	Sekretariat Daerah	158.000.000,00	0,00	158.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	Uraian	Beban Bantuan Sosial-LO 2022	Beban Bantuan Sosial-LO 2021	Kenaikan/ Penurunan	% Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
8	Kecamatan Muntok	0,00	194.518.500,00	(194.518.500,00)	100,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.650.400,00	3.172.374,00	478.026,00	15,07
<b>Total</b>		<b>7.139.353.521,00</b>	<b>2.381.477.274,00</b>	<b>4.757.876.247,00</b>	<b>199,79</b>

Perhitungan Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Bantuan Sosial mapping-LRA	8.003.955.521,00
2.	<b>Berkurang :</b>	<b>864.602.000,00</b>
	Reklas ke beban Persediaan	864.602.000,00
3.	<b>Beban Bantuan Sosial - LO 2022 (1 + 2 - 3)</b>	<b>7.139.353.521,00</b>

Beban Bantuan Sosial tahun 2022 adalah sebesar Rp7.139.353.521,00. dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Bantuan Sosial-LO 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	290.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	864.602.000,00
3	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	1.271.376.421,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	5.400.326.700,00
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.000.000,00
6	Sekretariat Daerah	158.000.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.650.400,00
<b>Total</b>		<b>7.139.353.521,00</b>

#### 4.2.10 **Beban Penyisihan Piutang Pajak**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang tahun 2022 adalah sebesar Rp490.515.959,05. Perhitungan beban penyisihan piutang pajak telah disajikan pada CALK Penyisihan Piutang Pajak di Neraca.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Beban penyisihan piutang pajak tahun 2022 adalah sebagai berikut :

OPD	Jenis Pajak	Beban Penyisihan Piutang Pajak-LO 2022 (Rp)
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Pajak Reklame	2.533.842,62
	Pajak Air Tanah	72.845,93
	Pajak Bumi dan Bangunan	487.909.270,50
<b>Total</b>		<b>490.515.959,05</b>

#### 4.2.11 **Beban Penyisihan Piutang Retribusi**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2022 sebesar Rp3.386.495,86. Perhitungan beban penyisihan piutang retribusi telah disajikan pada CALK Penyisihan Piutang Retribusi di Neraca.

Beban penyisihan piutang retribusi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

OPD	Jenis Retribusi	Beban Penyisihan PiutangRetribusi-LO 2022 (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan	3.240.000,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	146.495,86
<b>Total</b>		<b>3.386.495,86</b>

#### 4.2.12 **Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil**

Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil.

#### 4.2.13 **Beban Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Perkuatan Modal**

Beban Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Perkuatan Modal merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Beban Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Perkuatan Modal, hal ini dikarenakan Piutang Bagian Lancar Pinjaman Perkuatan Modal telah disisihkan seluruhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**4.2.14 Beban Penyisihan Piutang Lainnya**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesarpersentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Beban Penyisihan Piutang Lainnya.

**4.2.15 Beban Penyusutan Aset Tetap**

Beban Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap Tahun 2022 adalah sebesar Rp99.344.155.134,00. Beban penyusutan aset tetap akan menambah akumulasi penyusutan. Contoh perhitungan Beban Penyusutan Aset Tetap telah dijelaskan pada CALK Aset Tetap. Nilai Beban penyusutan aset tetap sebesar Rp99.344.155.134,00 diperoleh dari Aplikasi SIMDA BMD dan Kertas Kerja perhitungan Beban dan Akumulasi Penyusutan. Rincian Beban penyusutan aset tetap Tahun 2022 per OPD adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Beban Penyusutan Aset Tetap- LO 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	15.141.186.231,00
2	Dinas Kesehatan	10.447.408.838,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	58.712.981.476,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	2.666.112.677,00
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	448.795.681,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.978.933,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	54.670.427,00
8	Dinas Pertanian dan Pangan	1.437.866.974,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.005.426.970,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	373.780.241,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	469.929.910,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	489.233.673,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	782.723.847,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	147.446.874,00
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	826.148.557,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	358.289.024,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	194.398.870,00
18	Sekretariat Daerah	2.994.159.046,00
19	Sekretariat DPRD	720.185.161,00
20	Kecamatan Muntok	433.551.618,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	Uraian	Beban Penyusutan Aset Tetap- LO 2022 (Rp)
21	Kecamatan Simpang Teritip	105.042.762,00
22	Kecamatan Jebus	155.548.930,00
23	Kecamatan Kelapa	282.669.787,00
24	Kecamatan Tempilang	89.891.953,00
25	Kecamatan Parittiga	122.734.935,00
26	Inspektorat Kabupaten	38.179.594,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	137.515.264,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	185.067.445,00
29	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	156.531.494,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	343.609.374,00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.088.568,00
<b>Total</b>		<b>99.344.155.134,00</b>

#### 4.2.16 **Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud**

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud merupakan beban amortisasi atas aset tak berwujud selama satu periode pelaporan. Nilai Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud diperoleh dari Aplikasi SIMDA BMD. Beban amortisasi aset tak berwujud Tahun 2022 adalah sebesar Rp50.534.278,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Amortisasi-LO 2022 (Rp)
1	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan	1.232.750,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.800.000,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.535.195,00
4	Kecamatan Muntok	5.000.000,00
5	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	10.165.000,00
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.801.333,00
<b>Total</b>		<b>50.534.278,00</b>

#### 4.2.17 **Beban Penyusutan Aset Lain-Lain**

Beban penyusutan aset lain-lain merupakan beban penyusutan atas aset lain-lain selama satu periode pelaporan. Nilai Beban Penyusutan Aset Lain-Lain diperoleh dari Aplikasi SIMDA BMD dan Kertas Kerja perhitungan Beban dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain. Beban Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.030.005.101,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**4.2.18 Beban Transfer**

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer tahun 2022 adalah sebesar Rp114.215.469.015,00. Tidak terdapat perbedaan antara Beban Transfer dan realisasi Transfer LRA tahun 2022.

**4.2.19 Beban Lain-Lain**

Beban Lain-Lain merupakan beban yang bukan berasal dari belanja operasi dan tidak dianggarkan dalam APBD. Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Beban Lain-Lain.

**4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya dan defisit penghentian aset. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp5.069.729.968,00 sedangkan pada tahun 2021 mengalami surplus sebesar Rp22.823.939,00. Defisit sebesar Rp5.069.729.968,00 disebabkan laba operasional BUMD sebesar Rp227.831.669,00 dan Defisit Penghapusan Aset Tetap tahun 2022 sebesar Rp5.297.561.637,00. Defisit Penghapusan Aset Tetap tahun 2022 disajikan pada akun Defisit Penghentian Aset Tetap-Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, sedangkan pada tahun 2021 penghapusan aset tetap disajikan pada akun Koreksi Ekuitas di Laporan Perubahan Ekuitas.

**i. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Tahun 2022 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah sebesar Rp227.831.669,00 yang merupakan laba pada Perumda Air Minum Tirta Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp266.755.418,00 dan rugi Perusahaan Daerah Bangka Barat Sejahtera sebesar Rp38.923.749,00.

**ii. Defisit Penghentian Aset**

Tahun 2022 Defisit penghentian Aset Kabupaten Bangka Barat adalah sebesar Rp5.297.561.637,00 yang merupakan penghapusan aset tetap.

**4.4 Pos Luar Biasa**

Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Pos Luar Biasa.

**4.5 Surplus/Defisit - LO**

Surplus/Defisit-LO merupakan surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional. Tahun 2022 Surplus/Defisit-LO sebesar Rp189.806.596.542,21.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**5. LAPORAN ARUS KAS**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu. Laporan Arus Kas tahun 2022 tidak dikonsolidasi dengan arus kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan arus kas Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Laporan Arus Kas Tahun 2022 hanya menyajikan arus kas di Kas Daerah dan arus kas BLUD.

**5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

**5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	21.724.751.484,90	20.041.982.581,75
Penerimaan Retribusi Daerah	7.355.787.438,00	4.430.974.655,25
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.306.960.199,78	4.856.440.070,26
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.030.240.728,11	23.592.733.307,60
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	34.564.587.906,00	38.175.806.882,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	176.103.280.339,00	60.543.348.225,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	419.082.296.005,00	419.681.643.719,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	86.607.050.142,00	128.720.362.350,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	58.720.679.000,00	91.154.924.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi	54.567.478.715,00	37.901.443.662,20
Penerimaan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi	4.966.800.000,00	14.474.800.000,00
Penerimaan Lainnya / JKN	9.116.562.372,00	0,00
<b>Total</b>	<b>923.146.474.329,79</b>	<b>843.574.459.453,06</b>

**5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Pembayaran Pegawai	335.609.309.837,00	322.992.501.842,00
Pembayaran Barang	288.533.459.532,36	275.577.320.766,92
Pembayaran Hibah	10.767.262.375,00	12.977.137.865,00
Pembayaran Bantuan Sosial	8.003.955.521,00	2.381.477.274,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Pembayaran Bantuan Keuangan	110.181.743.500,00	111.806.935.600,00
Pembayaran Tak Terduga	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil ke Desa	4.033.725.515,00	2.595.710.027,98
<b>Total</b>	<b>757.129.456.280,36</b>	<b>728.331.083.375,90</b>

Arus kas bersih aktivitas operasi sebesar Rp166.017.018.049,43. Penyajian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi pada tahun 2022 telah menyajikan Pendapatan BLUD, begitu juga dengan Belanja Pegawai dan Belanja Barang yang bersumber dari Dana BLUD telah disajikan dalam Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi. Sedangkan Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN serta Pendapatan dan Belanja Dana BOS APBN untuk Tingkat SD dan SMP Negeri tidak disajikan ke RKUD, sehingga tidak disajikan dalam komponen Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi.

## 5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

### 5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Perolehan Tanah	0,00	5.498.170.870,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	23.817.842.699,00	21.830.836.474,18
Perolehan Gedung dan Bangunan	23.708.809.580,03	29.175.689.926,36
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.794.316.695,30	51.028.328.004,94
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.153.600.081,00	3.484.842.850,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>72.474.569.055,33</b>	<b>111.017.868.125,48</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Arus Kas bersih aktivitas investasi sebesar Rp72.474.569.055,33. Arus kas bersih dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa mendatang. Pada tahun 2022, penyajian nilai Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi untuk Belanja Modal yang bersumber dari Dana BLUD disajikan dalam Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi. Sedangkan untuk Belanja Modal yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan Dana BOS APBN tidak disajikan dalam Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi.

### 5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

#### 5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Pengembalian Sisa Kas Tahun Lalu	0,00	55.040.687,00
Pengembalian Belanja Tahun Berjalan	0,00	344.512.930,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman	36.676.250,00	171.029.020,00
Konversi Nilai Penyertaan Modal	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>36.676.250,00</b>	<b>570.582.637,00</b>

#### 5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp 36.676.250,00. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan dan pemberian pinjaman jangka panjang.

#### 5.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

##### 5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran Per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas Transitoris	0,00	4.067.155.498,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	18.377.256.175,00	18.691.370.872,00
<b>Total</b>	<b>18.377.256.175,00</b>	<b>22.758.526.370,00</b>

##### 5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran Per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas Transitoris	0,00	4.067.155.498,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	18.377.201.148,00	19.019.715.054,00
<b>Total</b>	<b>18.377.201.148,00</b>	<b>23.086.870.552,00</b>

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga merupakan penerimaan dan pengeluaran PFK pada Bendahara Umum Daerah yaitu penerimaan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21, Taperum, dan Iuran Jaminan Kesehatan.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak dipengaruhi oleh anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah. Arus Kas Bersih aktivitas non anggaran tahun 2022 sebesar Rp55.027,00 yang merupakan Perhitungan Fihak Ketiga yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum disetor.

##### 5.4.2 Saldo Kas

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>93.579.180.271,10</b>	<b>4.467.746.406,68</b>
<b>Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran dan BLUD</b>	<b>13.565.582.382,61</b>	<b>8.934.989.081,93</b>
- Saldo Awal Kas di Kas Daerah	7.236.624.850,88	1.449.593.366,85
- Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	1.300,00	55.040.687,00
- Saldo Awal Kas di BLUD	6.328.956.231,73	7.430.355.028,08



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Saldo Awal Kas di Bendahara JKN	343.280.885,00	1.194.277.952,00
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu	0,00	0,00
Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	205.000,00
Saldo Awal Kas Lainnya	0,00	218.798.646,00
Saldo Awal Kas Dana BOS dan Kas Lainnya di Sekolah	437.825.113,00	1.067.486.027,00
<b>Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran dan BLUD</b>	<b>107.144.707.626,71</b>	<b>13.565.582.382,61</b>
- Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	93.149.349.623,97	7.236.624.850,88
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	52.662.284,00	1.300,00
- Saldo Akhir Kas di BLUD	13.942.695.718,74	6.328.956.231,73
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN</b>	<b>9.290.072,00</b>	<b>343.280.885,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>6.525.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas Lainnya</b>	<b>55.027,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas Dana BOS dan Kas Lainnya di Sekolah</b>	<b>37.804.072,00</b>	<b>437.825.113,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>107.198.381.797,71</b>	<b>14.346.688.380,61</b>

Saldo Akhir Kas yang disajikan pada LAK sebesar Rp107.198.381.797,71 sedangkan SiLPA LRA sebesar Rp107.191.801.770,71 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp6.580.027,00 yang terdiri dari :

- Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp6.525.000,00 yang tidak disajikan sebagai Pendapatan Retribusi pada Laporan Realisasi Anggaran
- Saldo Kas Lainnya sebesar Rp55.027,00 yang merupakan Perhitungan Fihak Ketiga yang belum disetor.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan perubahan ekuitas pada periode pelaporan dibandingkan dengan periode pelaporan sebelumnya. Perubahan ekuitas tersebut disebabkan oleh surplus/defisit operasional tahun berjalan dan akibat dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar.

**6.1. Ekuitas Awal**

Ekuitas awal tahun 2022 merupakan ekuitas akhir tahun 2021 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas awal 2022 adalah sebesar Rp1.409.262.172.443,38.

**6.2. Surplus/Defisit – LO**

Surplus/Defisit–LO merupakan surplus/defisit operasional tahun berjalan yang merupakan selisih antara pendapatan operasional dan beban operasional. Tahun 2022 Surplus/Defisit-LO adalah sebesar Rp189.806.596.542,21.

**6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar yang mengakibatkan perubahan nilai aset sehingga mempengaruhi nilai ekuitas. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebesar Rp100.195.442.727,62 dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Nilai Tahun 2022 (Rp)	Nilai Tahun 2021 (Rp)
Koreksi Ekuitas Lainnya	(144.539.343,66)	223.427.368,52
Penyesuaian Penyisihan Piutang	153.191.151,68	344.135.190,85
Penyesuaian Aset Dibawah Kapitalisasi	(2.684.827.003,00)	(2.771.768.150,00)
Koreksi Nilai	102.871.617.922,60	2.854.354.656,00
<b>Total</b>	<b>100.195.442.727,62</b>	<b>650.149.065,37</b>

Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2022 sebesar Rp144.539.343,66 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
- Pembulatan Aset	652,70
- Dropping Aset	12.989.760,00
- koreksi catat laba/rugi investasi tahun 2021	(25.042.935,00)
- hibah persediaan ke instansi vertikal	(132.486.821,36)
<b>Total</b>	<b>(144.539.343,66)</b>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

- Pembulatan merupakan pembulatan nilai perolehan aset, baik pembulatan nilai keatas maupun pembulatan nilai kebawah.
- Drooping aset merupakan mutasi aset antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- Koreksi catat ekuitas/laba dan rugi investasi tahun 2021 merupakan koreksi atas lebih saji Ekuitas Akhir tahun 2021 dan rugi operasional tahun 2022 pada PD. Bangka Barat Sejahtera.
- Hibah aset merupakan hibah atas aset Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kepada pihak lain.

Penyesuaian penyisihan piutang sebesar Rp153.191.151,68 merupakan pelunasan atas piutang yang telah dilakukan penyisihan dan koreksi catat penyisihan piutang tahun sebelumnya dengan rician sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
- Pelunasan piutang pajak	91.997.172,73
- Koreksi catat penyisihan piutang	24.517.728,95
- Pelunasan piutang bagian lancar	36.676.250,00
<b>Total</b>	<b>153.191.151,68</b>

Penyesuaian Aset dibawah kapitalisasi merupakan penyesuaian atas pengadaan tahun berjalan yang nilai pengadaannya dibawah nilai kapitalisasi aset berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan perubahan kodefikasi barang milik daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Koreksi Nilai tahun 2022 sebesar Rp102.871.617.922,60 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset dan akumulasi penyusutan aset dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
- Koreksi pencatatan aset	102.873.625.786,00
- Koreksi pencatatan akumulasi penyusutan aset	(710.417,00)
- Koreksi Catat Piutang Pajak Tahun Lalu	(9.589.190,00)
- Koreksi lebih saji utang tahun 2020	8.291.743,60
<b>Total</b>	<b>102.871.617.922,60</b>

#### 6.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 sebesar Rp1.699.264.211.713,21.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**Penjelasan Lainnya**

Penjelasan Lainnya adalah penjelasan atas kejadian di tahun 2022 maupun hal –hal yang perlu dijelaskan terkait penyusunan laporan keuangan tahun 2022 yaitu:

1. Penyajian Laporan Keuangan

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tahun 2021 yang disajikan merupakan laporan konsolidasi antara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Sejalan Setason. Sedangkan Arus Kas Dana BOS dan Arus Kas Dana JKN tidak dikonsolidasi pada Laporan Arus Kas.

2. Berdasarkan Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas Penerimaan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan di Kecamatan Muntok pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat Nomor 700/002/IRDA/2023 tanggal 10 Februari 2023 terdapat Penerimaan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang dikontrakan di Kecamatan Muntok yang telah dipungut pada tahun 2022 namun per 31 Desember 2022 belum disetor dan masih berada dibawah penguasaan Juru Pungut sebesar Rp119.520.000,00 dan Bendahara Penerimaan sebesar Rp900.000,00.

Penerimaan Retribusi tersebut disetor ke Kas Daerah pada tanggal 21 Maret 2023.

3. Nilai Jaminan yang diagunkan dalam pemberian pinjaman perkuatan modal kelompok nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dalam penyaluran pinjaman perkuatan modal kelompok nelayan, penerima pinjaman diwajibkan untuk memberikan jaminan atas pinjaman tersebut. Berikut rincian jaminan atas pinjaman perkuatan modal kelompok nelayan tahun 2012-2015:

**Dana Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan  
Tahun 2012**

No	Nama Kelompok & Ketua	Alamat	RUB (Rp)	Nilai Jaminan (Rp)	Keterangan
1	Menanti Ketua : Husin	Desa sukul Kec. Muntok	74.500.000,00	48.804.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	Nama Kelompok & Ketua	Alamat	RUB (Rp)	Nilai Jaminan (Rp)	Keterangan
2	Biru Laut Ketua : Muhadi Rahman	Desa Sekar Biru Kec. Parit Tiga	70.590.000,00	91.519.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
3	Teluk Akek Ketua : Hamzah	Desa Pusuk Kec. Kelapa	75.000.000,00	128.340.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
4	Gelem Guntong Ketua : Azikin	Desa Air Lintang Kec. Tempilang	29.280.000,00	63.320.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
5	Jiran Siantan Ketua : M. Ridwan	Desa Tanjung Kec. Muntok	75.000.000,00	75.000.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
6	Belanak Ketua : Saifudin	Desa Air Menduyung Kec. Simp. Teritip	74.765.000,00	78.100.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
<b>Jumlah</b>			<b>399.135.000,00</b>	<b>485.083.000,00</b>	

**Dana Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan**  
**Tahun 2013**

No	Nama Kelompok & Ketua	Alamat	RUB (Rp)	Nilai Jaminan (Rp)	Keterangan
1	Barokah I Ketua : Dede Ibrahim	Kp. Tanjung Kec. Muntok	50.000.000,00	90.000.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
2	Barokah 2 Ketua : Erwan	Kp. Tanjung Kec. Muntok	40.000.000,00		<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
3	Kp. Air Terjun Ketua : Surtejo	Kp. Tanjung Kec. Muntok	75.000.000,00	89.112.500,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
4	Karya Bahari Ketua : Sugeng	Dsn. Pait Kec. Muntok	75.000.000,00	163.800.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
5	Sinar Matahari Ketua : Latan	Ds. Air Nyatoh Kec. Sp. Teritip	46.065.000,00	55.928.125,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	Nama Kelompok & Ketua	Alamat	RUB (Rp)	Nilai Jaminan (Rp)	Keterangan
6	Hiu Putih Ketua : Romli	Ds. Kundi Kec. Sp. Teritip	72.800.000,00	90.646.375,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
7	Beting Tunggul Ketua : Agus	Ds. Pusuk Kec. Kelapa	75.000.000,00	90.228.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
8	Goyang Kelabat Ketua : Abdu Rasyid	Ds. Pusuk Kec. Kelapa	75.000.000,00	115.056.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
9	Pasir Kuning 1 Ketua : Arsyad	Ds. Air Lintang Kec. Kelapa	75.000.000,00	108.600.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
10	Pasir Kuning 2 Ketua : Supriadi	Ds. Air Lintang Kec. Tempilang	37.500.000,00	66.500.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
<b>Jumlah</b>			<b>621.365.000,00</b>	<b>869.871.000,00</b>	

**Dana Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Tahun  
2014**

No	Nama Kelompok & Ketua	Alamat	RUB (Rp)	Nilai Jaminan (Rp)	Keterangan
1	Teluk Rubiah Jaya Ketua : Maulana	Kp. Tanjung Kec. Muntok	20.000.000,00	25.850.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
2	Kolek Bersama Ketua : Erwan	Desa. S. Daeng kec. Muntok	60.000.000,00	67.200.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
3	Rumpun Tanjung Ular Ketua : Ten Njuk San	Desa. Air Putih Kec. Muntok	20.000.000,00	20.520.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
4	Teluk Rubiah Ketua : Suwandi	Kel. Tanjung Kec. Muntok	75.000.000,00	78.000.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
5	Dsn. Tanjung Punai Ketua : Damsah	Dsn. Tj Punai Kec. Muntok	60.000.000,00	70.850.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	Nama Kelompok & Ketua	Alamat	RUB (Rp)	Nilai Jaminan (Rp)	Keterangan
6	Meluber Ketua : Deki s	Ds. Air Nyatoh Kec. Sp. Teritip	60.000.000,00	78.250.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
7	Ketapang Ketua : Sumarto	Ds. Air Nyatoh Kec. Sp. Teritip	48.000.000,00	48.250.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
8	Beting Kandis Ketua : Suhaimi S	Ds. Pusuk Kec. Kelapa	75.000.000,00	86.140.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
9	Teluk Kandis Ketua : Asmawi	Ds. Pusuk Kec. Kelapa	52.000.000,00	52.300.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
10	Raja Karang Ketua : Marzuki	Ds. Bakit Kec. Parit tiga	75.000.000,00	76.120.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
11	Mutiara Laut Ketua : Suadi	Ds. Bakit Kec. Parit Tiga	75.000.000,00	77.440.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
12	Karang Berang Berang Ketua : Efendi	Ds. S. Buluh Kec. Jebus	75.000.000,00	75.084.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
13	Teluk Akop Ketua : Sahbandi	Ds. Air Lintang Kec. Tempilang	75.000.000,00	129.725.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
<b>Jumlah</b>			<b>750.000.000,00</b>	<b>885.729.000,00</b>	

**Dana Fasilitas Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Tahun 2015**

No	Nama Kelompok & Ketua	Alamat	RUB Rp)	Nilai Jaminan (Rp)	Keterangan
1	Tj Putra Bahari Ketua : Imran Hasan	Kel. Tanjung Kec. Muntok	52.500.000,00	52.600.000	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
2	Selindung Jaya Ketua : Adin	Dsn. Selindung Kec. Muntok	41.000.000,00	41.360.000	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	Nama Kelompok & Ketua	Alamat	RUB Rp)	Nilai Jaminan (Rp)	Keterangan
3	Harapan Semesta Ketua : Sudarso	Kel. Tanjung Kec. Muntok	17.250.000,00	17.800.000	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
4	Ketam Ketua : Burhanudin	Kel. Tanjung Kec. Muntok	43.500.000,00	43.700.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
5	Sinar Tj. Harapan Ketua : Ardani B	Kel. Tanjung Kec. Muntok	73.500.000,00	73.560.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
6	Sinar Cahaya Ketua : Rusdan	Kel. Tanjung Kec. Muntok	48.750.000,00	49.440.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
7	Kuat Bersama Ketua : H. Nurdin	Kel. Tanjung Kec. Muntok	75.000.000,00	79.700.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
8	Mandiri Usaha Bersama Ketua : Junaili	Kel. Tanjung Kec. Muntok	40.000.000,00	40.000.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
9	Tapak Nelayan Ketua : Andreas	Kel. S. Daeng Kec. Muntok	62.500.000,00	62.680.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
10	Issamsi Ketua : Iskandar	Ds. Pangek Kec. Sp. Teriti]	36.240.000,00	36.248.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
11	Sinar Laut Mandiri Ketua : Abdul K	Ds. Bukit Terak Kec. Sp. Teritip	36.000.000,00	36.000.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
12	Samudera Ketua : Ba'in	Ds. Kundi Kec. Sp. Teritip	32.000.000,00	32.000.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
13	Sinar Harapan Laut 1 Ketua : Subuhari	Ds. Air lintang Kec. Tempilang	75.000.000,00	117.720.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
14	Sinar Harapan Laut 2 Ketua : Muslimin	Ds. Air Lintang Kec. Tempilang	75.000.000,00	139.230.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

No	Nama Kelompok & Ketua	Alamat	RUB Rp)	Nilai Jaminan (Rp)	Keterangan
15	Sinar Abadi 1 Ketua : Abesor	Ds. Air Lintang Kec. Tempilang	75.000.000,00	129.304.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
16	Teluk Akik Ketua : Kasir Munir	Ds. Pusuk Kec. Kelapa	50.000.000,00	50.064.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
17	Teluk Kelabat Jaya Ketua : Kamaludin	Ds. Pusuk Kec. Kelapa	58.750.000,00	59.760.000,00	<i>Pinjaman belum lunas dan agunan belum dikembalikan</i>
<b>Jumlah</b>			<b>891.990.000,00</b>	<b>1.061.166.000,00</b>	



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**BAB 6**

**PENUTUP**

Kami meyakini bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan yang harus disampaikan kepada publik. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan menggunakan prinsip transparansi, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan tujuan *New Public Management*.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kelengkapan dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun AnggaranPendapatan dan Belanja DaerahPemerintah Kabupaten Bangka Barat. Laporan keuangan ini disusun menggunakan prinsip standar akuntansi pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini menyajikan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan sebagai suatu kesatuan yang komprehensif dan menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Laporan keuangan disajikan sedemikian rupa agar dapat dipahami secara mudah dan jelas oleh para pengguna laporan keuangan yang tidak terbatas hanya pada tingkat manajemen entitas pelaporan, badan pemeriksa ataupun kalangan pembaca tertentu, namun juga pada masyarakat publik. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang baik dan lebih lengkap akan menghindari terjadinya *information gap* dan *bias* yang tidak diharapkan. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan atas elemen-elemen laporan keuangan yang lebih lengkap dan akurat, berupa pengungkapan yang memadai dan diperlukan demi memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan dan demi penyajian laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian.

**BUPATI BANGKA BARAT,**

**H. SUKIRMAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 Dan 2021

**BAB 6**

**PENUTUP**

Kami meyakini bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan yang harus disampaikan kepada publik. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan menggunakan prinsip transparansi, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan tujuan *New Public Management*.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kelengkapan dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun AnggaranPendapatan dan Belanja DaerahPemerintah Kabupaten Bangka Barat. Laporan keuangan ini disusun menggunakan prinsip standar akuntansi pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini menyajikan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan sebagai suatu kesatuan yang komprehensif dan menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Laporan keuangan disajikan sedemikian rupa agar dapat dipahami secara mudah dan jelas oleh para pengguna laporan keuangan yang tidak terbatas hanya pada tingkat manajemen entitas pelaporan, badan pemeriksa ataupun kalangan pembaca tertentu, namun juga pada masyarakat publik. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang baik dan lebih lengkap akan menghindari terjadinya *information gap* dan *bias* yang tidak diharapkan. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan atas elemen-elemen laporan keuangan yang lebih lengkap dan akurat, berupa pengungkapan yang memadai dan diperlukan demi memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan dan demi penyajian laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian.

  
BUPATI BANGKA BARAT,  
H. SUKIRMAN